MIFTAHUDIN

LINGKUP PEREKONOMIAN INDONESIA

UNSIQ

UNIVERSITAS SAINS AL QUR'AN JAWA TENGAH
الجامعة لعلوم القرآن
UNSIQ
JAWA TENGAH
WONOSOBO

LINGKUP PEREKONOMIAN INDONESIA

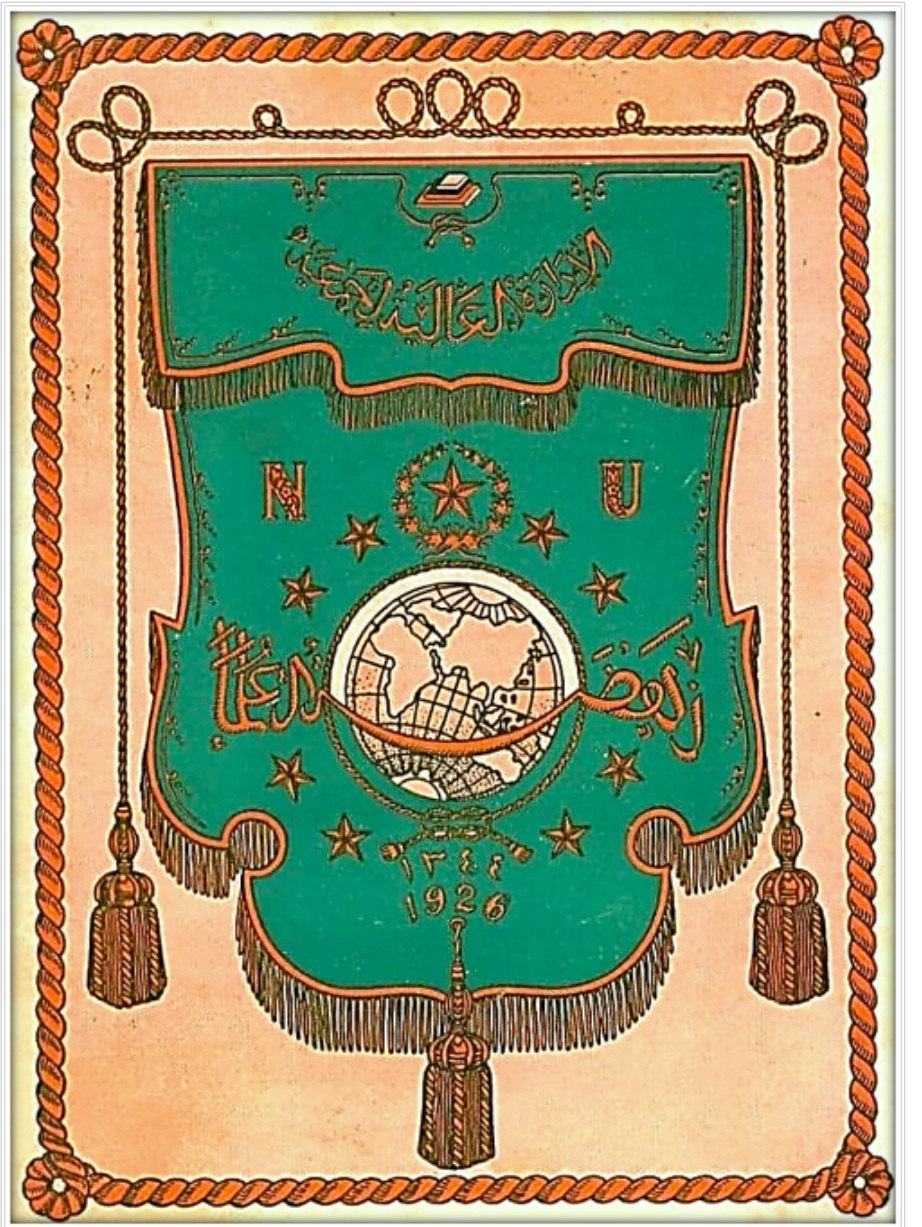
الإدارة العالية للجمعية
N
U
نهضة العلماء
١٣٤٤
1926

MIFTAHUDIN, S.E., M.M.

LINGKUP PEREKONOMIAN INDONESIA

UNSIQ PRESS

Copyright @Miftahudin, S.E., M.M., LP3M Unsiq, 2018
All rights reserved

LINGKUP PEREKONOMIAN INDONESIA
Miftahudin, S.E, M.M

x + 210 + halaman; 15,5 x 23 cm

Editor: Haryanto Affandi, M. Pd.
Rancang Sampul: Ruhtata
Setting/*Layout*: Tim Redaksi

Penerbit : UNSIQ Press
LP3M Universitas Sains Al-Qur'an jawa Tengah di Wonosobo
Jl. Raya Kalibeber KM. 03 Wonosobo
Telp. (0286) 321873, Fax. (0286) 324160
E-mail. lp3mpbpress@gmail.com

ISBN: 978-602-61756-4-9

Cetakan Pertama, 2018

Hak cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufiq dan hidayahNya, buku perekonomian indonesia ini dapat disusun dan disajikan untuk para pembaca sekalian. Kehadiran buku ini dirancang bukan saja untuk keperluan dalam proses belajar mengajar tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya.

Buku ini disusun dimaksudkan sebagai Referensi dalam mempelajari perekonomian indonesia dikalangan Mahasiswa, Pelajar serta masyarakat pada umumnya. Dengan diselesaikan buku ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi penulis.

Sebagai sebuah kerja, kami sangat menyadari dalam penulisan buku inimasih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan buku ini. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan buku ini, kami mengucapkan banyak terimakasih dan kami hanya bisa berdoa, semoga Allah SWT senantiasa memberikan imbalan dengan ganjaran ibadah, rezeki yang melimpah serta ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Rabbal 'alamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wonosobo, 20 Pebruari 2018

Penulis

Meftahudin, S.E, M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ___v
DAFTAR ISI ___vii

BAB I SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PEREKONOMI INDONESIA ___1
A. Pemerintahan Orde Lama ___1
B. Pemerintah Orde Baru ___3
C. Pemerintahan Transisi ___7
D. Seklumit Pemerintahan Reformasi Hingga Kabinet Joko Widodo ___11

BAB II SISTEM EKONOMI INDONSIA ___19
A. Pengertian Sistem Ekonomi ___19
B. Macam-macam Sistem Ekonomi ___19
C. Sistem Ekonomi Indonesia ___23

BAB III KEBIJAKAN FISKAL ___33
A. Hubungan kebijakan fiskal dengan pembangunan ___38
B. Hubungan pemerintah pusat dengan daerah dalam kebijakan fiskal ___39

BAB IV KEBIJAKAN MONETER ___53
A. Kebijakan Moneter Suatu Konsep Teoritik ___53
B. Penyempurnaan Inflation Targeting Framework (Flexible ITF) ___59
C. Instrumen Operasi Moneter ___61
D. Penyempurnaan Operasi Moneter___62

BAB V KRISIS EKONOMI ___65
A. Jenis Krisis Ekonomi dan Jalur Transmisi Dampaknya ___65
B. Jalur Transmisi Kunci dan Indikator Monitoring Dampak Krisis ___72
C. Analisis Empiris ___74

BAB VI PELAKU-PELAKU EKONOMI ___81
A. Latar Belakang Persoalan ___81
B. Perusahaan-Perusahaan Non-Koperasi ___81
C. Koperasi ___90
D. Tujuan Koperasi ___93
E. Kelebihan dan Kekurangan Koperasi ___194

BAB VII PEREKONOMIAN INDONESIA SEKTOR INDUSTRI ___99
A. Pengertian Industri ___99
B. Sektor dan Sub Sektor Industri ___99
C. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan pada Perekonomian Indonesia Khususnya terhadap Produk Domestik Bruto ___104
D. Peranan Sektor Industri Dalam Penyerapan Tenaga Kerja ___112
E. Sumbangan Sektor Industri terhadap Pendapatan per Kapita ___113

BAB VIII PERSOLAN LIQUIDITAS PERBANKAN ___119

BAB IX KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN ___127

BAB X PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF ___139
A. Definisi Dan Konsep ___139
B. Strtegi Pengembangan Inklusif Indonesia ___141
C. Indeks Pembangunan Inklusif ___145
D. Agenda ke Depan untuk Indonesia ___150

BAB XI PEMBANGUNAN KERAKYATAN DAN USAHA MENENGAH KECIL & MIKRO ___155
A. Ekonomi Rakyat ___155
B. Karakteristik Ekonomi Rakyat ___157
C. Ekonomi Kerakyatan dan Sistem Ekonomi Pasar ___157
D. Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat ___158

E. Lembaga Keuangan Mikro dan Program Pengentasan Kemiskinan ___159
F. Keuangan Mikro, Untuk Menggerakkan Ekonomi Rakyat ___160
G. Pengertian Usaha Menengah Kecil & Mikro (UMKM) diIndonesia ___163
H. Karakteristik Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) ___165
I. UMKM dan 4 Pilar Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ___168
J. UMKM Mampu Bertahan dalam Kondisi Krisis ___170

BAB XII KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPAT ___171
A. Permasalahan Pokok ___171
B. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan ___173
C. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan ___174
D. Analisis Empiris ___177
E. Kebijakan Anti Kemiskinan ___184

Daftar Pustaka ___191
Tentang Penulis ___209

BAB I
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA

A. Pemerintahan Orde Lama

1. Sejarah Ekonomi Indonesia Masa Orde Lama

PadaTanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Tetapi dalam praktiknya Indonesia belum bebas dari Belanda dan bisa memberi perhatian sepenuhnya pada pembangunan ekonomi. Hingga menjelang akhir 1940an, Indonesia masih menghadapi aksi Agresi Militer I dan II. Setelah akhirnya pemerintah Belanda mengakui secara resmi kemerdekaan Indonesia, selama dekade 1950an hingga pertengahan tahun 1965 Indonesia dilanda gejolak politik didalam negeri dan beberapa pemberontakan disejumlah daerah seperti di Sumatera dan Sulawesi. Akibatnya, selama pemerintah orde lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk; walaupun sempat mengalami pertumbuhan dengan laju rata-rata pertahun hampir 7% selam dekade 1950an, dan setelah itu turun drastis menjadi rata-rata pertahun hanya 1,9% atau bahkan nyaris mengalami stagflasi selama tahun 1965-1966. Tahun 1965 dan 1966 laju pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) masing-masing hanya sekitar 0,5% dan 0,6%. Pada tahun1958 dari tahun ke tahun deficit saldo neraca pembayaran (BoP) dan deficit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus membesar.

Selama periode orde lama kegiatan produksi disektor pertanian dan sektor industri manufaktur berada pada tingkat yang sangat rendah karena keterbatasan kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung, baik fisik maupun nonfisik seperti pendanaan dari bank. Rendahnya volume dari

produksi dari isi suplai dan tingginya permintaan akibat terlalu banyaknya uang yang beredar dimasyarakat, mengakibatkan tingginya tingkat inflasi yang sempat mencapai lebih dari 300% menjelang akhir periode orde lama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa buruknya perekonomian Indonesia selama pemerintahan orde lama (terutama) disebabkan oleh hancurnya infrastruktur ekonomi, fisik maupun nonfisik, selama pendudukan Jepang, perang dunia II dan perang revolusi, serta gejolak politik didalam negeri (termasuk sejumlah pemberontakan didaerah) ditambah lagi dengan manajemen ekonomi makro yang sangat buruk selama rezim tersebut (Tambunan, 2006b). Dapat dimengerti bahwa dalam kondisi politik dan sosial dalam negeri seperti ini, sangat sulit sekali bagi pemerintah untuk mengatur roda perekonomian dengan baik.

Seperti pada periode 1950-an, struktur ekonomi Indonesia masih merupakan peninggalan zaman kolonialisasi. Sektor formal/modern seperti pertambangan, distribusi, transportasi, bank, dan pertanian komersial, yang memiliki kontribusi lebih besar dari pada sektor informal/tradisional terhadap output nasional atau PDB yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing yang kebanyakan berorientasi ekspor. (Tambunan, 2006b).

Pada akhir September 1965, ketidakstabilan politik di Indonesia mencapai puncaknya dengan terjadinya kudeta yang gagal dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Sejak peristiwa berdarah tersebut, terjadi suatu perubahan politik yang drastis didalam negeri, yang selanjutnya juga merubah sistem ekonomi yang dianut Indonesia pada masa orde lama, yaitu dari pemikiran-pemikiran sosialis ke semikapitalis (kalau tidak dapat dikatakan ke sistem kapitalis sepenuhnya). Sebenarnya perekonomian Indonesia menurut Undang-undang 1945 Pasal 33 menganut suatu sistem yang dilandasi oleh prinsip-prinsip kebersamaan atau koperasi berdasarkan ideologi Pancasila. Akan tetapi, dalam praktik sehari-hari pada masa pemerintahan orde baru dan hingga saat ini pola perekonomian nasional cenderung memihak sistem kapitalis seperti di Amerika Serikat (AS) atau negara-negara industri lainnya, yang karena pelaksanaannya tidak baik mengakibatkan munculnya kesenjangan ekonomi di tanah air yang terasa saat ini semakin besar, terutama setelah krisis ekonomi (Tambunan, 2006b, 2011a).

2. Perkembangan Ekonomi Indonesia di Masa Pemerintah Orde Lama

a) Situasi politik yang diwarnai manuver dan sabotase, terutama dari kelompok-kelompok kanan (masyumi, PSI, dan tentara-AD) yang tidak menghendaki kemandirian ekonomi nasional.

b) Pertarungan kekuasaan antar elit politik di tingkat nasional -yang berakibat jatuh-bangunnya kabinet - tidak memberikan kesempatan kepada Soekarno dan kabinetnya untuk teguh menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut.

c) Yang paling pokok: borjuasi dalam negeri (pribumi) yang diharapkan menjadi kekuatan pokok dalam mendorong industrialisasi dan kegiatan perekonomian justru tidak memiliki basis borjuis yang tangguh.

Kendati berkali-kali mengalami kegagalan, Soekarno kemudian menekankan bahwa haluan ekonomi baru ini hanya akan berhasil dengan dukungan masyarakyat. Dalam usaha memasifkandukungan rakyat, Soekarno berpropaganda tentang Trisakti:

· Berdikari di bidang ekonomi

· Berdaulat di bidang politik; dan

· Berkepribadian dalam budaya

B. Pemerintah Orde Baru

1. Sejarah Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru

Tepatnya sejak bulan Maret 1966, Indonesia memasuki pemerintahan orde baru. Berbeda dengan pemerintahan orde lama, dalam era orde baru ini perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Pemerintah orde baru menjalin kembali hubungan baik dengan pihak Barat (Amerika Serikat) , dan menjauhi pengaruh ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota PBB, dan lembaga-lembaga dunia lainnya seperti Bank Dunia dan IMF (Tambunan, 2011a).

Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa orde baru, adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar, yang pada saat itu dianggap

sebagai satu-satunya cara yang paling tepat dan efektif untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi seperti kesempatan kerja dan defisit neraca pembayaran. Dengan kepercayaan yang penuh, bahwa akan ada efek *'cucuran kebawah'*, pada awalnya pemerintah memusatkan pembangunan hanya disektor-sektor tertentu yang secara potensial dapat menyumbangkan nilai tambah yang besar dalam waktu yang tidak panjang dan hanya di pulai Jawa, karena pada saat itu fasilitas-fasilitas infrastruktur dan sumber daya manusia relatif lebih baik dibandingkan di provinsi-provinsi lainnya di luar pulai Jawa. Dengan sumber dana yang terbatas pada saat itu, dirasa sangat sulit untuk memperhatikan pertumbuhan dan pemerataan pada waktu yang bersamaan (Tambunan, 2006b, 2011a).

Pada bulan April 1969, Repelita I dimulai dan dampaknya juga dari Repelita-Repelita berikutnya selama orde baru terhadap perekonomian Indonesia yang cukup mengagumkan, terutama dilihat pada tingkat makro. Proses pembangunan berjalan sangat cepat dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun yang cukup tinggi, jauh lebih baik dari pada selama orde lama, dan juga relatif lebih tinggi dari pada laju rata-rata pertumbuhan ekonomi dari kelompok Negara Berkembang (NB).

Keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia pada zaman Soeharto, tidak saja disebabkan oleh kemampuan kabinet yang dipimpin oleh presiden Soeharto jauh lebih baik/*solid* dibanding pada masa orde lama dalam menyusun rencana strategi, dan kebijakan pembanguna ekonomi, ini berkat tiga hal : penghasilan eskpor yang sangat besar dari minyak, terutama pada periode *oil boom* pertama pada tahun 1973-1974, pinjaman luar negeri, dan penanaman modal asing (PMA) yang (khusunya) sejak dekade Tahun 1980-an perannya didalam pembangunan ekonomi Indonesia meningkat tajam. Dapat dikatakan, bahwa kebijakan Soeharto yang mengutamakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, yan didasarkan pada sistem ekonomi liberal dan stabilitas politik yang probarat, telah mebuat kepercayaan pihak Barat terhadap prospek pembanguna ekonomi Indonesia jauh lebih kuat dibandingkan terhadap banyak negara Baratlainnya (Tambunan, 2011a).

Dalam usaha pemerintah menghilangkan dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi terhadap kesenjangan dan kemiskinan, atau untuk menghilangkan atau memperkecil efek *trade off* (pertukaran) antara pertumbuhan dan kesenjangan atau kemiskinan, didalam Garis Besar

Haluan Negara (GBHN) dinyatakan secara tegas, bahwa pentingnya usaha-ussaha untuk menghilangkan kemiskinan dan kesenjangan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada waktu yang bersamaan. Juga dalam Repelita VI orientasi kebijakan-kebijakannya mengalami perubahan dari penekanan hanya pada pertumbuhan ke pertumbuhan dengan pemerataan (Tambunan, 2006b, 2011a).

Sebagai suatu rangkuman, sejak Masa Orde Lama hingga berakhirnya masa Orde Baru dapat di katakan bahwa, Indonesia telah mengalami dua orientasi kebijakan ekonomi yang berbeda, yaitu dari ekonomi tertutup yang berorientasi sosial pada zaman rezim Soekarno ke ekonomi terbuka yang berorientasi kapitalis pada masa pemerintahan Soeharto. Perubahan orientasi kebijakan ekonomi ini membuat kinerja eknomi nasional pada masa pemerintahan orde baru menjadi jauh lebih baik dibandingkan pada masa pemerintahan Orde Lama.

Pengalaman ini menunjukkan, bahwa ada beberapa kondisi utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu usaha membangun ekonomi dapat berjalan dengan baik, yakni sebagai berikut:

a) *Kemauan Politik yang Kuat*

Presiden Soeharto memiliki kemauan politik yang kuat untuk membangun ekonomi Indonesia. Pada masa orde lama, mungkin karena Indonesia baru saja mmerdeka, emosi nasionalisme baik dari pemerintah maupun kalangan masyarakat masih sangat tinggi, dan yang ingin ditonjolkan pertama kepada kelompok negara-negara Barat adalah "kebesaran bangsa" dalam bentuk kekuatan militer dan pembangunan proyek-proyek mercusuar.

b) *Stabilitas Politik dan Ekonomi*

Pemerintahan orde baru berhasil dengan baik menekan tingkat inflasi dari sekitar 500% pada tahun 1966 menjadi hanya sekitar 5% hingga 10% pada awal dekade 1970-an. Pemerintahan orde baru juga berhasil menyatukan bangsa dan kelompok-kelompok masyarakat dan meyakinkan mereka, bahwa pembangunan ekonomi dan sosial adalah jalan satu-satunya agar kesejahteraan masyarakat di Indonesia dapat meningkat.

c) *Sumber Daya Manusia (SDM) yang Lebih Baik*

Dengan SDM yang semakin baik pemerintahan orde baru memiliki kemampuan untuk menyusun program dan strategi pembangunan dengan kebijakan-kebijakan yang terkait, serta mampu mengatur ekonomi makro secara baik.

d) *Sistem Politik dan Ekonomi Terbuka yang Berorientasi ke Barat*

Pemerintah orde baru menerapkan sistem politik dan ekonomi terbuka yang berorientasi ke Barat. Hal ini sangat membantu, khususnya dalam mendapatkan pinjaman luar negeri, penanaman modal asing, dan *transfer* teknologi serta ilmu pengetahuan.

e) *Kondisi Ekonomi dan Politik Dunia yang lebih baik*

Selain *oil boom,* juga kondisi ekonomi dan politik dunia pada era orde baru, khususnya setelah perang Vietnam berakhir atau lebih lagi setelah perang dingin berakhir, jauh lebih baik semasa orde lama.

2. Perkembangan EkonomiIndonesia di Masa Orde baru

· Perkembangan Grow Domestik Poduck(GDP) perkapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS.$1.000

· Sukses transmigrasi

· Sukses Keluarga Berencana (KB)

· Sukses memerangi buta huruf Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru

· Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme

· Pembangunan Indonesia yang tidak merata

· Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)

· Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan

· Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang ditahan.

Keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia pada zaman orde lama disebabkan:

· Kemampuan cabinet yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang jauh lebih baik/solid disbanding pada masa orde lama dalam menyusun rencana, strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi.

· Penghasilan ekspor yang sangat besar dari minyak, terutama pada periode *oil boom* pertama pada tahun 1973/74

· Pinjaman luar negeri

· Penanaman Modal Asing (PMA) yang khususnya sejak decade 1980-an peranannya di dalam pembangunan ekonomi Indonesia meningkat tajam.

C. Pemerintahan Transisi

1. Sejarah Ekonomi Indonesia Masa Transisi

Pada tanggal 14 dan 15 Mei 1997nilai tukar baht Thailand terhadap dollar AS, mengalami suatu goncangan hebat akibat para investor asing yang mengambil keptusan "jual". Mereka tidak percaya lagi terhadap prospek perekonomian negara tersebut, paling tidak untuk jangka pendek. Untuk mempertahankan nilai tukar bath agar tidak jatuh terus, pemerintah Thailand melakukan interfensi dan didukung oleh interfensi yang dilakukan oleh bank sentral Singapura. Akan tetapi, pada hari Rabu 2 Juli 1997, bank sentral Thailand terpaksa mengumumkan, bahwa nilai tukar baht dibebaskan dari ikatan dollar AS. Sejak itu nasipnya diserahkan sepenuhnya kepada pasar. Hari itu juga pemerintah Thailand meminta bantuan IMF. Pengumuman itu mendepresiasikan nilai bath sekitar 15-20 persen hingga mencapai nilai terendah, yaitu 28,20 bath per dollar AS.

Pada akhir bulan Oktober 1997, lembaga keuangan internasional mengumumkan paket bantuan keuangannya pada Indonesia yang mencapai 40 millyar dollar AS, 23 milyar diantaranya adalah pertahanan lapis pertama *(front-line defence)*. Sehari setelah pengumuman itu, dan seiring paket reformasi yang ditentukan oleh IMF, pemerintah Indonesia mengumumkan pencabutan izin usaha 16 bank swasta yang dinilai tidak sehat. Merupakan awal dari kehancuran perekonomian Indonesia.

Berbeda dengan Korea Selatan dan Thailand, dua negara yang sangat serius dalam melaksanakan program reformasi, pemerintah Indonesia ternyata tidak melalukan reformasi sesuai kesepakatannya itu dengan IMF. Akhirnya, pencairan pinjaman angsuran kedua negara senilai 3 millyar

dollar AS yang seharusnya dilakukan pada bulan Maret 1998 terpaksa diundur. Padahal, indonesia tidak ada jalan lain selain harus bekerjasama sepenuhnya dengan IMF, terutama karena dua hal (Tambunan, 1998).

1. Berbeda dengan kondisi krisis di Thailand, Korea Selatan, Vilipina, dan Malaysia, krisis ekonomi di Indonesia sebenarnya sudah menjelma menjadi krisis kepercayaan. Masyarakat dan dunia usaha, baik didalam maupun diluar negeri (termasuk) bank-bank di negara mitra dagang Indonesia yang tidak lagi menerima *letter off credit* (L/C) dari bank-bank nasional, dan investor-investor dunia, tidak lagi percaya akan kemampuan Indonesia untuk menanggulangi sendiri krisisnya. Bahkan, mereka juga tidak lagi percaya pada niat baik atau keseriusan pemerintah dalam menangani krisis ekonomi didalam negeri. Oleh karena itu, satu-satunya yang masih bisa menjaminatau memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Indonesia adalah melakukan "kemitraan usaha" sepenuhnya antara pemerintah Indonesia dengan IMF.

2. Indonesia sangat membutuhkan dollar AS. Pada awal tahun 1998, kebutuhan itu diperkirakan sebesar 22,4 miliar dolar AS atau rata-rata 1,9 miliar dollar AS per bulan. Sementara, posisi cadangan devisa bersih yang dimiliki BI hingga awal Juni 1998 hanya 14.621,4 juta dollar AS, naik dari 13.179,7 juta dollar AS pada akhir Maret 1998. Kebutuhan itu digunakan terutama untuk membayar pinjaman-pinjaman jangka pendek yang berasal dari luar Utang Luar Negeri (ULN), yang diperkirakan pada pertengahan tahun 1998 sebesar 20 miliar dolar AS, membayar bunga atas pinjaman jangka panjang 0,9 miliar dolar AS, dan sisanya sebanyak 1,5 miliar dolar AS untuk kegiatan ekonomi didalam negeri yang juga sangat diperlukan untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi.

Secara keseluruhan, ada lima momerandum tambahan dalam kesepakatan yang baru, yakni sebagai berikut (Tambunan, 2011a):

1. Program stabilisasi, dengan tujuan utama menstabilkan pasar uang dan mencegah *hyperinflasi*.

2. Restrukturisasi perbankan, dengan tujuan utama untuk rangka penyehatan sistem perbankan nasional.

3. Reformasi struktural, yang mana disepakati agenda baru yang mencakup upaya-upaya dan sasaran yang telah disepakati dalam kesepakatan pertama (15 Januari 1998).

4. Penyelesaian ULN swasta *(corporate debt)*.

5. Bantuan untuk rakyat kecil (kelompok ekonomi lemah).

Krisis rupiah yang menjelma menjadi suatu krisis ekonomi, akhirnya juga memunculkan suatu krisis politik yang dapat dikatakan terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka tahun 1945. Krisis politik tersebut diawaali dengan penembakan oleh tentara terhadap empat Mahasiswa Universitas Trisakti, tepatnya pada tanggal 13 Mei 1998, yang dikenal dengan sebutan Tragedi Trisakti. Kemudian pada tanggal 14 dan 15 Mei kota Jakarta dilanda suatu kerusushan yang juga dapat dikatakan paling besar dan paling sadis yang pernah dialami Indonesia. Setelah kedua peristiwa tersebut, gerakan mahasiswa yang sebelumnya sudah berlangsung semakin gencar.

Pada awalnya pemerintahan yang dipimpin oleh Habibie disebut dengan pemerintahan reformasi. Akan tetapi, setelah setahun berlalu, masyarakat mulai melihat bahwa sebenarnya pemerintahan baru ini tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, mereka juga orang-orang rezim orde baru, dan tidak ada perubahan-perubahan yang nyata. Bahkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) semakin menjadi-jadi, kerusuhan muncul dimana-mana, dan masalah Soeharto tidak terselesaikan. Akhirnya,banyak kalangan masyarakat lebih suka menyebutnya pemerintahan transisi daripada pemerintahan reformasi (Tambunan, 2011a).

2. Perkembangan Ekonomi Indonesia di Masa Transisi

Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie untuk memperbaiki perekonomian Indonesia antaranya :

a) Merekapitulasi perbankan dan menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian.

Dalam rangka mencapai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia didukung oleh 3 (tiga) pilar yang merupakan 3 (tiga) bidang utama tugas Bank Indonesia yaitu :

· Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter

· Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

· Mengatur dan mengawasi Bank

b) Melikuidasi beberapa bank bermasalah.

Banyaknya utang perusahaan swasta yang jatuh tempo dan tak mampu membayarnya dan pada akhirnya pemerintah mengambil alih bank-bank yang bermasalah dengan tujuan menjaga kestabilan ekonomi Indonesia yang pada masa itu masih rapuh.

c) Menaikan nilai tukar rupiah

Selama lima bulan pertama tahun 1998, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berfluktuasi. Selama triwulan pertama, nilai tukar rupiah rata-rata mencapai sekitar Rp9200,- dan selanjutnya menurun menjadi sekitar Rp8000 dalam bulan April hingga pertengahan Mei. Nilai tukar rupiah cenderung di atas Rp10.000,- sejak minggu ketiga bulan Mei. Kecenderungan meningkatnya nilai tukar rupiah sejak bulan Mei 1998 terkait dengan kondisi sosial politik yang bergejolak. nilai tukar rupiah menguat hingga Rp. 6500 per dollar AS di akhir masa pemerintahnnya.

d) Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF.

Pada tanggal 15 januari 1998 (masih orde baru) Indonesia telah menandatangani 50 butir kesepakatan (letter of intent atau Lol) dengan IMF. Salah satunya adalah memberikan bantuan (pinjaman) kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan International Monetary Fund(IMF) dalam mengatasi masalah krisis.

Beberapa keberhasilan ekonomi di era Habibie sebenarnya tidak lepas dari usaha kerja keras para kabinetnya yang reformis. Namun, perlu disadari bahwa Habibie bukanlah presiden yang benar-benar reformis dalam menolak kebijakan ekonomi ala IMF. Dengan keterbatasannya, beliau terpaksa menjalani 50 butir kesepakatan (LoI) antara pemerintah Indonesia dengan IMF, sehingga penangganan krisis ekonomi di Indonesia pada hakikatnya lebih pada penyembuhan dengan “obat generik”, bukan penyembuhan ekonomi “terapis” ataupun “obat tradisional”. Sehingga ketika meninggalkan tampuk kekuasaan, Indonesia masih rapuh. Disisi lain, Habibie masih sangat mempercayai tokoh-tokoh Orde baru duduk di kabinetnya, padahal masyarakat menuntut reformasi. Dan tampaknya, Habibie memang menempatkan dirinya sebagai Presiden Transisi, bukan Presiden yang Reformis.

D. Sekelumit Pemerintahan Reformasi hingga Kabinet Joko Widodo

1. Sejarah Ekonomi Indonesia Masa Reformasi hingga Kabinet Joko Widodo

Pada pertengahan tahun 1999 dilakukan pemilihan umum, yang akhirnya dimenangi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Partai Golkar mendapat posisi kedua, yang sebenarnya cukup mengejutkan banyak kalangan dimasyarakat. Pada Oktober 1999 dilakukan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan pemilihan presiden diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 1999. KH Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan sebutan Gus Dur terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia keempat dan Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden. Tanggal 20 Oktober menjadi akhir dari pemerintahan transisi dan awal dari pemerintahan Gus Dur yang sering disebut juga pemerintahan reformasi.

Selama pemerintahan Gus Dur, praktis tidak ada satupun masalah didalam negeri yang dapat terselesaikan dengan baik. Berbagai kerusuhan sosial yang bernuansa disintegrasi dan sara terus berlanjut, misalnya pemberontakan Aceh, konflik Maluku, dan pertikaian etnis di Kalimantan Tengah. Belum lagi demonstrasi buruh makin gencar yang mencerminkan semakin tidak puasnya mereka terhadap kondisi perekonomian didalam negeri, juga pertikaian elit politik semakin besar.

Pada awal itu, banyak orang menduga bahwa apabila kondisi seperti ini terus berlangsung, tidak mustahil tahun 2002 ekonomi Indonesia akan mengalami pertumbuhan jauh lebih kecil dari tahun sebelumnya, bahkan bisa kembali negatif. Gus Dur dan kabinetnya tidak menunjukkan keinginan politik yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan krisis ekonomi hingga tuntas dengan prinsip *"once and for all"*. Pemerintah Gus Dur cenderung menyederhanakan krisis ekonomi dewasa ini dengan menganggap persoalannya hanya terbatas pada agenda masalah amandemen UU BI, masalah desentralisasi fiskal, masalah restrukturisasi utang, dan masalah divestasi Bank Central Asia (BCA) dan Bank Niaga. Munculnya berbagai kebijakan pemerintah yang kontroversial dan inkonsisten, termasuk pengenaan bea masuk impor mobil mewah untuk kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi 15 negara (KTT G-15) yang hanya 5 persen (nominalnya 75 persen) dan pembebasan pajak atas pinjaman luar negeri dan hibah,

menunjukkan tidak adanya *"sense of crisis"* terhadap kondisi riil perekonomian negara saat ini.

Setelah Presiden Wahid turu, Megawati menjadi Presiden Indonesia yang ke lima. Pemerintahan Megawati mewarisi kondisi perekonomian Indonesia yang jauh lebih buruk daripada pada masa pemerintahan Gus Dur. Meskipun IHSG dan nilai tukar rupiah meningkat cukup signifikan sejak diangkatnya Megawati menjadi presiden melalui Sidang Iistimewa (SI) MPR, posisinya tetap belum kembali pada tingkat pada saat Gus Dur terpilih menjadi presiden. Inflasi yang dihadapi *"Kabinet Gotong Royong"* pimpinan Megawati juga sangat berat. Namun demikian, dalam era Megawati kinerja ekonomi Indonesia menunjukkan perbaikkan, paling tidak dilihat dari laju pertumbuhan PDB.

Pada bulan-bulan pertama pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), rakyat Indonesia, pelaku usaha luar dan dalam negeri maupun negara-negara donor serta lembaga-lembaga dunia, seperti IMF, Bank Dunia dan ADB sempat optimis bahwa kinerja ekonomi Indonesia 5 tahun kedepan akan jauh lebih baik dibandingkan pada masa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya sejak Soeharto lengser, bahkan kabinet SBY dan lembaga-lembaga dunia tersebut menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2005 akan berkisar sedikit diatas 6%. Namun pada pertengahan kedua tahun 2005 ekonomi Indonesia diguncang oleh dua peristiwa yang tak terduga sama sekali, yakni naiknya harga BBM dipasar internasional dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Dua hal ini membuat realisasi pertumbuhan PDB tahun 2005 lebih rendah dari target yang telah ditentukan sebelumnya dan hal ini menjadi tantangan berat bagi presiden SBY karena jika tidak ditangani segera dengan secara baik, pengaruh negatifnya akan sangat besar terhadap perekonomian nasional dan akhirnya terhadap kehidupan masyarakat, khususnya kelompok miskin.

Kenaikan harga BBM ini mengakibatkan pemerintah terpaksa mengeluarkan suatu kebijakan yaitu mengurangi subsidi BBM. Kenaikan harga BBM yang besar untuk industri terjadi sejak 1 Juli 2005. Kejadian ini jelas akana membuat deficit APBN tambah besar karena, ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM semakin besar. Harga BBm yang tinggi juga akan mendorong inflasi di dalam negeri. Semua ini akan berpengaruh negative terhadap kesempatan kerja atau akan meningkatkan pengangguran dan kemiskinan.

Pada bulan Juli sampai akhir tahun 2005 nilai tukar rupiah terus melemah, ini terkait dengan memburuknya kinerja BoP Indonesia. Selain itu melemahnya rupiah akan membuat ekspor Indonesia meningkat sedangkan impornya berkurang. Kombinasi antara naiknya BBm dan melemahnya nilai rupiah akan berdampak pada peningkatan laju inflasi. Menjelang akhir masa jabatan SBY pertama yang berakhir pada tahun 2009, Indonesia mengalami kenaikan harga minyak mentah harga pangan di pasar global. Selain itu, pada pada periode 2008-2009 terjadi krisi ekonomi global yang berawal dari krisis keuangan di AS dan merembet ke sejumlah Negara maju lainnya, yang pada akhirnya mengakibatkan suatu resesi ekonomi dunia.

Pada periode kedua pemerintahan SBY (2009-2014), Indonesia meng hadapi krisis ekonomi di sejumlah Negara anggota Masyarakat Eropa, yang di kenal dengan sebutan Krisis Zona Europ. Goncangan terkhir yang cukup serius yang dihadapi pemberintahan SBY pada tahun 2013 adalah depresiasi rupiah yang mulai terjadi sejak bulan Agustus dan terus berlangsung secara bertahap hingga awal tahun 2014. Yang paling di kuatirkan masyarakat umum setiap rupiah melmah adalah kenaikann harga-harga kebutuhan pokok di pasar dalam negeri atau inflasi, karena hampir semua kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder maupun tersier sangat tergantung pada impor.

Pada minggu keempat bulan Agustus 2013 ada lima kebijkan, yakni *pertama,* memperluas jangka waktu untuk penempatan deposio berjangka. *Kedua,* merelaksasi ketentuan pembeli valas bagi eksportir yang telah melakukan penjualan valas hasil ekspor. *Ketiga,* menyesuaikan kebutuhan transaksi 'swap'valas Bank dengan BI di perlukan sebagai *'pas-on'*transaksi bank dengan pihak terkait. *Keempat,* merelaksasi ketentuan ULN dengan menambah jenis pengecualian ULN jangka pendek bank berupa giro rupiah milik bukan penduduk yang menampung dana hasil disvestasi yang berasal dari hasil penyertaan langsung. *Kelima,* menerbitkan hasil Sertifikasi Deposito Bank Indonesia.

Menjelang tahun 2013, pemerintah menerbitkan paket kebijakan fiskal jilid dua untuk menekankan defisit perdagangan. Dari sudut pandang masyarakat, SBY meninggalkan banyak catatan positif, diantaranya adalah (1) ketergantungan Indonesia pada impor atas hamper semua barang-barang jadi maupun setengah jadi dan bahan baku (terutama yang sudah di proses siap pakai untuk kegiatan industri), termasuk komoditas-komoditas

pertanian dan minyak mentah dan gas (migas), semakin tinggi yang membuat neraca perdagangan deficit dan cenderung semakin membesa, (2) walaupun tingkat kemiskinan menurun, kesenjangan antara kaum berada dan kaum miskin cenderung membesar, (3) kehidupan sehari-hari masyarakat semakinmahal, terutama akibat pemotongan subsidi-subsidi khususnya pada BBM, (4) jumlah ULN cenderung meningkat, (5) infrastruktur cenderung semakin buruk, (6) korupsi cenderung semakin merajalela, dan masih banyak lagi.

Tahun 2014 terjadi lagi perubahan pemerintah untuk kesekian kalinya sejak berakhirnya berakhirnya era orde baru (1998), dan kali ini dari SBY ke Joko Widodo (dikenal dengan panggilan Jokowi),tepat pada tanggal 20 Oktober 2014. Presiden Jokowi mewarisi perekonomian Indonesaidari SBY dalam kondisi yang tidak terlalu baik, diantaranya anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) untuk 2015 yang deficit dengan ruang fiskal yang sempit. APBN yang deficit dengan ruang fiskal yang sempit berarti stimulus perekonomian nasional dalam era Jokowi, khususnya pada tahun-tahun pertama pemerintahnya akan lemah, yang selanjutnya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepan akan juga lemah. Memang presiden Jokowi memiliki program penguatan kapasitas fiskal, namun program prioritas tersebut belum di sertai target-target yang jelas, paling tidak hingga bulan pertama pemerintahnya belum di umumkan ke publik.

2. Perkembangan Ekonomi Indonesia Pada Masa Reformsi

2.a Kebijakan yang dilakukan pada zaman Gus Dur:

· Meneruskan kehidupan yang demokratis seperti pemerintahan sebelumnya (memberikan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat minoritas, kebebasan beragama, memperbolehkan kembali penyelenggaraan budaya tiong hua).

· Merestrukturisasi lembaga pemerintahan seperti menghapus departemen yang dianggapnya tidak efesien (menghilangkan departemen penerangan dan sosial untuk mengurangi pengeluaran anggaran, membentuk Dewan Keamanan Ekonomi Nasional).

· Ingin memanfaatkan jabatannya sebagai Panglima Tertinggi dalam militer dengan mencopot Kapolri yang tidak sejalan dengan keinginan Gus Dur.

2.b Kebijakan yang dilakukan pada zaman Megawati

Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasai persoalan-persoalan ekonomi antara lain:

· Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

· Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. Megawati bermaksud mengambil jalan tengah dengan menjual beberapa asset Negara untuk membayar hutang luar negeri. Akan tetapi, hutang Negara tetap saja menggelembung karena pemasukan Negara dari berbagai asset telah hilang dan pendapatan Negara menjadi sangat berkurang.

2.c Kebijakan yang dilakukan pada zaman SBY

Masa kepemimpinan SBY terdapat kebijakan yang sikapnya kontroversial yaitu:

· Mengurangisubsidi BBM atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

· Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.

· Mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya *Indonesian Infrastructure Summit* pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepaladaerah. Investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan

bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.

· Lembaga kenegaraan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dijalankan pada pemerintahan SBY mampu memberantas para koruptor tetapi masih tertinggal jauh dari jangkauan sebelumnya karena SBY menerapkan sistem Soft Law bukan Hard Law. Artinya SBY tidak menindak tegas orang-orang yang melakukan KKN sehingga banyak terjadi *money politic* dan koruptor-koruptor tidak akan jera dan banyak yang mengulanginya. Dilihat dari semua itu Negara dapat dirugikan secara besar-besaran dan sampai saat ini perekonomian Negara tidak stabil.

· Program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas dikarenakan persediaan bahan bakar minyak semakin menipis dan harga di pasaran tinggi.

· Kebijakan impor beras, tetapi kebijakan ini membuat para petani menjerit karena harga gabah menjadi anjlok atau turun drastis.

2.d Perkembangan Perekonomian Indonesia di Pemerintahan Jokowi-JK

Pemerintahan Jokowi-JK melakukan transformasi fudamental pada sistem ekonomi di Indonesia dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yaitu:

· Mengubah ekonomi yang berbasis konsumsi dengan ekonomi yang berbasis produksi.

· Tepat sasaran untuk mengatasi kemiskinan.

· Mendorong pembangunan yang merata di luar pulau jawa.

Pengurangan terhadap subsidi bbm yang sebesar 200 triliun rupiah, yang penggunaannya dialihkan untuk belanja pusat dan pembangunan daerah tertinggal.

Pemerintah meletakan fondasi pembangunan nasional dengan meningkatkan daya saing, produktifitas, dan kemakmuran rakyat.

Pemerintahan Jokowi-JK juga menyelesaikan beberapa proyek yang sempat berhenti (mangkrak) seperti:

· Waduk Jati Gede

· Waduk Nipah Sampang

· Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang

· Jalan Tol Solo

· LRT (*Light Rail Transit*)

Peningkatan Layanan Publik di bidang Investasi dengan cara mempersingkat waktu perizinan bagi para investor.

Dalam menghadapi masalah ekonomi yang dihadapi pemerintah mengeluarkan 3 paket kebijakan yang berfungsi ampuh untuk menekan kurs rupiah terhadap dollar. Tiga isi paket kebijakan itu yaitu:

· Kebijakan 1: Menggerakan ekonomi, mengembakan ekonomi makro yang kondusif, melindungi masayarakat yang berpendapatan rendah dan menggerakan ekonomi perdesaan.

· Kebijakan 2: keringanan pajak, kemudahan perizinan investasi, penurunan pajak bunga deposito.

· Kebijakan 3: penurunan harga bbm, peringanan tarif listrik industri, perluasan kredit usaha rakyat.

Pembangunan yang terus berlanjut di luar pulau jawa untuk mendorong kegiatan ekonomi antar pulau, contoh pembangunan meliputi:

· Tol Trans Sumatera

· Tol Trans Papua

· Pembangunan Tol Laut, dll.

Di sektor kelautan pemerintah juga melakukan perombakan dengan secara besar-besaran, karena pemerintahan Jokowi-JK mengandalkan sektor kemaritiman sebagai basis pertumbuhan ekonomi. Hal ini di buktikan dengan tindakan tegas dari pemerintah Indonesia bagi para pelaku ilegal fishing. Setelah adanya tindakan tegas bagi para pelaku ilegal fishing di Indonesia terbukti dengan meningkatnya produksi perikanan di Indonesia.

Pembangunan Infrastruktur penghubung juga dilakukan oleh pemerintah seperti: bandar udara, jalan darat perintis, dan pelabuhan.

Pemerintah juga menargetkan Swasembada pangan untuk negeri. Selain itu, pemerintah juga mulai melaksanakan dana untuk pembangunan desa. Hal ini ditujukan untuk pengembangan perekonomian di pedesaan.

BAB II
SISTEM EKONOMI INDONSIA

A. Pengertian Sistem Ekonomi

Menurut Dumairy (1996), sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.

Sheridan (1998) dalam publikasinya mengenai sistem-sistem ekonomi adalah cara manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan kepeuasan pribadinya. Sedangkan sanusi (2000) menguraikan bahwa sistem ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri atas sejumlah lembaga ayau pranata (ekonomi, sosial-politik, ide-ide) yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainya dan ditujukan kearah pemecahan problem-problem serta produksi-distribusi konsumsi yang merupakan problem dasar setiap perekonomian. Sanusi juga mengutip pengertian sistem ekonomi dari Lemhannas, bahawa sistem ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi. Adapun sistem diartikan sebagai totalitas terpadu yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan, saling terkait, saling memengaruhi dan saling tergantung menuju tujuan tertentu.

B. Macam-macam Sistem Ekonomi

1. Sistem Ekonomi Kapitalis

Dalam Sanusi, sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi dimana kekayaan yang produktif terutama dimiliki secara pribadi dan produksi terutama dilakukan untuk dijual. Adapun tujuan kepemilikan

adalah untuk meperoleh suatu keuntungan/laba yang cukup besar atau dan hasil menggunakan kekayaan yang produktif.

Ciri-ciri sistem ekonomi kaspitalis adalah :

a) Hak milik pribadi

Dalam sistem ekonomi kapitalis alat-alat produksi atau sumber daya ekonomi seperti sumber daya alam (SDA), modal dan tenaga kerja dimiliki oleh individu dan lembaga-lembaga swasta.

b) Kebebasan berusaha dan kebebasan memilih

Dalam sistem ekonomi kapitalis, maksud kebebasan berusaha adalah kegiatan produksi dapat dengan bebas dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai inisiatif. Sedangkan kebebasan dalam memilih ekonomi kapitalis adalah menyangkut kedaulatan konsumen dan kebebasan pengusaha dalam memperoleh sumber daya ekonomi untuk memproduksi suatu produk yang dipilihnya sendiri, agar dapat dijual dengan tujuan mencari keuntungan yang maksimum. Kebebasan memilih juga mencangkup kebebasan pekerja untuk memilih setiap jenis pekerjaan yang dikehendakinya. Kebebasan memilih juga termasuk dalam kebebasan membuat berbagai perjanjian.

c) Motif kepentingan diri sendiri

Kekuatan utama dari sisitem kapitalis adalah motivasi individu untuk memenuhi kepentingan/keuntungan diri sendiri.

d) Persaingan

Sistem persaingan bebas merupakan salah satu lembaga penting dari sistem kapitalis. Setiap individu atau pelaku ekonomi swasta, baik pembeli maupun pengusaha, dengan motivasi mencari keuntungan yang maksimum bebas bersaing dipasar dengan keuatan masing-masing. Setiap pelaku ekonomi swasta bebas memasuki dan meninggalkan pasar.

e) Harga ditentukan oleh mekanisme pasar

Segala keputusan yang diambil oleh pengusaha (penjual) dan konsumen (pembeli) dilakukan melalui sistem pasar. Dengan katalain, tingkat harga dan jumlah produksi yang terjual ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan permintaan dan penawaran.

f) Peranan terbatas pemerintah

Dalam sistem ekonomi kapitalis, pemerintah masih mempunyai peran yang dapat membatasi berbagai kebasan individu. Misalnya, mengeluarkan peraturan-peraturan yang melarang praktik-praktik monopoli yang sifatnya non-alamiah dan melindungi hak-hak konsumen dan pekerja.

Kelebihan:

a. Setiap individu bebas memiliki alat produksi sendiri
b. Kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan
c. Produksi didasarkan kebutuhan masyarakat
d. Kualitas barang lebih terjamin

Kekurangan:

a. Sulit terjadi pemerataan pendapatan
b. Rentan terhadap krisis ekonomi
c. Menimbulkan monopoli
d. Adanya eksploitasi

2. Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialis adalah sistem yang ditandai dengan kepemilikan sosial dari alat-alat produksi dan manajerial koperasi ekonomi, serta politik dan gerakan yang mengarah pada pembentukan sistem tersebut.

Menurut mubyarto (2000) terdapat kriteria sistem ekonomi sosialisme demokrat atau sistem ekonomi pasar sosial (SEPS) yaitu :

a) Ada kebebasan individu dan sekaligus kebijaksanaan perlindungan usaha, persaingan diantara perusahaan-perusahaan kecil maupun menengah harus dikembangkan,

b) Prinsip-prinsip kemerataan sosial menjadi tekad warga masyarakat,

c) Kebijakan siklus bisnis dan kaitanya dengan pertumbuhan ekonomi,

d) Kebijaksanaan pertumbuhan menciptakan kerangka hukum dan prasarana (sosial) yang terkait dengan pembangunan ekonomi,

e) Kebijaksanaan structural, dan

f) Konformitas pasar dan persaingan

Kelebihan:

a. Pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga

b. Kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata

c. Pelaksanaan pembangunan lebih cepat

d. Pemerintah bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat.

Kekurangan:

a. Individu tidak mempunyai kebebasan daam berusaha

b. Tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya

c. Potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang

3. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran adalah sistem mengandung beberapa elemen dan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis.

Ciri-ciri ekonomi campuran:

a) Pemerintah berperan aktif dalam kegiatan ekonomi

b) Pemerintah membuat rencana kegiatan perekonomian

c) Sember daya vital yang mengangkut hajat orang banyak/rakyat dikuasai oleh pemerintah

d) Hak swasta diakui

e) Timbulnya persaingan ekonomi antara individu/ kelompok dengan pengawasan oleh pemerintah

f) Pemerintah turutcampur tangan dalam kegiatan ekonomi dipasar

g) Pmerintah dan swasta memiliki peran yang sama dalam pelaksanaan ekonomi.

Kelebihan:

a. Kestabilan ekonomi terjamin

b. Pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha memajukan sektor usaha menengah dan kecil

c. Adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu

Kekurangan:

a. Sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta

b. Sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasi oleh pemerintah dan swasta

C. Sistem Ekonomi Indonesia

Sistem negara menganut sistem ekonomi yang berbeda-beda terutama Indonesia dan Amerika serikat, dua negara ini pun menganut sistem ekonomi yang berebda. Awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, yang mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh partai komunis Indonesia, maka sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis.

Pada masa orde baru, sistem yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Namun sistem ekonomi ini hanya bertahan hingga masa reformasi. Setelah masa reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku diindonesia.

Berikut sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia dari masa orde baru hingga sekarang:

1. Sistem Ekonomi Demokrasi

Sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat dibawah kepemimpinan dan pengawasan pemerintahan. Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Ciri-ciri positif sistem ekonomi demokrasi :

a. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara

b. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat

c. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan

d. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak

e. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat

f. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum

g. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Ciri-ciri negatif pada sistem ekonomi Demokrasi :

a. Sistem free fight liberalisme, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia bangsa lain sehingga dapat menimbulkan kelemahan structural ekonomi nasional

b. Sistem etatisme, dimana negara beserta aparatul ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor negara

c. Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat

2. Sistem Ekonomi Kerakyatan

Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengelurkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang garis-garis besar haluan negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi ini berlaku sejak tahun 1998, pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakatlah yang memegang aktif dalam kegiatan

ekonomi, sedangkan pemerintah yang menciptakan iklim yang bagus bagi pertumbuhan dan perkembngan dunia usaha.

Ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan :

a. Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat.

b. Memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup.

c. Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

d. Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.

e. Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.

3. Sistem Ekonomi Indonesia dalam UUD 1945

Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 setelah amandemen :

a) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

b) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

c) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

d) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

e) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Jadi ketiga ayat pasal 33 (1,2 dan 3) tersebut merupakan warisan dari pendiri-pendiri Republik Indonesia yang tetap bertahan, tidak berubah, sehingga dengan demikian dapat diartikan bahwa : ideologi ekonomi atau paham demokrasi yang dianut oleh para pendiri bangsa

kita terus dijadikan pegangan ddengan tambahan-tambahan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana yang dicita-citakan dalam alinea ke-a4 pembukaan UUD 1945 (Assidiqdqie, 2010).

Dari ayat-ayat pada pasal 33 tersebut, ada sejumlah hal penting yang perlu penjelasan lebih lanjut.

Pertama, mengenai pernyataan, "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan"

Kedua, kata ''azas kekeluargaan" pernyataan ini menunjukkan kepada pengertian semngat persamaan, jiwa gotpng-royong, dan kerja sama.

Kertiga, dalam ayat 2 paasl 33 ada kalimat ''dikuasai oleh negara" pengertian dari kalimat itu adalah penguasaan dalam arti luas, yaitu mencangkup pengertian kepemilikan dalam arti publik dan sekaligus pendata, termasuk pula kekuasaan dalam mengendalikan dan mengelola bidang-bidang usaha itu secara langsung oleh pemerintah.

Keempat, ayat 4 dari pasal 33 terdapat beberapa konsep yang perlu ipahami secara sendiri-sendiri maupun bersama.

4. Dari berbagai sistem ekonomi yang ada di dunia ini mempunyai fungsi dalam perekonomian, diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Menyediakan perangsang untuk berproduksi

b) Menyediakan cara/metode untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian

c) Menyediakan mekanisme tertentu agar pembagian hasil produksi diantaranya anggota masyarakat dapat terlaksana sebgaimana mestinya.

Sistem ekonomi Indonesia dalam beberapa dekade belakangan ini sejak Orde baru cenderung semakin kapitalis dan sangat berbeda dengan Orde lama atau era Soekarno. Soekrno sebagai bapak proklamator Kemerdekaan Indonesia, sangat memebnci dasar-dasar pemikiran barat, termasuk sistem ekonomi liberal/kapitalismenya. Soekarno menganggap sistem kapitalisme-liberalisme selama penjajahan Belanda telah benar-benarmenyengsarakan rakyat Indonesia, sehingg aliran ini dibenci dan diusir dari Indonesia. Menurut Soekarno, untuk mengusir dan mengimbangi kekuatan ekonomi barat berlandaskan kapitalisme-liberalisme, Indonesia harus menerapkan pemikiran dari Marchaenisme,

yaitu Marxisme. Tetapi pada tahun 1959, paham kapitalisme-liberalisme secara konstitusional ditolak dengan diberlakukanya lagi UUD 1945 sebagai landasan dari sistem ekonomi nasional. Namun demikian, dalam praktiknya, soekarno menerapkan sistem komando seperti diterapkan khususnya di negara-negara beraliran komunis, seperti Uni Soviet (sekarang Rusia), negara-negara Eropa Timur (sekarang disebut negara-negara transisi), dan Cina. Dengan sistem ini, semua rencana dan keputusan yang menyangkut pembangunan ekonomi, termasuk pemilihan industri yang akan dibangun, ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat (Tambunan, 2006b).

Tindakan Soekarno yang paling terkenal yang mebuat kinerja perekonomian Indonesia menjadi buruk pada era Orde Lama adalah merencanakan 'Ekonomi Terpimpin' pada tahun 1957 yang lebih memperkuat lagi sitem ekonomi komando, dana selama tahun 1957-1958 terjadi nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Dengan perancangan ekonomi terpimpin, sistem politik dan ekonomi Indonesia semakin dekat dengan haluan/pemikiran sosialis-komunis. Walaupun ideologi Indonesia adalah Pancasila, pengaruh ideologi komunis dari negara bekas Uni Soviet dan Cina sangat kuat. Sebenarnya, pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, memilih haluan politik yang berbau komunis hanya merupakan suatu refleksi dari perasaan antikolonialisasi, antiimperealisai, dan antikapitalissai pada saat itu.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Soekarno dipercaya bahwa pemikiran Marxisme merupakan satu-satunya senjata yang ampuh untuk melawan kapitalisme. Pada masa itu, prinsip-prinsip individualism persaingan bebas dan perusahaan swasta/pribadi sangat ditentang oleh pemerintah dan masyarakat pada umumnya menganggap prinsip-prinsip tersebut sering dikaitkan dengan pemikiran kapitalisme. Keadaan ini membuat Indonesia semakin sulit mendapat dana dari negara-negara barat baik dalam bentuk pinjaman penanaman modal asing (PMA), Sedangkan untuk membiayai rekonstruksi ekonomi dan pembangunan selanjutnya Indonesia sangat mebutuhkan dana yang sangat besar (Hill dan Williams, 1989). Hingga akhir tahun 1950-an tepatnya sebelum menasionalisasikan perusahaan-perusahaan Belanda, sumber utama penanaman dana modal asing Indonesia berasal dari Belanda yang sebagian besar untuk kegiatan ekspor hasil-hasil perkebunan dan pertambangan serta untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang terkait.

Selanjutnya, pada tahun 1963, Sekarno menyampaikan konsep ekonomi yang dikenaldengan sebutan Deklarasi Ekonomi, yang berisi semacam tekad untuk menggunakan sistem ekonomi pasar sebagai 'koreksi' terhadap praktik-praktik ekonomi komando. Syangnya tekat ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak mendapat dukungan dari partai-partai politik yang ada pada saat itu, termasuk Partai Komunis Indonesia. Prinsip-prinsip ekonomi akhirnya dilupakan oleh orang, dan hingga akhirnya Orde Lama sistem ekonomi Indonesia yang berlaku teta sisitem komando (Mubyarto, 2000).

Pada Orde Baru yang Lahir Tahun 1966, sistem ekonomi berubah total. Berbeda dengan pemerintah Orde Lama dalam era Soeharto ini pradigma pembangunan ekonomi mengarah pada penerapan sistem ekonomi pasar bebas (demokrasi ekonomi), dan politik ekonomi diarahkan pada upaya-upaya dan cara-cara menggerakkan kembali roda ekonomi. Pemerintah Orde Baru menjalin kembali hubungan baik dengan pihak Barat, dan menjauhi pengaruh ideology komunis. Indonesia jga kembali menjadi anggota perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan lembaga-lembaga dunia lainya seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), yang putus pada zaman Soekarno.

Pada awal era Soeharto ini, pemerintah mengambil beberapa langkah dtrastis yang bersifat strategis yang menandakan sedang berlangsungnya suatu perubahan yang cepat dalam sistem ekonomi Indonesia dari sistem ekonomi komando ke sistem ekonomi pasar, diantaranya adalah dikeluarkanya sejumpah paket kebijakan liberalismedalam perdagangaan dan investasi. Paket-paket kebijakan angka pendek tersebut adalah tindak lanjut dari diterbikannya Tap MPRS No. XXIII Tahun 1966 tentang Pembahruan Landasan Kebijakan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, yang bertujuan untuk mentimulasi swasta untuk masuk sektor-sektor strategis (Chaniago, 2001). Salah satu kebijakan Indonesia selama pemerintahan Orde Baru dalah UU Penanaman Modal Asing yang dikeluarkan pada tahun 1967 dan Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun1968. Untuk mendukung pelaksanaan kedua UU tersebut, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan deregulasi dn kebijakan debirokratisasi untk urusan-urusan yang berkaitn dengan perekonomian pada umumnya dan investasi pada kususnya (Salim, 2000).

Menjelang akhir tahun 1960-an, atas kerja sama dengan Bank Dunia, IMF dan ADB (Bank Pembangunan Asia) dibentuk suatu kelompok konsorsium yang disebut *Inter Government Group on Indonesia* (IGGI), yang terdiri atas sejumlah negara maju termasuk Jepang Belanda dengan tujuan membiayai pembangunan ekonomi di Indonesia. Boleh dikatakan, bahwa pada saat itu Indonesia sangat berntung. Dalam waktu yang relatif pendek setelah melakukan perubahan sistem politiknya secara drastic, dari yang pro menjadi anti komunis, Indonesia bisa mendapat banuan dana dari pihak Barat. Pada saat itu, Indonesia memang merupakan satu-satunya negara sangat antikomunis yang dianggap pleh Barat (khususnya AS) telah berhasil mengalahkan komunis, dan sedang berusaha secara serius melakukan pembangunan ekonominya.

Pembangunan ekenomi diatur atau dilaksanakan secara bertahap melalui serangkaian Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama) yang dimulai dengan Repelit I (1969-1974), dengan penekanan utama pada pada pembangunan sektor pertanian dan industri-industri yang terkait seperti agroindustri. Strategi pembangunan dan kebijakan ekonomi pada Repelta I, terpusatkan pada pembangunan industri-industri yang mendukung pembngunan regional, dan juga industri-industri dasar seperti pupuk, semen, kimia dasar, bubuk kertas, kertas dan tekstil. Namun sebelum Repelita dimulai, terlebih dahulu pemerintah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosil, politik, sera rehabilitas ekonomi nasional. Sasaran utama dari langkah-langkah tersebut aalah untuk menekan tingkat inflasi yang sempat mencapai diatas 500% menjelang akhir era Soekarno, mengurangi deficit anggaran pemerintah yang juga sangat besar pada zaman Orde Lama, dan menghidupkan kembali kegiatan produksi untuk barng-barang pokok kebutuhan masyarakat yang juga mengalami stagnitas pada periode Orde Lama. (Tambunan, 2006b).

Sejak dekade 80-an, perekonomian Indonesia mengalami suatu pergeseran kea rah yang lebih liberal dari terdesentralisai bebarengan dengan berubahnya peran pemerintah pusat dari yang sebelumnya sebagai agen pembangunan ekonomi, disamping itu agen pembangunan sosial dan politik keperan lebih sebagai fasilisator bagi pihak swasta meningkat pesat. Pergesesarn ekonomi Indonesia ini didorong oleh sejumlah paket deregasi yang diawali dengan deregulasi sistem perbankan pada tahun 1983 dan deregulasi perdagangan pada tahun 1984. Paket-paket deregulasi tersebut

sesuai dengan tuntutan dari negara-negara donor, Bank Dunia, IMF yang dikenal dengan sebutn 'konsesus Wasington'.

Ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru semakin tergantung pada modal asing, khususnya PMA, dan pinjaman/utang luar negeri (ULN) sehingga pemerintah Indonesia tidak ada pilihan lain selain melakukan deregulasi-deregulasi tersebut. *Wasington concensus*terdiri dari 12 butir (Mas'oed, 2001):

a) Penghapusan control pemerintah atas harga komoditif, faktor produksi, dan mata uang

b) Disiplin fiskal unyuk mengurangi defisit anggaran belnja pemerintah atau bank sentral ketingkat yang bisa dibiayai tanpa mengakibatkan inflasi

c) Pengurangan belanja pemerintah, dan pengalihan belanjadari bidang-bidang yang tidak terlalu penting

d) Reformasi sistem perpajakan dengan penekanan pada perluasan basis perpajakan, perbaikan administrasi perpajakan

e) Liberalism keuangan yang tujuan jangka pendeknya untuk menghapus pemberian tingkat bnga bank khusus bagi pinjam istimewa

f) Menetapkan tingkat nilai tukar mata uang yang tunggal dan kompetitif

g) Liberalism perdagangan dengan mengganti pembatasan luar negeri

h) Peningkatan tabungan dalam negeri

i) Peningkatan PMA

j) Privatisai perusahaan negara

k) Penghapusan peraturan yang menghalangi masuknya perusahaan baru kedalam satu bidang bisnis dan membatasi persaingan

l) Hak-hak kekayaan pribadi, sistem hukum yang berlaku harus bisa menjamin perlindungan hak milik atas tanah, capital dan bangunan (Tambunan, 2006b).

Namun, tidak semua pihak setuju dengan berkurangnya peran pemerintah atau negara didalam ekonomi. Bahkan pada dekade 80-an hingga 90-an, sangat uncul perdebatan politik antara pihak yang tetap menginginkan pemerintah sebagai pemain utama sesuai bunyi pasal 33 tersebut.

Mackie dan Macintyre (1994) melihat ada tiga mazhab politik ekonomi di Indonesia pada masa itu yaitu :

a) Kaum teknorat (ekonom) yang paham pasar bebas

b) Kaum intervensionis yang menginginkan peran besar dari negara dalam pembangunan

c) Kaum naionalis pola lama yang ingin berpegang teguh pada ideology bangsa negara sebagai mana tercantum dalam pasal 33 UUD 1945.

Hasil dari usaha-usaha pemerintah Orde Baru ialah untuk menghidupkan kembali roda perekonomian nasional, dengan sistem ekonomi pasar dan ddukung oleh kebiakan-kebijakan ekonomi disegala sektor, dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan didalam replelita yang cukup mengagumkan, terutama dilihat pada tingkat makro. Proses pembangunan berjalan sangat cepat dengan laju pertumbuhan rata-rata tinggi pertahunya, dan juga relative lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan ekonomi dari kelompok NSB,. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah mampu meningkatkan posisi Indonesia dari salah satu negara termiskin didunia menjadi negara berpendapatan menengah. Pada tahun 1969, pada aat dimulainya Repelita I, pendapatan perkapita Indonesia hanya sekitar 70-an dolar AS, dan pada pertengahan decade 90-an sudah mencapai hamper 900 dolar AS dan saat insudah diatas 1000 dolar AS.

Namun pada tingkat makro (sektoral regional) dan mikro (individu/rumah tangga), hasil pembangunan selama masa itu dapat dikatakan tidak terlalu memukau seperti pada tingkat makro. Walaipun jumlah orang miskin terus berkurang, tetapi jumlahnya masih tetap banyak dan memiliki kesenjangan ekonomi, baik anatar kelompok masyarakat maupun antar provinsi , masih besr dan bahkan cenderung membesar. Sebenarnya pemerintah Orde Baru sadar betul akan masalah ini, bahkan pembangunan ekonomi nasional waktu itu diwadahi dengan baik didalam konsep politik 'trilogi pembangunan'yaitu tiga prasyarat yang terkait serat secara saling memperkuat dan saling mendukung, yaitu stanilitas nasional yang mantap dan dinamis dalam bidang politik dan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pembangunan.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, sistem ekonomi Indonesia cenderung semakin kapitalis dengan keiktsertaan dalam upaya liberalism

perdagangan internasional, baik dalam konteks perjanjianperdagangan bebas antar anggota asosiasi negara-negara asia tenggara (ASEAN), yang dikenal dengan sebutan ASEAN Free Trade Area atau AFTA, maupun dalam konteks kesepakatan kerjasama ekonomi asia pasifik (APEC), dan pada tinggkat dunia dalam konteks kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dalam bidang investasi, juga semakin banyak sektor atau subsektor yang terbuka bebas bagi oenanaman modal asing (PMA). Selain itu, pemerintah dalam beberapa tahun belakangan ini sudah mengurangi berbagai subsidi, terutama subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang semakin memperkuat meknisme pasar didalam perekonomian nasional.

BAB III
KEBIJAKAN FISKAL

Pengertian Kebijakan Fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menuju keadaan yang lebih baik dengan jalan mengubah atau menata kembali penerimaan dan pengeluaran pemerintah atas APBN, sehingga jika kebijakan fiskal dilakukan dengan serampangan atau tidak sesuai dengan kebutuhan Negara akan menyebabkan terjadinya stagnansi pertumbuhan ekonomi bahkan kemunduran pertumbuhan ekonomi secara besar besaran seperti yang terjadi pada tahun '60an dan tahun '90an. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter. Perbedaanya terletak pada pola instrumen kebijakannya. Dalam kebijakan moneter pemerintah mengatur jumlah uang yang beredar, sedangkan kebijkan fiskal pemerintah mengandalikan penerimaan dan pengeluaran.

1. Analisis kebijkan fiskal dari tahun ke tahun berikut analisisnya:

a. Kebijakan fiskal tahun 1999-2000

♦ Menciptakan rangsangan fiskal

♦ Memperkuat dan memperketat basis penerimaan anggaran

♦ Mendukung dan berkontribusi aktif dalam program rekapitalisasi perbankan

♦ Mempertahankan dan tetap beracuan pada prinsip pembiayaan defisit.

b. Kebijakan fiskal tahun 2002

♦ Memperjuangkan volume dan rasio dana dan anggaran yyang diberikan oleh PBD.

♦ Rasio atau intensitas hutang pemerintah bisa diminimalisir.

2. Tujuan kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal mempunyai tujuan yang sangat kompleks yakni untuk mencapai sebuah perekonomian atau sistem ekonomi yang makmur dan sejahtera, serta untuk menentukan arah dan tujuan, bidikan, prioritas pembangunan bangsa atau pembangunan nasional dan tentunya menghasilkan sebuah pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Adapun tujuan-tujuan kebijakan fiskal antara lain :

a. Mencegah dan mengurangi tingkat pengangguran

Mengatasi pengangguran merupakan salah satu tujuan utama diterapkannya kebijakan fiskal. Kegagalan atau ketidakmampuan mencapai kesempatan kerja penuh tidak hanya berakibat pada tingkat pendapatan nasional atau laju pertumbuhan ekonomi yang tidak maksimal namun juga dampak buruknya bisa menambah jumlah pengangguran yang ada. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi negara.

b. Mempertahankan stabilitas harga

Tujuan selanjutnya adalah kestabilan harga, disini kebijakan fiskal selalu berusaha untuk menjaga harga pasar tidak mengalami penurunan dan kelonjakan yang tinggi. Dua hal ini akan berakibat fatal perekonomian negara, ketika harga terus menurus turun maka yang akan terjadi adalah akan terjadi banyak gulung tikar dan pengangguran karena usaha-usaha yang bukan milik negara bisa dibilang swasta dan UKM akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sebuah keuntungan, kebanyakan dari mereka ada yang balik modal saja bahkan ada juga yang tekor atau rugi. Sedangkan jika harga terus menerus melonjak naik maka yang akan terjadi adalah inflasi.

c. Memacu pertumbuhan ekonomi Negara

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu hal mutlak yang harus diupayakan oleh pemerintah. Dengan kemjuan di bidang ekonomi ini maka keberlangsungan hidup negara tersebut akan terjamin tanpa adanya gangguan yang berarti. Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal untuk mencari sebuah trobosan atau inovasi baru yang mampu berkontribusi

dalam kemajuan perekonomian negara serta mencari sebuah pemecahan masalah untuk digunakan dikemudian hari ketika banyak problem dan tantangan yang menyerbu perekonomian negara.

d. Mendorong lajunnya investasi.

Investasi merupakan salah satu transaksi dalam dunia ekonomi yang memiliki prospek besar. Untuk itulah kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong agar kegiatan investasi ini terus bertambah dan bertambah agar hasil dari padanya bisa dimanfaatkan sebagai pembangunan nasional dan lain sebagainya. Namun juga harus diingat dan diperhatikan ketika investor atau yang melakukan investasi adalah orang asing maka kita harus selektif dan cekatan dalam mengurusinya dan mengamati segala pergerakan mereka, karena takutnya dengan sifat yang selalu ingin menjadi pemiliki seluruhnya. Jika itu terjadi maka kita sebagai bangsa ini akan mengalami penurunan drasatis dan kegagalan dimanapun investor asing berlabu

e. Untuk mewujudkan keadilan sosial

Arti dari keadilan sesungguhnya adalah meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya, bukan berarti harus sama. Salah satu contohnya ketika seorang Ibu memberikan uang saku pada anaknya tentu berbeda antara anak SD dan perguruan tinggi, pasti uang saku anak yang sudah kuliah lebih banyak daripada anak yang SD hal ini disesuaikan dengan kebutuhannya, inilah yang disebut dengan sebuah keadilan. Begitu juga keberadaaan kebijakan fiskal ini untuk membuat dan menciptakan keadilan sosial. Dalam hal ini kebijakan fiskal berusaha untuk membagi rata atau mendistribusikan pendapatan. Kebijakan fiskal selalu berupaya untuk membuat keseimbangan antara kaya dan miskin bukan kaya menjadi kaya dan miskin menjadi miskin jadi diupayakan semua pihak mendapatkan sebuah kecukupan bidang ekonomi. Salah satu cara untuk bisa meratakan pendapatan bisa melalui pembayaran pajak.

3. Instrumen kebijkan fiskal

a. Anggaran belanja seimbang

Sesuai dengan namanya yaitu seimbang, maka disini adalah menggunakan perpaduan antara anggaran defisit dan anggaran surplus, yaitu dengan memadukan antara konsep pengelauran lebih banyak daripada pemasukan dan juga menggunakan konsep pemasukan yang lebih banyak

daripada pengeluaranya. Jadi pada dasarnya anggaran seimbang ini menjadi salah satu poerantara diantara keduaanya, anggaran ini bisa menggunakan anggaran sesuai dengan waktu dan kondisinya. Ketika keadaan atau kondisi perekonomian negara mengalami inflasi maka konsep anggaran surplus, dan ketika situasi menunjukkan keadaan yang tidak stabil maka anggaran yang digunakan adalah anggaran defisit.

b. Pembiayaan fungsional

Untuk kebijakan ini fokus pada penyesuaian anggaran negara dengan menentukan biaya atau anggaran yang digunakan oleh pemerintah dengan sedemikian rupa hingga tidak memiliki pengaruh bagi pendapatan atau pemasukan negara secara langsung. Kebijakan pembiayaan fungsional ini memiliki tujuan utama untuk menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja dnegan membuka berbagai lapangan pekerjaan baru. Dalam kebijakan ini pula pajak dan pengeluaran pemerintah ditempatkkan atau diposisikan dalam tempat yang berbeda. kebijakan ini dipelopori atau dicetuskan oleh A.P Liner.

c. Anggaran defisit atau Kebijakan fiskal ekspansif

Anggaran defisit merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memeberikan stimulus pada sebuah perekonomian dengan cara mengupayakan untuk membuat pengeluaran negara untuk belanja dan pembangunana lebih besar daripada pemasukan yang ada selama kurun waktu tertentu. Mungkin kita berfikir mengapa cara atau kebijakan ini dipakai padahal dilihat dari satu sisi hal ini merugikan negara, namun sebenarnya tidak pada dasarnya kebijakan ini dilakukan hanya pada situasi ekonomi yang resesif karena hal ini akan menguntungkan bagi negara.

d. Anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif

Untuk anggaran surplus ini sebenarnya adalah kebalikan dari anggaran defisit, jika pada anggaran defisit pengeluaran pemerintah lebih ditekankan daripada pemasukannya, namun jika dalam anggaran surplus maka pemasukan negara adalah menjadi fokus perhataian diharapkan pemasukan negara lebih besar dari penegeluaran negara baik untuk pembangunan atau investasi dan lainnya. Kebijakan ini diberlakukan ketika situasi ekonomi pada kondisi yang ekspansi serta memanas (*overheating*). Hal ini semata hanya dilakukan untuk menurunkan tekanan dan desakan yang kian tinggi dari permintaan. (Baca juga: hukum permintaan dan penawaran).

e. Stabilitas anggaran otomatis

Stabilitas disini diartikan sebagai upaya untuk tetap mempertahankan keadaan dan kondisi perekonomian yang sudah bagus dengan cara menyesuaikan anggaran yang dimiliki negara, dengan memperhatikan penggunaan biaya atau dana, dalam kebijakan ini diusahakan untuk menekan pengeluaran negara dengan sesuatu yang lebih bermanfaat dan tentunya dengan biaya minimum namun bisa menghasilkan banyak hasil.

f. Pengelolaan anggaran

Pengelolaan anggaran ini merupakan salah satu usaha dari pemerintah untuk menjaga sebuah kestabilan perekonomian negara. Cara atau alternatif yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan serta menggunakan hasil pajak atau pinajaman sebagai modal dasarnya. Dimana hasil pajak dan pinajaman ini menjadi satu kesatuan utuh dalam hal penerimaan dan pengeluaran negara. Konsep dari pengelolaan anggaran ini senada dengan adanya anggaran seimbang, dimana ketika kondisi perkonomian lesu atau tidak berkembang maka anggaran surplus yang diterapkan sedangkan ketika terjadi inflasi kita akan menerapkan tanpa adanya dana cuma .Untuk pendekatan pengelolaan anggaran ini dicetuskan oleh pertama kali oleh Alvin Hansen.

4. Pokok pokok pembahasan dlam kebijkan fiskal, diantaranya:

a. Arah kebijakan fiskal dalam APBN

♦ Kebijakan fiskal diarahkan supaya negara bisa memberikan biaya untuk pengeluaran dan penyelenggaraan program-program atau rencana pemerintah secara efisien, tepat guna dan jauh dari kata korupsi.

♦ Kebijakan fiskal diarahkan untuk turut serta dalam menjaga kestabilan ekonomi serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

♦ Kebijakan fiskal hadir untuk diarahkan kepada perumusan dalam menyusun rangkaian kegiatan yang mampu menjadi problem solving atau pemecahan masalah-masalah yang diprioritaskan berdasarkan perutran suatu negara layaknya undang-undang, seperti halnya kemiskinan, pendidikan, pembangunana, sarana prasarana (infrastuktur).

♦ Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan yang diarahkan pada penyokongan atau sebagai pendukung dari keberadaan serta pelaksanaan

otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan fiskal diantara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah.

b. Strategi kebijakan fiskal dalam APBN

♦ Menurunkan serta meminimalisir defisit anggaran atas keberadaan Pembelanjaan Biaya daerah (PBD).

♦ Memperbaiki dan menyusun pendapatan negara dengan bidang terstruktur dengan pembayaran pajak serta hal-hal yang tidak berkaitan dengan pajak (non-pajak).

♦ Mengoptimalkan anggaran belanja yang telah tersedia, tidak boleh sampai hutang kalau bisa dengan dana minimal mendapatkan sesuatu yang luar biasa.

♦ Merangsang kemudia mendukung kegiatan perekonomian negara agar senantiasa bisa maju dan berkembang.

♦ Memperbaiki dan merkonstruksi sistem adminitrasi, perpajakan, bea dan cukai dengan tujuan bisa menjadi lebih baik lagi.

♦ Memperinci atau mendetailakan alokasi kebutuhan prioritas anggaran belanja yang berhak diterima oleh negara.

♦ Mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran belanja ke setiap daerah yang memang membutuhkan serta tidak mengesampingkan hukum atau peraturan yang sudah ada.

♦ Memaksimalkan kebijakan pembiayaan defisit anggaran dengan menggunakan biaya dan resiko yang rendah.

A. Hubungan Kebijakan Fiskal dengan Pembangunan

Kebijakan fiskal sangat berhubungan erat dengan pembangunan. Kebijakan fiskal yang dijalankan dengan baik dan sesuai dengan perekonomian akan meningkatkan proses pembangunan. Berikut ini merupakan usaha-usaha yang dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal agar pembangunan berkembang pesat.

1. Menjalankan kebijakan fiskal dengan menjaga pengeluaran dan penerimaan negara sehingga tetap seimbang serta menghindari pengeluaran berlebih. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pembelanjaan satu sektor

oleh pemerintah dan merangsang kegiatan fiskal terhadap pengusaha tertentu, seperti pemberian modal.

2. Memacu pembentukan modal yang dibutuhkan pembangunan.

B. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dalam Kebijakan Fiskal

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kebijakan fiskal didasari empat prinsip, yaitu sebagai berikut:

1. Tugas pemerintah pusat di daerah dibiayai APBN

2. Tugas pemerintah daerah dibiayai APBD

3. Tugas pemerintah pusat atau daerah dalam rangka bantuan pembangunan dibiayai pihak yang menugaskan. Dalam hal ini dapat dibiayai oleh APBD maupun APBN

4. Apabila daerah mampu mencukupi biaya daerah, pemerintah memeberikan dana bantuan.

Mengutip dari apa yang menjadi salah satu program kerja Presiden Joko Widodo yaitu meningkatkan ekonomi Indonesia melalu berbagai sektor perekonomian yang ada baik perindustrian, pertambangan, dan lainnya sehingga hal itu membutuhkan banyak nperangkat untuk menstimulus investor asing maupun dalam negeri. Stimulan itu meliputi infrastruktur yang baik, pemerataan pembangunan, pengolahan Sumber Daya manusia lewat jalur pendidikan dan pelatihan sehingga dalam perumusan fiskal harus diperhitungkan secara matang, efektif, efisien dan tepat sasaran.

Pada beberapa tahun terakhir ini Indonesia sedang dilanda permasalah fiskal, dalam dua tahun terakhir indonesia mengalami ujian yang tidak ringan. Defisit keseimbangan primer meningkat nyaris tidak terkontrol karena belanja negara tidak produktif dan harus dibiyayai oleh utang negara, apalagi pengelolaan utang tersebut sering menghadapi masalah penambahan mendadak pada akhir tahun.

Tantangan terbesar dalam kredibilitas kebijkan fiskal saat ini belum menunjukan fungsi yang sebenarnya dalam suatu kebijakan fiskal, yaitu fungsi stabilisasi dan stimulus, fungsi alokasi, serta fungsi distribusi dan keadilan. Anggaran berbasis kenerja sebagaimana dimanfaatkan undang-

undang nomer 17 tahun 2003 tentang keuangan negara belum menunjukan pencapaian yang memuaskan, apalagi jika diharapkan sebagai pengerak utama pertumbuhan ekonomi.

Dana alokasi kusus (DAK) sering tidak sinkron dengan kebutuhan daerah sehingga pemerintah perlu lebih serius lagi dalam melaksanakan pengembangan kapasitas lokal dan kompetensi sumber daya manusia untuk meningkatkan kredibilitas fiskal dan reformasi kebujakan fiskal secara umum

Sementara itu, persoalan tentang dilema disentif pada dana alokasi umum (DAU) yang masih menggunakan indikator input, seperti jumlah orang miskin dan lain-lain yang berhubungan dengan kebutuhan fiskal. Jika indikator inputnya semakin baik, maka jumlah DAU akan mengecil, atau masih terdapat kecenderungan moral hazard di beberapa daerah.

Reformasi fiskal perlu didorong juga yang berhubungan dengan proses legislasi, seperti RUU ketentuan umum dan Tata Cara perpajakan dan RUU pendapatan asli daerah, perlu segera diselesaikan pembahasannya karena telah masuk program legislasi nasional yang dijadikan prioritas.

Dari beberapa permasalahan yang ada di Indonesia.Pada tanggal 6 desember 2016 diadakannya sarasehan 100 ekonom di Indonesia dimana para ekonom yang diundang didalaam acara tersebut diminta untuk memberikan saran yang dikemas dalam bentuk artikel ekonomi, saran dari ekonom pada sarasehan tersebut adalah pada bidang fiskal yang menjadi titik pusat suatu Negara dipandang baik melalui kebijakan pemerintah dalam mengatur ekonomi negaranya.

Dalam menyikapi permasalahn yang ada di Indonesia para ekonom memberikan saran dan masukan bagi pemerintah agar berjalannya perekonomian Indonesia menjadi lebih baik.Dalam menjalankan kebijakan fiskal ada beberapa hal yang perlu dilihat kembali oleh pemeintah.

Menurut **Anggito Abimanyu** perlu adanya rencana jangka pendek dan jangka panjang. Rencana jangka pendek meliputi,1. Reformasi kebijakan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara, 2. Memgintesnsifkan penghasilan pajak sektor yang tumbuh, 3. Memastikan bahwa tambahan penerimaan migas dan pengurangan subsidi BBM dan alokasi DBH migas bersifat netral, 4. Melakukan reformasi belanja dengan menghilangkan duplikasi belanja pemerintah pusat, pusat-daerah, negosiasi

pinjaman atas hutang luar negri. Sedangkan dalam rencana jangka menengah, fokus kebijakan fiskal adalah pada perpajakan dengan mempercepat perubahan UU KUP, terutama pembantukan badan penerimaan pajak dengan lebih baik dalam melakukan pengaturan internal dan SDM lembaga, pengukuran kinerja SDM pajak secara profesional dengan ,elakukan hirin and firing, perubahan UU PPh, dan menijau kembali mengenai kebijakan obyek dan subyek pajak PPN. Terkhir adalah pemerintah perlu untuk mengurangi janji-janji penerapan dan pelonggaran kebijakan fiskal yang belum dikaji dampak fiskal dan ekonomi.

Menurut **Arif Budimanta** untuk menaikan *great* atau tingkat kualitas kondisi ekonomi, Indonesia harus memulai orientasi baru tehadap manfaat investasi dan ekspor barang yang memiliki nilai tambah tinggi. Pada permasalahan ini ketika ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi diatas 7 persen (tercantum dengaqn jelas dalam PP.No.2 Thn 2015 tentang RPJMN 2015-2019) tidak hanya mengandalkan akan konsumsi rumah yang pada tingkat tertentu akan mengalami kesulitan untuk terus tumbuh relative setabil ataupun tinggi. Selain dari pada itu tentunya kebijakan fiskal pemerintah harus bisa untuk menjalankan fusing stabilitas, alokasi dan distribusi. Kebijakan fiskal harus mampu menstimulus sumber pertumbuhan lainnya seperti ekspor dan impor yang bersih sehingga akan mendorong terciptanya lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan fiskal harus ditangguhkan secara berkala serta berkelanjutan karena ketangguhan fiskal hari ini tidak akan terlepas dari keberlangsungan fiskal yang akan datang".

Menurut **Candra Fajri Ananda**, untuk menuju kualitas fiskal Indonesia yang lebih baik pemerintah selain membanahi pemerintahan pusat juga harus membenahi struktur dan efektifitas fiskal daerah agar dapat lebih mapan. Pembenahan ini dilakukan dengan restrukturisasi kompnen belanja daerah agar lebih relevan dengan meninjau ulang proporsi belanja pegawai dengan membatasi komposisi belanja pegawai secara bertahap dan berkelanjutan hingga mencapai maksimal 35 persen, hal ini berbeda dengan apa yang diwacanakan pemerintah yang ingin merevisi UU.No 33.2004 yang membatasi komposisi pegawai maksimal 50 persen. Selain dari pembatasan belanja pegawai juga pembatasan belanja modal dengan batasan misalnya 25 persen , kare sebagian belanja modal saat ini lebih untuk kepentingan pemda yang sangat jauh dari maksut untuk mendukung

aktivitas makroekonomi daerah yang besarannya sampai 40 persen. Pemerintah pusat harus mulai nanggapi bahwa the right siza bagi Pemdabelum ada dimana tolak ukur penilaian tentang Pemda sangat berpengaruh sebagai pendongkrak daerah untuk saling lebih unggul satu sama lain baik pada bidang pertumbuhan ekonomi, ataupun birokrasi yang berkaitan tentang pelayanan public. Selain itu sebuah trobosan baru dengan titik fokus pada pendanaan alternatif daerah antara lain adalah mengoptimalkan potensi pendanaan berupa obligasi daerah dan juga metode kerja sama pendanaan melalui sinergitas kebijakan atar pemda. Kerjasama pada pengiringan metode dan mobilitas tenaga kerja yang sudah sangat membumi dengan cost sharing dan desaing kelembagaan yang proporsional. Selain itu juga daerah perlu didorong untuk melakukan pembangunan kerjasama antar daerah untuk membangun intesifitas fiskal daerah.fasilitas dan pengaturan pajak dan restribusi daerah perlu perbaiakan dengan tidak hanya tentang kepatuhan pembayaran pajak yang rendah dengan melimpahkan kepada para wajib pajak tetapi dengan memberikan kemudah kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak dengan mekanisme online sehingga permasalahan akan pembengkakan biaya pembayaran pajak yang dikarenakan mobilitas antar daerah itu tinggi dapat diatasi dan dalam proses pengawasan juga dapat dipermudah dengan fasilitas teknologi tersebut.pemda harus ikut menggadeng pemerintah desa agar pembangunan daerah dapat terbantukan oleh desa dengan adanya dana desa yang telah berjalan hingga hari ini.pola pemerahan anggaran negara untuk daerah tidak bisa terus dilakukan dan jika terus seperti itu harus ada peninjauan ulang apakah pola tersebut telah membawa dampak sighnifikan bagi daerah, jika kenyataannya terjadi stagnanisasi pemerintah pusat harus melakukan inovasi yang memaksa agar daerah memiliki kemandirian ekonomi sehingga berpengaruh atas keadaan fiskal Negara".

Menurut **Darussalam**, dalam proses perumusan dan merancang hukum pajak dilakukan dengan trasparan dan partisipatif serta didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan ahli-ahli pajak sehingga akan membarikan output yang ideal dan mendapatkan akseptabilitas publik dikarenakan salah satu penyebab terjadinya sengketa pajak adalah minim partisipasi dari pemangku kepentingan dalam proses perumusan diatas.Targeting penerimaan pajak harus dilakukan oleh pemerintah yang pada hal itu memiliki kebijakan targeting pajak sehingga proyeksi penerimaan pajak dapat terbentuk secara ideal. Selain itu juga dalam

memproyeksikan penerimaan pajak, pemerintah menggandeng legislatif juga harus menggandeng institusi kebijakan pajak dan administrasi pajak sehingga dapat terbentuk sebuahangka pajak yang realistis".

Menurut **Djisman Simanjuntak**, peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur yang lebih massif dimana hal itu dimaksudkan untuk sebuah investasi pemerintah dengan bersamaan melakukan deindustrialisasi didaerah-daerah timur yan bhari ini belum merata serta melakukan reindustrialisasi didaerah-daerah isdustri yang sudah berkembang dan berjalan seperti nmelakukan persebaran pusat pusat industri dijawa dengan pembagian industri berat berada di bagian ujung barat. Di bagian tengah iadalah industri padat karya sedang dan tinggi.Dibagian tengahtimur, industri padat karya rendah dan sedang, dan ujung timur adalah industri berat.Serta di bagian lain digerakkan dan didorong untuk industri jasa seperti pariwisata.Selain infrastruktur fisik juga dapat digerakkan infrastruktur sosial yang baik melalui luusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dapat di vokasionalkan dengan perusahaan-perusahaan baik asing maupun lokal dengan dorongan yang terstruktur oleh pemerintah. Karena hasil dari investasi infrastruktur sosial hasilnya lebih besar daripada investasi infrastruktur fisik"

Menurut **Dradjad H.Widodo,** pemerintah dalam membuat sebuah perencanaan haris dibuat dengan seralistis mungkin sehiingga devisiasi dan shortfalldapat diminimalkan. Dengan cara yang lebih fundamental seperti pengamanan realisasi penerimaan dengan menggunakan teknologi informasi yang diperoleh dari intelegen Negara dan data yang diperoleh dari lembaga/kementrian.Hal ini dimaksukan untuk mempermudah para wajib pajak dalam membayar pajak serta lembaga pemungut pajak dalam melakukan pengumpulan pajak Negara serta memper kecil tingkat permasalahan didalam pemungutan pajak oleh lembaga pemungut pajak karena permasalah di Negara ketia ada sebuah masalah tentang perpajakan yang selalu disalahkan oleh kemenkeu adalah dirjen pajak dan aparatnya padahal mereka adalah bagian dari kemenkeu.Selain itu merekontruksi dengan menggunakan teknologi dapat menyerap para ahli bidang itu kedalam aparat dirjen pajak karena kita tahu sendiri bahwa dirjen pajak didominasi oleh lulusan STAN dan akuntan. Hal ini harus dibarengi dengan keberanian untuk mencoba walaupun ada kekhawatiran dalam menjalankan program tersebut tetapi tidak mempengaruhi untuk sebuah uji

coba.Selanjudnya adalah refisi UU nomer 16/2009 tentang ketentuyan umun dan tata caraperpajakan agar solusi ini mendapatkan kekuatan dari paying hukum"

Menurut **Enni Srihartati,** strategi pengoptimalisasi penerimaan pajak yang dilakukan dengan mempermudah dan penyerderhanaan administrasi pembayaran pajak. Dilanjudkan dengan perbaikan data base perpajakan dengan dukungan sisten TIK yang handal dan berkoordinasi dengan lembaga terkait. Disamping itu pembenahan desain institusi dan peningkatan kualitas SDM menjadi penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.Selain itu yang tidak kalah penting adalah dari meningkatkan peran stimulus fiskal adalah efektifitas belanja pemerintah yang akan memacu produktivitas nasional tetapi untuk menentukan indicator keberhasilan tidak lagi menggunakan keberhasilan penyerapan anggaran seperti yang sudah sudah tettapi menggunakan formulasi indicator output dan income dari sebuah progaran yang tidak hanya berbasis sektoral dan parsial. Harus dimauli dari kualita sperencanaan anggaran dan sistem evaluasi dan motoring yang akuntable dan terukur.Dengan memanfaatkan bapernah yang harus melakukan koordinasi seluruh program kementrian dan integrasi pusat daerah. Melalu musrembangda dan musrembangnas menjadi instrument konsolidasi yang menyeluruh.Dengan cara ini pajak dimaksudkan untuk dapat mengatasi persoalan kemiskinan dan kesenjangan yang relevan dengan melakukan distribusi pendapatan. selanjudnya adalah dengan mengupayakan peningkatan penerimaan iklim investasi dan daya beli sebagai perinsip utama untuk memproteksi kredibilitas stimulus fiskal dari tekanan eksternal yang ditandai dengan terpilihnya presiden Donal Trum yang membuat ketidak pastian global meningkat.

Menurut **Immaduddin Abdullah,** optimalisasi penerimaan Negara melalui pengoptimalisasi penerimaan PPh Orang peribadi (OP) dengan menjalankan nomor identitas tunggal untuk dijadikan basis data kodisi sosial ekonomi dari masyarakat sehingga dapat ter-cupture kewajiban pajak dari setiap wajib pajak.senlajudnya meningkatkan PPh badan dengan meninggunakan perkembangan *base irosion and profit shifting* (BEPS) yang dapat dijadikan instrument dalam mencegah penghindaran pajak oleh perusahaan modal asing.yag terakhir adalah pemerintah harus focus dalam memastikan berjalannya program pengampunan pajak agar sesuai dengan target awal yaitu meningkatkan basis pajak.Kedua adalah

optimalisasi belanja pemerintah melalui efektifitas dan efisiensi belanja dalam APBN dengan melakukan perbaikan dalam postur belanja pemerintah seperti pengurangan subsidi bahan bakar minyak dan mengurangi dana transfer desa yang tidak terlalu membawa perubahan yang signifikan.Ketiga adalah pengelolaan huatang yang dilakukan dengan persepektif pada pembiayaan pembangunan agar tidak semata-mata hanya untuk menutupi fiskal gap dengan mekanisme hutang dapat diterbitkan hanya untuk membiayai pembangunan".

Menurut **Muhammad Firdaus**, massalah ketimpangan atau ketidakmerataan antar wilayah yang terjadi di Indonesia sangat jelas dan parah karena pusat perkembangan hanya berkutak di wilayah pulau jawa, sedangkan pulau-pulau yang lain seperti Sumatra Kalimantan Sulawesi dan papua jauh tertinggal dari pulau jawa baik dari perkembangan infrastruktur dan layanan public. Sekarang kita telisik lebih dalam lagi apa yang terjadi dipulau jawa juga masih terdapat perbedan yang signifikan seperti jawa bagian utara lebih maju dibandingkan dengan jawa bagian selatan dan dipulau lain seperti Sumatra dimana pembangunan masih dibawah jawapun terjadi perbedaan antara Sumatra bagian timur lebih maju dibandingkan dengan Sumatra sebelah barat. Dari fakta diatas tersebut pemerintah berusaha memperbaiki kesenjangan antar wilayah tersebut dengan membuat kebijakan dengan memberikan dana perimbangan di beberapa wilayah di Indonesia, tetapi dalam berjalannya kebijakan ini ada satu titik lemah yaitu tentang kapasitas pemerintahan wilayah atau daerah yang menyebabkan dampak yang buruk karena manfaat dari dana perimbangan tidakk dapat berjalan dengan baik.Melihat kenyataan tersebut penulis memberi saran sebagai pemecah masalah dengan cara meningkatkan pemanfaatan dana perimbangan danmerelokasi dana perimbangan dari kementrian dan lembaga DAK untuk meningkatkan investasi public di kawasan berkembang. Dan mengalokasikan dan memberikan dana perimbangan kepada wilayah yang kuarang berkembang dengan mendorong wilayah tersebut memprioritaskan dana perimbangan kesektor prtanian. Selain itu alokasi dana perimbangan dimulai dengan meningkatkan kapasistas sumber daya local, pembangunan indusri kreatif dan atau agrobisnis dengan dibarengi pembangunan infrastruktur yang massif dan lebih baik".

Menurut **Hidayat Amir** peluasan dan penajaman revolusi fiskal pada sisi belanja. Hal tersebut dilakukan agar tidak hanya terhenti pada relokasi belanja subsidi ke infrasetruktur karena masih banyak yang perlu di evaliasi pada keefisiensi dan efektifitasannya. 1. Perbaikan pada sistem perpajakan sebagai implementasi reformasi pada sisi pendapatan dengan lebih berorientasi pada reformasi administrasi bukan pada perpajakannya dikarenakan dalam menjamin kemudahan dalam pembayaran kewajiban atas pajak. 2. Dalam proses mengatasi masalah pengelolaan fiskal dapat dilakukan dengan cara pemisahan pendapatan yang bersifat fluktuatif "migas" menjadi dua sifat yaitu permanen dan transitoris karena dapat membantu pada sisi perencanaan pembangunan. 3. Adanya kersama yang baik dalam pembenahan industri nasional antara kementrian perindustrian dan kementrian yang lain dimana pembangunan industrialisasi nasional tidak hanya menjadi tanggung ajwab satu instansi tetapi menjadi tanggung jawab semua instansi karena ketika hal itu bisa berjalan dapat memengaruhi banyak hal yang terkena imbas dari berjalannya industrialisasi. 4. Penguasaan integrasi hulu hilir seperti cina yang menghilangkan hambatan pada rantai pasok yang langsung dikendalikan oleh pemerintah sehingga barang-barang dari cina sangat kompetitif.5.Pembangunan infrastruktur harus secara baik terkhusus diwilayah industri karna untuk menekan biyaya logistic yang selama ini menjadi bebean Karen biaya pengiriman yang mahal.6.Mendorongekportir barang yang memiliki nilai tambah tinggi dan melarang eksportir barang mentah yang dalam alur harga sangat tidak menguntungkan. 7. Membangun industri turunan yang mendekati sumber bahan baku dengan penyediaan infrastruktur yang terintegrasi dan membangun industri diwilayah Indonesia timur dengan dilengkapi infrastruktur yang dibutuhkan.8.Menjalankan reindustrialisasi berdasarkan rencana induk pengembangan industri nasional dengan komitmen bersama dengan kendali dibawah presiden/wakil presiden langsung".

Menurut **Kodrat Wibowo,** mempersiapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan yang lebih ketat dan selektif dalam mekanisme pengajuan daerah otonomi baru dan mendorong kerjasama antar daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.Selanjudnya adalah merefisi UU nomer 28/2009 tentangpajak daerah dan restribusi daerah guna memberikan dorongan kepada daerah dalam mengoptimalkan kapsitas fiskan yang berasal dari sumber daya

daerah. Hal tersebut dirasa cukup Karen ketika daerah tidak didorong untuk menyadari akan pendapatan fiskal daerah dengan sumber daya daerah akan mempengaruhi kapsitas fiskal Negara dimana fiskal yang seharusnya untuk membangun infrastruktur malah dialukasikan sebagai dana perimbangan daerah yang dalam perjalanannya tidak berdampak efektif dan efisien terhadap perkembangan daerah".

Menurut **Lukman Hakim**, perubahan sebuah sistem yaitu sebuah sistem penggajian nasional dimana ada tolakukur penggajian para pekerja yang ada di lembaga/kementrian hingga pada level yang palingrendah sehingga tidak terjadi gap yang menyebabkan kinerja suatu lembaga hanya sebagai normalitas untuk memenuhi kewajiban belaka tanpa mempertimbangkan sebab dan akibatapakah kebijakan tersebut bermanfaan ataukah hanya untuk menambah bebananggaran belaka. Ketika hal tersebut telah dijalankan agar tidak terjadi penyeran yang lebih terhadap APBN disini penulis membuat siste sertifikasi dengan tujuan agar ketika sesorang yang berkerja dilembaga untuk mendapatkan hasilyang lebih harus juga bekerja dengan lebih pula.

Menurut **Muliyadi Widjaja**, fiskal Indonesia harus bisa lebih baik salah stunya dengan melalui penyerapan dana pajak. Penyerapan dana pajak pada beberapa decade terakhir masih dipegang oleh pajak cukai rokok yang mencapai 40% dari anggaran pemerintah tetapi hal itupun masih belum cukup karena masih banyak orang wajib pajak atau instansi yang wajib membayarkan belum semua membayarkan pajak mereka sehingga dalah hal pajak belum bisa menjadi titiktumpu penyerapan anggaran Negara. Dalam hal ini perlu ada sebuah terobosan dimana perlu adanya pembukaan perijinan cukai baru agar titik tumpu tidak hanya pada rokok tapi bisa memalauindustri-industri lain seperti industri padat karya yang dimana di china telah berkembang dan menyumbang penyerapan dana anggaran Negara yang sangat besar dan signifikan. Ketika hal tersebut akan dilakukan harus membentuk sistem cukai baru baik dari perijinan pengeluaran cukai, bentuk cukai, dan para pengelola cukai yang dimana hal itu sering terjadi kecolongan dimana instansi cukai yang tidak bersih sehingga mempengaruhi dan merugikan Negara dengan prosentase yang tidak kecil".

Menurut **Prasetijono Widjojo**, keberlanjutan fiskal perlu dijaga dengan menjaga mobilitas penerimaan Negara, meningkatkan kualitas belanja Negara, dan mengoptimalkan pengelolaan resiko pembiyayaan

huatang. Kebijan fiskal tahun2017 dijaga dengan peningkatan pengelolaan fiskal untuk meningkatkan daya saing dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomiyang berkualitas dan berkeadilan. Kebijak fiskal dijaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan pekerjaan,pengentasan rakyat miskin dan pengurangan kesenjangan.pengelolaan kebijakan fiskal difokuskan untuk menjaga deficit pada batas aman yaitu 3% terhadap PDB dan menjaga keseimbangan primer. Ada 2 cara yaitu: Pertama, mengoptimalkan penerimaan pajak dengan pelaksanaan pengampunan pajak dan pengoptimalan penegak hukum pajak.kebijakan perpajakan ini dimaksudkan untuk mendorong pertumbhan ekonomi intensif "infestasi daya saing industri nasional dan daya beli masyarakat" yang dilakukan melalui pembarian intensif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis dan mengurangi konsumsi barang yang bersifat negative pada fiskal. Kebijakan PNPB dimaksukan sebagai peningkat pelayanan public tetapi masih memperhatikan kondisi lingkungan.Kedua, peningkatan belanja produktifmeningkatkan efisiensi dan penajaman belanja non-oprasional, terutama belanja untuk meningkatkan kualitas iskal.meningkatkaan kualitas dan efesiensi belanja untuk program pelindungan sosial.Memperkuat program prioritas pada bidang sosial, ekonomi dan pariwisata.Pembenahan bantuan langsung nontunai agar bisa tepat sasaran.Mendukung penegakan hukum dengan peningkatan keamanan dan setabilitas Negara.Memaksimalkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus terus diupayakan dan terus dilanjudkan untuk menuju ekonomu dengan pertumbuhan yang maksimal. Disamping itu pertumbuhan ekonomi yang relative rendah harus didorong agar dapat berkembang sehingga menjadi besar dan lebih baik untuk penyerapan dana anggaran pemerintah menjadi lebih baik.

Menurut **PURBAYA YUDHI SADEWA**, di tengah kondisi ekonomi dunia yang hari ini makin memburuk indo nesia masih harus bertumpu pada mesin pemcetak domestikuntuk dapat memproduksi dengan baik.sayangnya kondisi APBN tidak terlalu baik untuk mendorong hal tersebut,yang ditandai tidak tercapainya penyerapan pajak pada 2 tahun ini. Sehingga menyebabkan ketakutan dan kehati-hatian pemerintah tentang capaian pajak yang memberi imbas pada banyak belanja negarayang ditunda walaupun kebutuhan tersebut harus dilakukan. Hal ini dikarenakan dalam meproyaksikan kurang tepat sehingga menyebabkan

hal yang di inginkan oleh pemerintah tidak sesuai target sehingga menyebabkan hal diatas.Masalah keuangan Negara telah lama terjadi dari tahun2008 hingga sekarang masih membelenggu pemerintah Indonesia. Hal ini bisa diatasi dengan efisiensi penggunaan dana dana untuk desa agar lebih jells penggunaannya apakah bermanfaat bagi daerah atau tidak dimana daerah sebagai simpul kecil yang membesarkan Negara sebagai simpul besar pada era modernitas sistem otonom".

Menurut **SRI ADININGSIH**, ketangguhan ekonomi Indonesia masih sangat lemah pada hari ini meskipun Indonesia masuk dalam 20 Negara dengan pertumbuhan ekonomi yang baik didunia tapi harus diingat bahwa Indonesia masih kropos didalam ekonominya. Dalam penyelesaian masalah tersebut perlunya perencanaan fiskal yang baik dan kredible agar kebijakan fiskal dapat merambah pada semua sektor nasional. Bebrapa hal yang perlu digaris bawahi adalah tentang perombakan fiskal yang berkaitan tentang pembanguna infrastruktur dimana hal itu sangat penting dikarenakan ketika infrastruktuk kita baik akan brpengaruh pada masuknya infestasi asing masuk, sektor pariwisata kita ramai dan masyarakat yang bejalan pada sektor industri kecil, menengah dan besar dapat mendistribusikan barangnya sehingga penyerapan pemerintah melalui sektor tersebut menjadi leboh baik karena kita tahu penyerapan pendapatan pada 3 hal tersebut masih sangat kecil dan perlu dorongan yang ekstra.Dalam pelaksannan pembangunan infrastruktur juga perlu adanya sebuah menejerial yang bagus dan pelaksannaan yang bagus yang dilakukan dari awal perencanaan hingga penyelesaian pembangunan agar anggaran yang telah dibentuk diawal tidak jeblok dan lagi-lagi yang diberatkan adalah uang Negara yang diperoleh lewat hutang".

Menurut **TAUHID AHMAD**, dalam menangani ketidak pastian fiskal ini perlu ada perombakan perombakamnagar fluktuasi penerimaan daerah tidak menyebabkan gejolak yang berkepanjangan.Pertama, pemerintah perlu konsisten terhadap kebijakan mengenai alokasi minimum yang diterima oleh pemda sehingga tidak menjadi jangkar dalam perencanaan dan pelaksanaan program.Alokasi inilah yang seharusnya berasal dari DAU sehingga perlu dikembalikan kempali pada pasal 11 ayat 10 uu nomor 18 tahun2016 tentang APBN tahun 2017.Kedua, dana pemda di perbangkan, baik dalam bentuk sisa anggaran atupun lainya, perlu diatur ulang dengan cash managemen yang sehat. Karena tidak semua

dana tersebut dipergunakan tetapi alokasi minimum pda awal tahun anggaran tetap dipergunakan untuk menjaga kesinambunagn jalannya pemerintahan. Pekerjaan terbesar dari dari dana ini adalah peningkatan evektivitas penggunaan melalui perbaiaka dalam bentuk teksnis yang tetap untuk lima tahun, perbaikan proses tender yang berdimensi jangka menengah, hingga pengaturan kembali jabatan dan organisasi pemda.Ketiga, meningkatkan local taxing power.Karena hal ini sangat penting mengingat kekuatan pemda dalam menghasilkan pendapatan asli daerah tahun 2016 hanya mampu 22%.Sehingga selain mengubah undang-undang tentang pajak dan restribusi daerah juga perlu membangun institusi tax daerah yang kredible, termasuk penguatan SDM daerah. Selain itu untuk meninggkatkan lacal taxing power juga dimulai dengan pengembangan data base yang riil, kebijakan intensif dan disintensif, hingga perombakan regulasi pajak dan restribusi daerah.Keempat, pengembangan pasar obligasi daerah sebagai basis pembiayaan yang berlaku bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang tinggi dan sedang. Namun, pemerintah perlu memeringkatkan utang bagi semua daerah untuk digunakan sebagai penilaiaan untuk pemda yang akan membayar yield dari obligasi tersebut. Hal ini dimulai dengan pembangunan kepercayaan antara pemerintah pusat dengan daerah bagi pasar obligasi tersebut, yang dimalai dari pesiapan, sosialisasi hingga menjaga komitmen obligasi tetap berjalan dengan baik.

Menurut **VID ADRISON**, dalam meningkatkan penerimaan Negara tidak hanya bertumpu dengan amnesti pajak yang kemungkinannya bersifat temporer, diperlukan beberapa trobosan yang bisa meningkatkan pendapatan Negara secara berkelanjutan.Pertama, penerapan nomor identitas tunggal, penerpan trobosan ini diras baik karena sampai saat ini jumlah pemilik NPWP di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini sangat berimbas pada GAP karena orang yang memiliki NPWP dan yang tidak sama bisa menikmati barang dan jasa public. Masalah ini dikarenakan masyrakat berfikaran bahwa NPWP tidak terlalu penting karena berguna untuk pembayaran pajak saja sedangkan untuk keperluan administrasi mutlak menggunakan ktp,sim, dan paspor. Penggunaan NIK (nomor induk kependudukan) sebagai pengganti NPWP dapat menjadi solusi dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak.Karena NIK adalah nomor yang dikeluarkan oleh pemerintah sejak seseorang terdata sebagai penduduk

Indonesia dan berlaku seumur hidup.Kedua, perbaikan peraturan pemerikasaan wajib pajak. Pada peraturan perpajakan yang berlaku pada hari ni, pemeriksaan pajak salah satunya ditujukan kepada wajib pajak yang mengklaim terjadinya kelebihan pembayaran pajazk. Di satu sisi hal tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa wajib pajak memang berhak mendapatkan restitusi.Namun, disisilain akan meningkatkan rasa ketidak adilan bagi pembayar pajak karena mereka telah membayar pajak dan ketika terjadi kesalahn mereka akan melakukan audit untuk mendapatkan restitusi mereka harus mengeluarkan biaya lebih untuk pengurusan dokumen-dojumen yang diperlukan.Ketiga, simplifikasi cukai rokok. Meskipun cukai rokok memberikan pendapatan kepada pemerintah yang cukup bnyak tetapi masih bisa ditingkatkan lagi dengan adanya simplifiksi tarif. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesetabilan dan meningkatkan pendapatan dari cukai rokok sekaligus digunakan untuk pengendalian jumlah konsumsi rokok.

Menurut **PRASTYANTOKO**, ketidakpastian ekonomi global yang terjadi hari ini sangat berpengaruh di dalam negri. Ketidak pastian tersebut juga akan disertai dengan kecenderungan fragmatism politik yang cenderung mengarah pada sentimentasi nasionalis. Jika kecenderungan tersebut terjadi pada Negara maju, maka episentrum pertumbuhan akan berbalik mengarah pada Negara berkembang. Dalam menyikapi hal tersebut kita harus banyak berbenah dan meniapkan dengan mengantisipsi perkembangan jangka panjang.Meskipun begitu, mitigasi janga pendek juga sangat diperlukan. Perekonomian kita akan terpengaruh dalam dua jalur yaitu, perdagangan dan keuangan. Dalam menyikapi pengaruh tersebut dapat menggunakan cara yaitu,Finansial, menyikapi jalur finansial yang makin tak menentu, membuat suku bunga renda sulit sulit diwujudkn dalam waktu dekat di Negara ini. Pemerintah harus mampu dan rela untuk menghadapi rezim pertumbuhan ekonomi rendah.Dan melakukan rekontruksi yang menyeluruh melalui revormasi structural.Perdagangan, dalam perdagangan ada beberapa yang perlu diantisippasi. Pada level global, ketika kemitraan trans-pasifik mandek, Cina akan melakukan kemitraan ekonomi komperhensif regional yang beranggotakan 16 negara.mereka mewakili 30 % produk domestik bruto global dan melibatkan hamper seluruh warga dunia. Hal itu sangat menguntungkan bagi Indonesia yang dimana sebagai pemeran utama.Reposisi global haris dimanfaatkan dengan mengintegrasikan diri sebaik mungkin pada level regional. Dan pada level domestik ada dua

hal yang dapat dilakukan. Pertama, mengonsolidasikan mata rantai perdagangan domestik yang dikaitkan secara langsung dengan proyek infrastuktur. Kedua, memanfaatkan ekonomi digital untuk merekatka jaringan mata rantai nilai dalam memadukan aktivitas perdangangan, investasi

Menurut **AHMAD HERI FIRDAUS**, peningkatan daya saing industri merupakan suatu pilihan yang harus dilakukan agar produksi daya saing industri dalam negri dapat bersaing di dalam maupun diluar negeri. Langkah-langkah yang nyata yang harus dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan daya saing adalam menyediakan infrastruktur industri yang terintegrasi dan tersebar diseluruh Indonesia.Infrastruktur tersebut merupakan penyediaan lokasi atau tempat pemusatan kegiatan industri yang dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas usaha industri.Pengembangan kawasan industri merupakan salah satu bentuk pengembangan wilayah yang memadukan pertimbangan-pertimbangan poteensi pembangunan daerah dengan investasi di bidang industri, terutama prasarana untuk merangsang berkembangnya kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk-produk unggulan daerah yang bersangkutan.Untuk mewujudkan hal tersebut perlu pembangunan wilayah industri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.Permasalahannya ialah kawasan industri hanya berpusat di jawa sehingga sulit berkembang.Dalam menghadapi masalah diatas diperlukan investigasi pemerintah untuk memper cepat pembangunan dan penyebaran kawasan industri di sejumlah wilayah Indonesia.Wujud investigasi tersebut harius langsung dalam membangun kawasan industri baru.Peran pemerintah tersebut memberikan dampak yang sangat urgen karena dapet mengatasi ketimpangan pembangunan, peluang membuka lapangan kerja baru, mengatasi rendahnya minat investasi swastadalam membangun industri diluar pulau jawa, mengoptimalkan potensi daerah dan berpeluang mengatasi dominasi swasta dalam kepemilikan lahan kawasan.

BAB IV
KEBIJAKAN MONETER

A. Kebijakan Moneter Suatu Konsep Teoritik

1. Definisi dan Klasifikasi Kebijakan Moneter

Secara teoritis kebijakan ekonomi suatu negara terdiri dari:

a) Kebijakan fiskal *(fiskal policy)* atau kebijakan penganggaran *(budgeting policy)*

b) Kebijakan moneter *(monetary policy)*

c) Kebijakan pendapatan *(income policy)*

d) Kebijakan ekonomi internasional *(international economy policy)*

Kebijakan moneter adalah salah satu kebijakan ekonomi makro yang berhubungan langsung dengan peredaran uang atau jumlah uang yang beredar di masyarakat. Atau dengan kata lain kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas moneter dengan menggunakan pengubah jumlah uang yang beredar dan tingkat bunga untuk mempengaruhi permintaan aggregat dan mengendalikan ketidakstabilan dalam suatu perekonomian suatu negara. Dengan kebijakan moneter, pemerintah juga dapat mengendalikan jumlah uang yang beredar, kredit dan perbankan.

Kebijakan moneter dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu

a. Kebijakan moneter yang bersifat ekspansioner : kebijakan moneter yang dilakukan melalui peningkatan jumlah uang beredar dan atau

menurunkan tingkat bunga dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat pengeluaran agregat suatu perekonomian

b. Kebijakan moneter yang bersifat kontraktif : kebijakan moneter yang dilakukan melalui pengurangan jumlah uang yang beredar dan atau meningaktkan tingkat bunga dengan tujuan untuk mengurangi tingkat permintaan agregat suatu perekonomian.

2. Tujuan Kebijakan Moneter Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU no. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilaln terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (*Inflation Targetting Framework)* dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (*Free Floating)*. Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi votalitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada tingkat tertentu.

Dalam pelaksanaanya Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melaui penetapan sasaran-sasaran moneter seperti uang beredar atau suku bunga dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara operasional, pengendalian-pengendalian sasaran moneter tersebut menggunakan instumen-instrumen , antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah.

3. Kerangka Kebijakan Moneter di Indonesia

Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan *inflation targeting framework* (ITF). Dengan kerangka ini Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintahan tersebut. Untuk

mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter dilakukan secara *forward looking* artinya perubahan stance kebijakan moneter dilakukan melalui evaluasi apakah perkembangan inflasi kedepan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang yang telah dicanangkan. Dalam kerangka kerja ini kebijakan moneter juga ditandai oleh transparasi dan akuntabilitas kebijakan kepada publik. Secara operasional, stance kebijakan moneter dierminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan (BI Rate)yang diharapkan akan memenuhi :

- Suku bunga pasar uang
- Suku bunga deposito
- Suku bunga perkreditan perbankan

Dalam kerangka *Inflation Targetting Framework*, setiap periode Bank Indonesia mengevaluasi apakah proyeksi inflansi kedepan masih sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Proyeksi ini dilakukan dengan sejumlah model dan sejumlah informasi yang dapat menggambarkan kondisi inflasi kedepan. Jika proyeksi inflansi sudah tidak kompatibel dengan sasaran, Bank Indonesia melakukan respon dengan menggunakan instrumen yang dimiliki. Misalnya jika proyeksi inflasi telah melampui sasaran maka Bank Indonesia akan cenderung melakukan pengetatan moneter.

Saat ini tidak kurang dari 42 Negara maju yang telah menerapkan rezim kebijakan monoter dengan ITF. Beberapa maanfaat penerapan ITF:

1. Kebijakan moneter lebih secara jelas terfokus.
2. Komunikasi, Transparasi, dan Akuntabilitas diperkuat.
3. Membantu dalam menurunkan/mengarahkan ekspektasi inflasi dan lebih baik dalam mengatasi kejutan inflasi.
4. Membantu dalam menurunkan Votalitas output dalam jangka menengah.
5. Teruji dalam menghadapi kejutan ekonomi yang kurang menguntungkan.
6. Relatif fleksibel dalam mengakomodasi kejutan inflasi temporer yang tidak mengganggu pencapaian sasaran inflasi jangka menengah dan,
7. Sejalan dengan independensi bank sentral dalam melaksanakan kebijakan moneter.

Bank Indonesia telah menempuh sejumlah langkah dalam memperkuat persyaratan untuk penerapan ITF, termasuk:

1. Pengembangan indikator, riset, pemodelan ekonomi untuk dasar analisis, prakiraan dan perumusan kebijakan

2. Rapat Dewan Gubernur (RDG) sebagai proses perumusan kebijakan moneter

3. Pengembangan laporan dan strategi komunikasi untuk transparansi dan akuntabilitas kebijakan moneter kepada publik

Akan tetapi selama ini operasi moneter masih menggunakan uang primer sebagai sasaran operasional. Cara ini dirasakan semakin tidak sejalan dengan penerapan kebijakan moneter dengan ITF terutama karena :

1. Hubungan antara uang primer dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi semakin tidak stabil dan mengalami hubungan terbalik.

2. Sinyal kebijakan moneter kepada pasar dan masyarakat kurang efektif

3. Respon kebijakan moneter cenderung mengarah ke belakangndan lebih sulit dilakukan

4. Uang primer lebih sulit dikendalikan oleh bank sentral karena perilaku permintaan uang kartal masyarakat di Indonesia.

5. Dalam literatur, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang menerapkan *Inflation Targeting Lite*.

4. Operasi Moneter Oleh Bank Indonesia

Dalam rangka mencapai sasaran akhir kebijakan moneter, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter melalui pengendalian suku bunga (target suku bunga). Suku bunga ke Bank Indonesia yang dikenal dengan istilah BI-Rate ditetapkan melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia.

Dalam tataran operasional , BI Rate tercermin dari pergerakan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB). PUAB adalah kegiatan pinjam meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya. Suku bunga PUAB merupakan harga yang terbentuk dari kesepakatan pihak yang meminjam dan dipinjamkan dana. Transaksi PUAB dapat berjangka waktu dari satu

hari kerja sampai dengan satu tahun, namun pada praktiknya mayoritas transaksi PUAB berjangka waktu kurang dari 3 bulan.

Agar pergerakan suku bunga PUAB tidak terlalu melebar dari BI-Rate, Bank Indonesia selalu berusaha untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan likuiditas perbankan secara seimbang sehingga terbentuk suku bunga yang wajar dan stabank indonesial.

Kebutuhan likuiditas perbankan diestimasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti:

· Operasi pemerintah

· Jatuh waktu instrumen operasi pasar terbuka

· Standing facilities serta mutasi dari uang kartal

Fakor-faktor tersebut dapat berdampak injeksi (penambahan) likuiditas maupun absorpsi (pengurangan) likuiditas di pasar uang.

Guna menentukan berapa jumlah likuiditas yang harus diserap maupun disediakan untuk menjaga keseimbangan supply and demand, Bank Indonesia perlu menetapkan target operasi moneter setiap harinya. Sebagaimana yang telah disebutkan, target operasi moneter telah mempertimbangkan faktor-faktor antonomousyang berubah ubah setiap harinya.

Gambar 1 Gambar Operasi Moneter Bank Indonesia

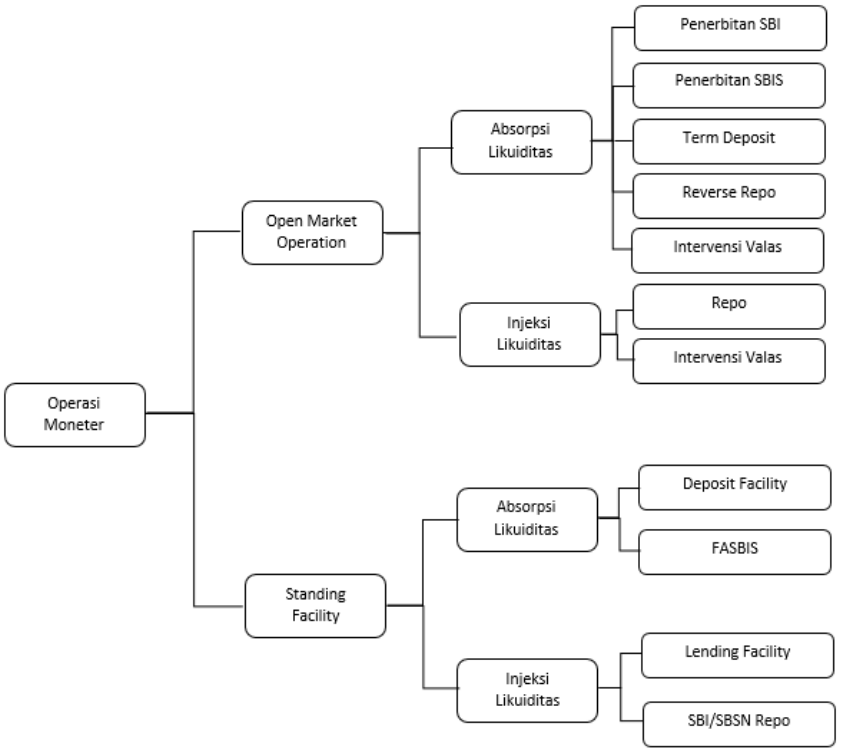

5. Bagaimana Bekerjanya Kebijakan Moneter?

Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan Stabank Indonesial. Untuk mencapai tujuan itu, Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI-Rate sebagai instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi.

Mekanisme bekerjanya perubahan BI-Rate sampai mempengaruhi inflasi tersebut sering disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme ini menggambarkan tindakan Bank Indonesia melalui perubahan-perubahan instrumen moneter dan target operasionalnya mempengaruhi berbagai variabel ekonomi dan keuangan sebelum akhirnya berpengaruh ke tujuan akhir inflasi.

Pada jalur suku bunga, perubahan BI-Rate mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Apabila perekonomian sedang mengalami kelesuhan, Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif melalui penurunan suku bunga untuk mendorong aktivitas ekonomi. Penurunan suku bunga BI-Rate menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari perusahaan rumah tangga akan meningkat. Penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan Bank Indonesianya modal perusahaan untuk melakukan investasi.

Kesimpulannya, kondisi sektor keuangan, perbankan, dan kondisi sektor riil sangat berperan dalam menentukan efektif atau tidaknya proses transmisi kebijakan moneter.

Gambar 2 AliranTransmisi Inflasi Targetting Framework (ITF)

B. Penyempurnaan *Inflation Targeting Framework (Flexible ITF)*

Tantangan kebijakan moneter di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir semakin besar terutama dengan terjdinya krisis keuangan global sejak pertengahan tahun 2007. Patut dicatat permasalahan fundamental yang menyertai krisis keuangan global tersebut yaitu adanya kebijakan moneter yang sangat akomodatif serta akumulasi cadangan devisa yang sangat besar oleh beberapa negara emerging markets, yang pada giliran-nya mendorong terjadinya ekeses likuiditas global dengan permsalahan yang terkait.

Penerapan ITF di Indonesia selama hampir lima tahun terakhir sudah mencatat beberapa keberhasilan, yaitu dengan penerapan ITF yang sudah semakin tertata dan disertai dengan peningkatan kualitas, dalam artian sesuai dengan *best practices*, pemikiran teoritis, dan kondisi empiris di Indonesia.

Bank Indonesia akan menggali dan merumuskan lima pilar pemikiran dasar dalam rangka penerapan flexible ITF di Indonesia, yaitu:

1. Pengendalian inflasi sesuai sasaran sebagai *overriding objective* kebijakan moneter.

2. Penguatan kebijakan nilai tukar dalam rangka pencapaian stabilitas harga.

3. Penguatan keterkaitan antara stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan.

4. Integrasi kebijakan moneter dengan kerangka kerja kebijakan makroprudensial melalui bauran instrumen kebijakan.

5. Optimalisasi dan penguatan kerangka kelembagaan.

Gambar 3kerangka kerja kebijakan fleksibel ITS

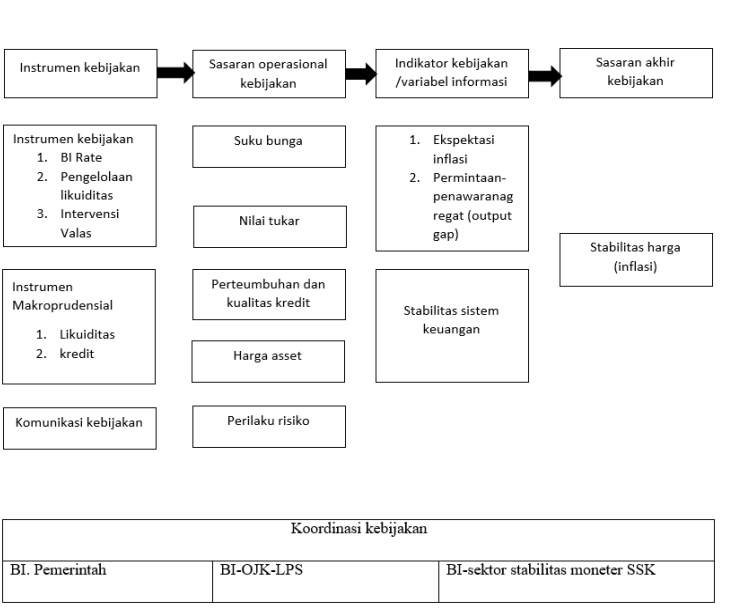

C. Instrumen Operasi Moneter

Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh BI dalam rangka pengendalian moneter melalui operasi pasar terbuka dan koridor suku bunga *(standing facility)*. Operasi Pasar Terbuka (OPT) adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh BI dengan bank dan/atau pihak lain dalam rangka operasi moneter.

1. Operasi Moneter Pasar Terbuka

Kegiatan Operasi Pasar Terbuka (OPT) meliputi :

a) Absorpsi Likuiditas (penerbitan SBI, term deposit, reverse repo dan penerbitan SBIS)

b) Injeksi likuiditas (transaksi repo)

2. Operasi Moneter : Standing Facilities

Standing facilities meliputi penyediaan dana rupiah, dilakukan dengan mekanisme repo surat berharga, penempatakan dana rupiah oleh Bank di Indonesia dan dilakukan dengan menempatkan dana rupiah oleh bank secara jangka pendek di Bank di Indoneia.

3. Operasi Moneter : Syariah

Operasi moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka dan penyediaan *standing facilities* berdasrkan prinsip syariah.

Tujuan dari operasi moneter syariah adalah :

a. mencapai target operasional pengendalian operasi moneter syariah d.r mendukung pencapaian akhir kebijakan moneter BI

b. Target operasional berupa kecukupan likuiditas perbankan syariah atau variabel lain yang ditetapkan BI.

Kegiatan Operasi Moneter Syariah (OMS) dilakukan dalam bentuk antara lain: OPT syariah dan standing facilities syariah.

4. Proyeksi Likuiditas

Efektivitas operasi moneter berbasis suku bunga tidak terlepas dari adanya informasi yang handal dan sama kepad aseluruh pelaku pasar, sehingga tercipta persepsi yang sama untuk mencapai tujuannya,

menggunakan kondisi likuiditas perbankan kepada pelaku pasar dan masyarakat sebanyak dua kali setiap harinya melalui website Bank Indonesia, BI-SSS dan sarana lainnya.

Pengumuman Proyeksi likuiditas meliputi dua materi utama yaitu:

a) Proyeksi Total Likuiditas Tersedia

Adalah perkiraan ketersediaan likuiditas rupiah di pasar dan merupakan hasil proyeksi dari net perubahan faktor otonomous yang berperan dalam menambah atau mengurangi ketersediaan likuiditas rupiah.

b) Proyeksi Excess Reserve

Adalah selisih antara perkiraan saldo giro perbankan di Bank Indonesia dengan kewajiban pemeliharaan Giro Wajib Minimum. Proyeksi *excess reserve* tersebut mencerminkan besarnya likuiditas rupiah yang berada di sistem perbankan setelah dilakukan operasi moneter.

D. Penyempurnaan Operasi Moneter

1. Perpanjangan Profil Jatuh Waktu Sertifikat Bank Indonesia

Dalam rangka menyempurnakan operasi moneter, Bank Indonesia akan memperpanjang profil jatuh waktu Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Perubahan tersebut akan dilakukan dari mingguan menjadi bulanan dan melakukan penyerapan ekses likuiditas rupiah dengan lebih mengutamakan SBI 3 bulan dan SBI 6 bulan.

Perpanjangan profil sertifikat Bank Indonesia (PP-SBI) adalah upaya memperpanjang profil jatuh waktu sertifikat Bank Indonesia dari mingguan menjadi bulanan. Upaya ini merupakan bagian dari penyempurnaan operasi moneter yang dilakukan secara berkesinambungan. Latar belakang dan tujuan Bank Indonesia melakukan PP-SBI adalah bahwa ekses likuiditas di pasar uang yang ditempatkan di SBI dengan profil jatuh waktu yang terlalu pendek (mingguan) dan selalu diperpanjang tidak mendorong berkembangnya transaksi di pasar uang.

2. Perpanjangan Profil Sertifikat Bank Indonesia (PP-SBI) Dilakukan Dengan Tujuan

Pelaksanaan lelang dari mingguan menjadi bulanan diharapkan dapat mendorong bank untuk mengelola likuiditasnya dengan horizon yang lebih

panjang. Penyerapan ekses likuiditas dengan lebih mengutamakan SBI 3 dan 6 bulan diharapkan dapat mendorong berkembangnya transaksi di pasar uang dan pelaksanaan operasi moneter dalam mengelola likuiditas dapat lebih efektif.

3. Lelang SBI Dapat Memiliki Tenor di Luar Kebiasaan

Lelang SBI masih dilaksanakan mingguan, kemudian secara bertahap menjadi dwi-mingguan, dan menjadi bulanan. Dalam rangka menjaga kecukupan likuiditas agar stabilitas suku bunga bank tetap terjaga, Bank Indonesia akan lebih aktif memonitor perkembangan pasar dan tetap mengoperasi pasar tebukaimalkan penggunaan instrumen operasi moneter, yaitu :

a) Instrumen *standing facilities*

b) Instrumen lainnya (FTK, reverse, repo)

4. Paket Kebijakan Penguatan Manajemen Moneter dan Pengembangan Pasar Keuangan

Untuk merespon dan mengantisipasi berbagai dinamika pasar keuangan domestik maupun global, Bank Indonesia mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan efektitivitas transmisi kebijakan moneter, memperkuat stabilitas bank sistem keuangan, serta mendorong pendalaman pasar keuangan. Paket kebijakan yang Bank Indonesia secara umum berupa kebijakan untuk memperkuat operasi moneter dan menyempurnakan aspek prudential perbankan.

5. Transparansi dan Komunikasi

Kebijakan moneter Bank Indonesia senantiasa dikomunikasikan secara transparan di masyarakat. Komunikasi tersebut juga sebagai bagian dari akuntabilitas Bank Indonesia. Kebijakan moneter berperan dalam membantu pembentukan ekspektasi masyarakat terhadap inflasi kedepan. Melalui komunikasi, Bank Indonesia mengajak masyarakat untuk memandang dan membentuk tingkat tingkat inflasi kedepan sebagaimana yang ditetapkan dalam sasaran yang diumumkan.

Oleh karenanya komunikasi kebijakan moneter dilakukan secara terus menerus memuat pengumuman dan penjelasan tentang:

a) sasaran inflasi kedepan

b) analisis Bank Indonesia terhadap terhadap perekonomian

c) kerangka kerja dan langkah-langkah kebijakan moneter yang telah dan akan ditempuh

d) jadwal Rapat Dewan Gubernur (RDG)

e) hal-hal lain yang ditetapkan oleh dewan gubernur

komunikasi kebijakan moneter dilakukan dalam bentuk:

a) siaran pers

b) konferensi pers setelah rapat dewan gurbernur

c) publikasi tinjauan atau laporan kebijakan moneter

dalam hal sasaran inflasi untuk satu tahun tidak tercapai, maka Bank Indonesia menyampaikan penjelasan kepada pemerintah sebagai bahan penjelasan pemerintah bersama Bank Indonesia secara terbuka kepada DPR dan masyarakat.

6. Statemen Kebijakan Moneter

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pad atanggal 9 Juni 2011 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 6,75%. Dewan gubernur memandang kondisi perekonomian terus meningkat yang disertai dengan berlanjutnya aliran masuk modal asing dan kecenderungan atau arah penguatan nilai tukar rupiah meskipun pada tingkat yang lebih rendah. Tekanan inflasi cenderung menurun , khususnya dengan berlanjutnya koreksi harga pangan. Ke depan Bank Indonesia tetap mewaspadai sejumlah resiko yang berpotensi memberikan tekanan pada stabilitas makro ekonomi, khususnya masih akan berlanjutnya arus modal asing, semakin kuatnya permintaan domestik dan dan meningkatnya tekanan inflasi.

BAB V
KRISIS EKONOMI

A. Jenis Krisis Ekonomi dan Jalur Transmisi Dampaknya

Suatu perubahan ekonomi dapat menjelma menjadi suatu krisis ekonomi. Dilihat dari proses terjadinya, Krisis ekonomi mempunyai dua sifat yang berbeda. Pertama, krisis ekonomi yang terjadi secara mendadak atau muncul tanpa ada tanda-tanda sebelumnya,yang umum di sebut goncangan ekonomi tak terduga. Misalnya, kenaikan harga minyak mentah yang sangat besar di pasar internasional pada tahun 1974, yang dilakukan oleh OPEC (organization of petroleum Exporting Countries) adalah organisasi tempat berkumpulnya negara-negara pengekspor minyak. Kenaikan harga tersebut merupakan suatu reaksi keras dari negara-negara di kawasan timur tengah terhadap keberpihakan negara-negara barat terutama AS dan eropa barat terhadap israel yang sedang terlibat suatu perang besar dengan negara-negara arab, khususnya mesir, suria, irak dan yordania. Oleh karena itu, dunia atau negara-negara pengimpor minyak, termasuk AS, eropa barat (atau sekarang Uni Eropa/UE), jepang dan cina, kenaikan harga minyak tersebut disebut sebagai krisis minyak.

Sedangkan bagi Indonesia saat itu masih menjadi salah satu pengekspor minyak di dunia, peristiwa tersebut merupakan suatu keuntungan besar (oil boom) yang memberikan masukan yang sangat besar (yang tidak terduga sebelumnya) bagi pemerintah.

Krisis lainya yaitu krisis keuangan asia yang terjadi pada periode 1997-1998 yang juga melanda Indonesia bisa juga masuk di dalam kategori ini, walaupun bagi Indonesia derajat kedadakanya jauh lebih rendah di bandingkan krisis minyak tahun 1974 bagi negara-negara pengimpor

minyak. Karena sebelum ekonomi Indonesia di landa krisis Asia tersebut, ekonomi thailand sudah terlebih dahulu tergoncang oleh krisis tersebut.

Beberapa bulan setelah uang thailand, bath mengalami suatu depresiasi yang besar, rupiah mulai ikut goncang yang terjadi sekitar pertengahan tahun 1997 yang mencapai klimaknya pada pertengahan pertama tahun 1998, saat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sampai mencapai di atas Rp 10.000, di bandingkan sebelumnya sekitar 2000 rupiah per satu dolar AS pada awal tahun 1997.

Sedangkan krisis ekonomi yang sifatnya tidak mendadak,melainkan melewati suatu proses akumulasi yang cukup panjang,adalah seperti krisis ekonomi global yang terjadi pada periode 2008-2009.

Krisis ini diawali dengan suatu krisis keuangan yang paling serius yang pernah terjadi di AS setelah depresiasi pada dekade 30-an, yang pada akhirnya merembet ke negara-negara maju lainnya seperti Jepang dan Eropa lewat keterkaitan-keterkaitan keuangan global. Setelah beberapa bulan kemudian ekonimi dunia mulai mengalami resesi yang ditandai dengan penurunan pendapatan dan permintaan global yang juga berimbas pada perekonomian Indonesia dan banyak negara lainnya di dunia.

Suatu krisis ekonomi disuatu negara atau wilayah bisa berasal dari luar atau dari dalam negara/wilayah tersebut. Bersumber dari dalam, misalnya, penurunan produksi suatu komoditas secara secara mendadak. Disektor pertanian, misalnya, gagal panen akibat perubahan cuaca ekstrim yang tidak terantisipasi sebelumnya, atau karena bencana alam karena banjir besar yang menggenangi lahan persawahan. Bersumber dari luar adalah seperti krisis ekonomi global 2008-2009 (terkecuali bagi AS, krisis ini berasal dari dalam), atau krisis minyak pertama pada tahun 1974 atau kedua pada tahun 1979 bagi negara-negara pengimpor minyak.

Krisis-krisis ekonomi yang berasal dari sumber-sumber yang berbeda juga mempunyai proses-proses atau jalur transmisi dampak yang berbeda, dan sektor-sektor ekonomi yang langsung terkena dampaknya juga berbeda.

Tergantung pada sifat dan besarnya keterkaitan produksi, asumsi, dan investasi dari sektor-sektor tersebut dengan sisa dari ekonomi domestik, krisis-krisis ekonomi dengan sumber-sumber berbeda akhirnya membentuk dampak total yang juga berbeda terhadap ekonomi suatu negara.

Berikut ini akan dibahas sejumlah tipe krisis ekonomi yang mana dunia atau banyak negara pernah mengalaminya dalam 50 tahun belakangan ini, atau yang kemungkinan besar akan terjadi lagi dimasa mendatang.

1. Krisis Produksi

Krisis produksi adalah termasuk tipe krisis ekonomi yang bersumber dari dalam negeri. Krisis tersebut bisa dalam bentuk penurunan produksi domestik secara mendadak dari sebuah (atau sejumlah) komoditas pertanian, misalnya, padi/beras.

Penurunan produksi tersebut berakibat langsung pada penurunan tingkat pendapatan riil dari para petani dan buruh tani padi. Di wilayah-wilayah (misalnya, provinsi-provinsi di Indonesia) dimana produksi padi merupakan sektor ekonomi kunci, tidak hanya dalam bentuk pangsa output di dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga sebagai sumber terbesar bagi kesempatan kerja atau pendapatan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut, jumlah rumah tangga yang mengalami penurunan pendapatan akan sangat banyak. Hal ini adalah dampak langsung dari krisis tersebut.

Selanjutnya, apabila padi/beras selain dikonsumsi langsung juga digunakan sebagai bahan baku utama oleh sektor-sektor ekonomi lainnya, misalnya, industri makanan dan minuman, maka volume produksi, kesempatan kerja dan pendapatan disektor-sektor terkait juga akan mengalami penurunan. Hal ini merupakan efek tidak langsung dari krisis tersebut. Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan diwilayah-wilayah tersebut akan mengalami peningkatan yang besar.

Salah satu hipotesanya adalah sebagai berikut : apabila suatu sektor terhimbas oleh suatu krisis ekonomi, maka semakin penting sektor tersebut bagi ekonomi disuatu wilayah (semakin besar kontribusi output dari sektor itu terhadap pembentukan PDRB dan kesempatan kerja diwilayah tersebut), semakin besar dampak negatif dari krisis tersebut terhadap kemiskinan, atau peningkatan jumlah orang yang hidup dibawah garis kemiskinan semakin besar diwilayah itu.

2. Krisis Perbankan

Dampak langsung atau fase pertama dari efek krisis perbankan adalah kesempatan kerja dan pendapatan yang menurun disubsektor keuangan

tersebut. Pada fase kedua, krisis perbankan merembet ke perusahaan-perusahaan yang sangat tergantung pada sektor perbankan dalam pembiayaan kegiatan-kegiatan produksi/ bisnis mereka.

Perusahaan-perusahaan tersebut tidak bisa lagi mendapatkan pinjaman dari perbankan karena subsektor keuangan tersebut sedang mengalami kekurangan dana atau bangkrut, atau perusahaan-perusaahn masih bisa mendapatkan kredit tetapi dengan tingkat suku bunga pinjaman (R) yang jauh lebih tinggi dibandingkan pada saat perbankan dalam keadaan normal.

Kenaikan suku bunga ini disebabkan terutama oleh permintaan kredit dari dunia usaha yang besar, disatu sisi, dan disisi lain dana yang terkumpul dari pihak ketiga (masyarakat) untuk disalurkan sebagai kredit usaha terbatas.

Selama periode krisis keuangan Asia (1997-1998), misalnya, banyak perusahaan-perusahaan besar, khususnya konglomerat, di Indonesia terpaksa megurangi kegiatan bisnis dan produksi mereka atau bahkan harus tutup karena salah satu penyebabnya adalah kekurangan dana pinjaman dari perbankan. Akibat selanjutnya dari krisis keuangan yang dialami oleh perusahaan-perusahaan tersebut adalah terjadinya pemberhentian pekerja (PHK).

Gambar 4Krisis Perbankan dan Dampaknya terhadap Kemiskinan

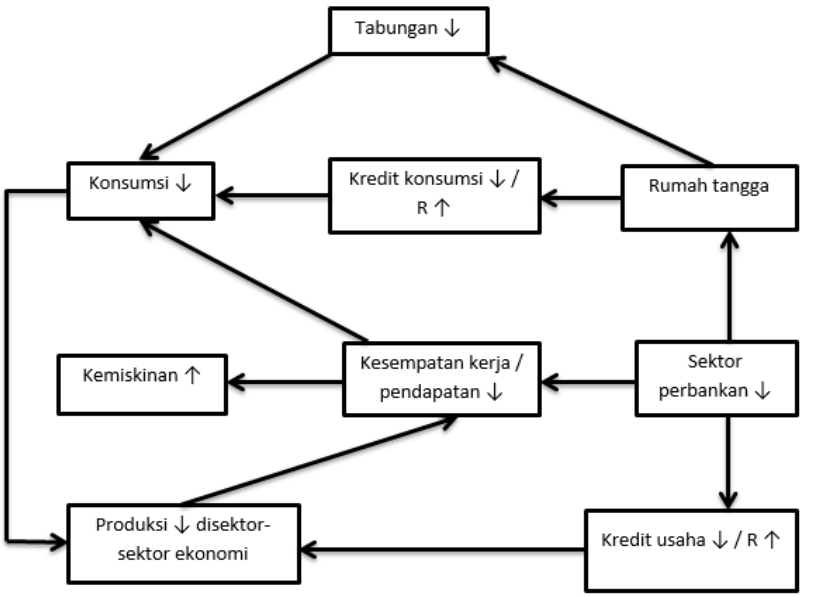

Dalam tipe krisis ekonomi ini, jalur-jalur transmisi paling utama lewat mana krisis tersebut berdampak pada tingkat kemiskinan yakni perubahan dalam arus kredit dari perbankan ke dunia usaha atau tingkat suku bunga pinjaman, volume produk (output), jumlah kesempatan kerja, dan tingkat pendapatan masyarakat. kelompok-kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap krisis ini adalah bukan masyarakat miskin seperti dalam kasus krisis produksi pertanian yang telah dibahas sebelumnya, melainkan masyarakat kelas menengah dan atas seperti pegawai dan pemilik bank.

3. Krisis Nilai Tukar

Suatu perubahan kurs dari sebuah mata uang, misalnya rupiah terhadap dolar AS dianggap krisis apabila kurs dari mata uang tersebut mengalami penurunan atau depresiasi yang sangat besar yang prosesnya mendadak atau berlangsung terus-menerus yang membentuk sebuah tren yang meningkat (rupiah per satu dolar AS). Dampak langsung dari perubahan tersebut adalah pada ekspor dan impor (Gambar 4.3). Paling tidak, menurut teori konvensional mengenai perdagangan internasional, depresiasi nilai tukar dari suatu mata uang terhadap misalnya dolar AS yang membuat daya saing harga (dalam dolar AS) dari produk-produk buatan negara dari mata uang tersebut membaik, yang selanjutnya membuat volume ekspornya meningkat.

Tentu teori ini didasarkan pada asumsi bahwa faktor-faktor lain yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung volume ekspor konstan tidak berubah. Berikutnya, kenaikan volume ekspor menambah voume produksi dan meningkatkan jumlah kesempatan kerja di perusahaan-perusahaan eksportir.

Jika perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai keterkaitan produksi-produksi ke belakang yang kuat dengan perusahaan-perusahaan disektor-sektor hulu seperti perusahaan-perusahaan pemasok bahan baku, barang-barang setengah jadi, dan barang-barang modal dan pembantu, maupun keterkaitan produksi ke depan dengan perusahaan-perusahaan di sektor-sektor hilir seperti transportasi, komunikasi, distributor, dan jasa pemasaran,maka kenaikan volume ekspor tidak hanya meningkatkan pendapatan dikelompok perusahaan eksportir tetapi juga diperusahaan-perusahaan hulu dan hilir tersebut.

Gambar 5Krisis Nilai Tukar dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan

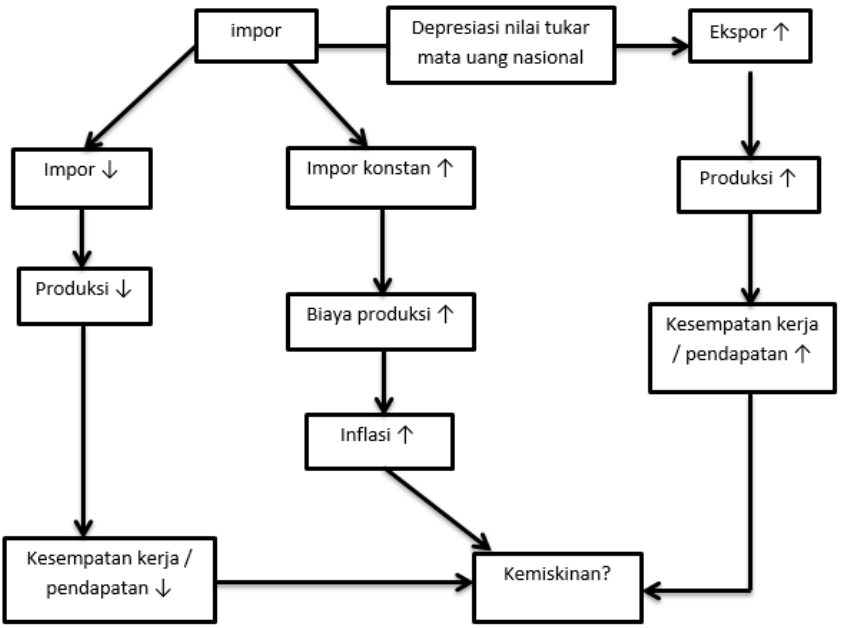

Dari pembahasan diatas, terlihat jelas bahwa depresiasi nilai tukar suatu mata uang pada dasarnya berdampak positif terhadap ekonomi, dari negara yang mata uangnya mengalami pelemahan lewat sisi ekspor dan berdampak negatif lewat sisi impor.

Oleh karena itu, efek neto dari krisis nilai tukar terhadap kemiskinan bisa negatif, positif / 0, tergantung pada selisih antara kedua efek tersebut. Efek netonya positif apabila efek ekspornya lebih besar dari pada efek impornya, atau kenaikan produksi dan kesempatan kerja didalam negeri karena volume ekspor meningkat lebih besar dari pada penurunan produksi dan kesempatan kerja akibat impor bahan baku menurun atau biaya produksi meningkat (untuk kasus volume impor tetap). Sebaliknya, efek netonya negatif apabila efek ekspor lebih kecil dari pada efek impor, atau efek netonya 0 apabila efek positifnya sama besarnya dengan efek negatifnya, misalnya, produksi bertambah di perusahaan-perusahaan eksportir dalam jumlah yang sama dengan produksi yang merosot diperusahaan-perusahaan yang mengalami kenaikan biaya produksi dan terpaksa mengurangi impor

bahan baku, dengan asumsi rasio-rasionya, diantaranya elastisitas produksi dari kesempatan kerja, didua kelompok perusahaan tersbut konstan.

4. Krisis Perdagangan

Dalam hal krisis-krisis ekonomi yang berasal dari sumber-sumber eksternal, ada dua jalur utama, yaitu perdagangan dan investasi atau arus modal. Dalam jalur perdagangan itu sendiri ada dua subjalur, yaitu ekspor dan impor (barang dan jasa).

Dalam jalur ekspor, misalnya ekspor barang, suatu krisis bagi negara eksportir bisa terjadi baik karena harga dipasar internasional dan komoditas yang diekspor turun secara drastis atau permintaan dunia terhadap komoditas tersebut menurun secara signifikan. Sebagai contoh, harga dunia atau permintaan pasar global bagi ekspor-ekspor utama Indonesia dari komoditas-komoditas pertanian menurun, maka pendapatan petani dan buruh tani dari komoditas-komoditas tersebut didalam negeri juga merosot.

Proses ini tidak akan berhenti disini, seperti halnya dengan tipe-tipe krisis ekonomi lainnya yang telah dibahas sebelumnya, di dalam kasus ini juga ada suatu efek penggandaan didalam ekonomi: penurunan pendapatan petani dan buruh tani membuat permintaan konsumsi maupun permintaan perantara(antar sektor) di perdesaan berkurang, sebagai suatu hasil akhir, pendapatan riil masyarakat perkapita menurun dan tingkat kemiskinan meningkat di perdesaan.

5. Krisis Modal

Terakhir, suatu pengurangan modal didalam negeri dalam jumlah besar atau penghentian bantuan serta pinjaman luar negeri akan menjadi sebuah krisis ekonomi bagi banyak negara miskin didunia, seperti di Afrika dan Asia Tengah yang ekonomi mereka selama ini sangat tergantung pada Utang Luar Negeri (ULN) atau hibah internasional.

Suatu pelarian modal, baik yang berasal dari sumber dalam negeri maupun modal asing, terutama investasi asing jangka pendek (yang umum disebut “uang panas”), dalam jumlah yang besar dan secara mendadak bisa menjelma menjadi sebuah krisis besar bagi ekonomi dari negara-negara yang sangat memerlukan modal investasi proses mulai dari larinya modal keluar negeri hingga menjadi sebuah krisis ekonomi sangat sederhana : dana investasi didalam negeri berkurang, investasi (pembentukan modal

tetap bruto) menurun, kegiatan volume produksi dan tingkat produktifitas menurun, pertumbuhan ekonomi merosot, jumlah angkatan kerja (penduduk dalam kategori umur antara 15 hingga 65 tahun) yang bisa bekerja (terutama disektor formal) berkurang, tingkat pendapatan riil menurun, dan pada akhirnya, tingkat kemiskinan bertambah. Di sisi lain suatu pelarian modal dalam jumlah besar akan menyebabkan depresiasi nilai tukar mata uang dari negara bersangkutan seperti yang telah dibahas sebelumnya.

Rangkuman dari pembahasan semula tipe krisis ekonomi tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat laju inflasi dan jumlah kesempatan kerja atau jumlah orang yang nganggur adalah penentu-penentu utama dari kemiskinan. Kedua variabel ekonomi makro dianggap sebagai jalur-jalur transmisi kunci lewat mana sebuah krisis ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Naik turunnya jumlah pengangguran pada gilirannya adalah sebuah fungsi negatif (positif) dari perubahan output agregat Produk Domestik Bruto (PDB), dan laju inflasi tergantung negatif pada PDB itu sendiri adalah sebuah fungsi dari variabel-variabel ekonomi makro lainnya, pembentukan modal tetap bruto termasuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan saldo neraca perdagangan (ekspor minus impor untuk barang dan jasa).

B. Jalur Transmisi Kunci dan Indikator Monitoring Dampak Krisis

Bagian pertama dari bab ini telah membahas beberapa tipe dari krisis ekonomi dunia yang pernah dialami dalam setengah abad terakhir ini dan kemungkinan besar akan muncul lagi dimasa depan, melihat kenyataan bahwa perekonomian dunia (khususnya perdagangan, produksi, investasi, keuangan dan pasar faktor produksi) semakin terintegrasi.

Dengan kata lain, saat ini jauh lebih sulit menemukan negara-negara di dunia yang tidak mempunyai hubungan perdagangan, investasi, atau dalam bentuk lainnya yang disebutkan diatas (jika masih ada, jumlahnya jauh lebih sedikit) dibandingkan 50 tahun yang lalu, atau sebelum perang dunia ke II.

Tabel 1Jalur-jalur Transmisi dampak utama dan Indikator-indikator utama untuk memonitor pengaruh dari krisis ekonomi menurut Tipe krisis

Tipe krisis ekonomi	Jalur-Jalur Transmisi Utama	Indikator-indikator utama untuk memonitor dampak
Krisis produksi	Kesempatan kerja* Pendapatan* Inflasi*	Output menurut sektor dan wilayah Kesempatan kerja menurut sektor dan wilayah Pendapatan menurut sektor dan wilayah Inflasi menurut wilayah Kemiskinan menurut wilayah
Krisis perbankan	Kredit* Suku bunga pinjaman* Output* Kesempatan kerja* Pendapatan*	Output menurut sektor dan wilayah Kesempatan kerja menurut sektor dan wilayah Pendapatan menurut sektor dan wilayah Kemiskinan menurut wilayah
Krisis nilai tukar	Eksport* Import* Output** Kesempatan kerja*** Pendapatan***.**** Inflasi***	Eksport menurut sektor dan wilayah Impor menurut sektor dan wilayah Output menurut sektor dan wilayah Inflasi menurut wilayah Kesempatan kerja menurut sektor dan wilayah Pendapatan menurut sektor dan wilayah Kemiskinan menurut wilayah
Krisis ekspor	Output* Kesempatan kerja** Pendapatan**.***	Ekspor menurut sektor dan wilayah Output menurut sektor dan wilayah Kesempatan kerja menurut sektor dan wilayah Pendapatan menurut sektor dan wilayah Kemiskinan menurut wilayah
Krisis impor	Output* Kesempatan kerja** Pendapatan** Inflation**	Output menurut sektor dan wilayah Kesempatan kerja menurut sektor dan wilayah Pendapatan menurut sektor dan wilayah Kemiskinan menurut wilayah Inflasi menurut wilayah
Krisis modal	Output* Nilai tukar* Kesempatan kerja** Pendapatan** Inflasi**	Output menurut sektor dan wilayah Kesempatan kerja menurut sektor dan wilayah Pendapatan menurut sektor dan wilayah Inflasi menurut wilayah Kemiskinan menurut wilayah

C. Analisis Empiris

1. Krisis Keuangan Asia 1997-1998

Krisis keuangan asia muncul sekitar pertengahan tahun 1997 dan sampai klimaksnya pada tahun 1998 dipicu awalnya oleh larinya modal, terutama modal asing jalur pendek. Dari Thailand, secara tiba-tiba dan dalam jumlah yang tidak kecil, cukup kuat untuk membuat banyak investor dan pengusaha gugup dalam menanggapinya. Pelarian tersebut mengakibatkan nilai tukar bath terhadap dolar AS terdepresiasi dalam jumlah yang besar. Dalam jangka waktu yang tidak lama, hal yang sama juga terjadi di Indonesia yang membuat nilai tukar rupiah terdapat dolar AS melemah.

Menjelang pertengahan tahun 1997 ekonomi-ekonomi asia, khususnya Indonesia, Thailand, Malaysia dan Korea Selatan mulai menunjukkan kecenderungan memanas, yang salah satu tandanya adalah laju inflasi yang mulai merangkak naik.

Beberapa dari sejumlah indikator makro ekonomi lainnya juga menunjukkan suatu bahaya terselubung. Terutama neto tabungan investasi yang negatif, yang menandakan bahwa di negara-negara tersebut selama itu menjelang munculnya krisis tersebut telah terjadi suatu kelebihan investasi yang besar.

Hal ini memang berpotensi menjadi penyebab suatu krisis ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 1997-1998 itu, terutama jika sebagian besar dari kelebihan investasi tersebut (sebagian dari kebutuhan invesatsi tidak dapat ditutup oleh tabungan dalam negeri) dilakukan disektor-sektor yang tidak diperdagangakan secara internasional, seperti apartemen, pertokoan, dan konstruksi lainnya.

Juga nilai neraca fiskal (selisih antara pemasukan pemerintahan dari pajak dll) dengan pengeluaran pemerintah, atau dalam kasus indonesia adalah anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang menjelang tahun 1998 saldonya semakin defisit, dan biasanya menimbulkan kenaikan utang, khususnya dari luar negeri.

Juga defisit keuangan pemerintah yang berkelanjutan atau cenderung membesar terus besar memberi suatu indikasi bahwa suatu saat pemerintah tidak sanggup lagi berperan didalam ekonomi lewat pengeluarannya secara

optimal, dan suatu hal yang negatif bagi kelangsungan ekonomi, khususnya ekonomi yang sangat tergantung pada pengeluaran pemerintah.

Hubungan antara depresiasi nilai tukar rupiah dengan krisis keuangan yang dialami oleh banyak bank di Indonesia disebabkan oleh dua hal utama.

Pertama, banyak bank di Indonesia pada era orde baru menggunakan pinjaman luar negeri jangka pendek sebagai modal kredit dalam rupiah yang diberikan kepada dunia usaha.

Parahnya, kredit rupiah dengan utang luar negeri tersebut digunakan oleh sektor swasta untuk investasi-investasi jangka panjang seperti pembangunan perumahan atau apartemen-apartemen mewah, mall-mall, gedung-gedung perkantoran, dan pertokoan dan lapangan golf yang semua ini adalah proyek-proyek investasi dengan waktu kembali muda lebih dari 10 tahun.

Kedua, banyak bank didalam negeri mengalami erugian-kerugian besar karena banyakknya kredit yang macet, tidak hanya kantor sesama bank tetapi juga perusahaan-perusahaan besar didalam negeri sebagai debitur-debitur bank tersebut yang tidak bisa mengembalikan pinjamann mereka karena mereka sendiri mengalami kerugian akibat depresiasi rupiah.

Kebanyakan pinjaman internasional dilakukan oleh sektor swasta yang melakukan pinjaman jangka pendek yang dipakai untuk membiayai pembangunan proyek-proyek jangka panjang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini satu kesalahan besar lainnya yaitu perusahaan-perusahaan banyak meminjam uang dari luar negeeri tidak melindungi pinjaman-pinjaman mereka dalam bentuk melakukan hedging (mematok kurs jangka panjang atau masa depan pada suatu tingkat tertentu untuk memperkecil dampak negatif terhadap keuangan perusahaan akibat adanya perbedaan kurs selama periode transaksi atau impor), karena para pemilik perusahaan tersebut sangat percaya bahwa soeharto akan terus bertahan sebagai presiden dan dia tetap akan konsisten dengan sistem penentuan kurs "setengah tetap", yang artinya kurs rupiah tidak akan mengalami perubahan selama Soeharto berkuasa. Bank-bank nasional yang meminjam uang dari luar negeri juga tidak melakukan hedging. Maka dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dengan sendirinya banyak perusahaan dan bank terjerumus kedalam krisis keuangan yang sangat serius.

Dengan jatuhnya nilai tukar rupiah dan pada waktu bersamaan tingkat suku bunga dipasar uang sangat tinggi serta sektor perbankan rontok, krisis tersebut pertama-tama menghatam kelompok masyarakat berpendapat menengah dan tingggi diperkotaan, seperti pegawai dan pemilik bank dan perusahaan-perusahaan besar yang menggantungkan diri pada pendanaan perbankan dan impor bahan baku, barang-barang modal, dan pembantu dan input lainnya. Sedangkan usaha-usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pada umumnya beroperasi pada sektor informal yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat berpendapatan rendah atau miskin dan lebih tahan terhadap goncangan.

Kelompok usaha ini pada umumnya relatif lebih fleksibel dalam mengubah atau berpindah kegiatan dari satu jenis usaha kejenis usaha lainnya jika produksi atau pasarnya untuk jenis usaha yang sedang dilakukan mengalami masalah, lebih sedikit ketergantungannya kepada impor (jika tidak terlalu dipengaruhi oleh depresiasi kurs rupiah), dan hanya sedikit dari mereka yang menggunakan dan perbankan untuk mendanai kegiatan-kegiatan usaha mereka (jadi tidak terlalu terpengaruh oleh tingginya tingkat suku bunga perbankan).

Bisa dibayangkan, betapa beratnya beban indonesia untuk membayar cicilan plus bunga dari ULN selama periode 1997-1998, saat rupiah mengalami depresiasi yang besar terhadap dolar AS. Besarnya pembayaran cicilan ULN plus bunganya, sebagai suatu persentase dari nilai ekspor meningkat terus dari sekitar 13,9% pada tahun 1990 menjadi 30,9% pada tahun 1995.

Angka terakhir ini artinya dari setiap satu dolar AS hasil ekspor indonesia, sekitar 1,31% harus digunakan untuk melunasi kewajiban luar negeri jadi hanya sekitar 69%nya bisa digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi dan lainnya didalam negeri.

2. Krisis Ekonomi Global 2008-2009

Krisis ekonomi global 2008-2009 dipicu oleh suatu krisis keuangan yang besar di Amerika Serikat pada tahun 2007 dan melalui keterkaitan keuangan global krisis tersebut menjalar kesebagaian besar dunia, terutama negara-negara maju seperti Jepang dan UE yang secara ekonomi dan keuangan sangat terintegrasi dengan Amerika Serikat oleh banyak ekonomi dunia, krisis ini disebut sebagai krisis ekonomi paling serius setelah depresi ekonomi besar yang terjadi pada dekade 30-an.

Krisis tersebut mempengaruhi secara negatif kegiatan-kegiatan bisnis kunci di dunia terutama sektor-sektor keuangan dan perdagangan, yang selanjutnya menurunkan laju pertumbuhan ekonomi global dan tingkat pendapatan riil perkapita di dunia.

Banyak bank dan perusahaan asuransi besar disejumlah negara, khususnya negara-negara maju yang mengalami kebangkrutan, harga-harga indeks dibursa-bursa kunci juga berguguran, dan harga-harga dipasar dunia dari sejumlah komoditas serta aset merosot.

Krisis 2008-2009 tersebut mempengaruhi banyak negara melalui sejumlah jalur, yaitu ekspor, investasi termasuk Penanaman Modal Asing (PMA), dan pengiriman uang dari pekerja-pekerja migran.

Namun demikian, jalur paling utama untuk sebagian besar negara-negara yang terkena dampaknya adalah ekspor, Karena ekspor merupakan jalur transmisi yang memiliki dampak paliing utama bagi kebanyakan negara, terutama negara-negara yang berorientasi ekspor seperti yang telah disebutkan diatas, maka krisis ekonomi global 2008-2009 (berbeda dengan kasus krisis 1997-1998) bagi banyak negara, termasuk indonesia, merupakan sebuah krisis permintaan dunia (krisis pasar ekspor).

Di negara besar seperti Indonesia yang terdiri atas berbagai pulau yang jumlahnya sangat banyak dan pembagian wilayah administrasi (provinsi, kabupaten, kota dan kecamatan) dalam jumlah yang juga banyak dengan kondisi dan karakterisik (terutama dalam fisik, ekonomi, demografi, kelembagaan, pelayanan publik, dan sosial budaya) yang berbeda, dampak dari krisis 2008-2009 tersebut bisa berbeda antar wilayah.

Dampaknya bisa sangat parah disejumlah wilayah dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya, atau bahkan dibandingkan dwengan dampaknya pada tingkat nasional. Misalnya, laju penurunan pendapatan rata-rata perorang atau RT di Jawa (lokasi dari sebagian besar perusahaan diindustri manufaktur yang berorientasi ekspo seperti tekstil dan pakaian, alas kaki, barang-barang dari rotan, bambu dan kayu atau termasuk mebel, dan makanan dan minuman) lebih besar dari wilayah lainnya di Indonesia. Provinsi dari sejumlah individu atau RT yang terkenal dampaknya di Jawa sangat besar, maka sangat mungkin total pendapatan diJawa akan menurun dalam suatu jumlah atau persentase yang lebih besar dari pada yang terjadi diwilayah lainnya di Indonesia atau dibandingkan pada tingkat nasional (efek-efek tingkat meso).

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, banyak NB diasia yang terkena pengaruh negatif dari krisis 2008-2009 tersebut, walaupun pada awalnya negara-negara itu, termasuk Indonesia, masih kelihatan adem-adem saja seakan-akan tidak terjangkau oleh dampaknya.

Berdasarkan data kuartalan mengenai laju pertumbuhan ekonomi diasia tenggara untuk periode 2008-2009, negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Filiphina dan Indonesia masih menunjukkan daya tahan terhadap krisis tersebut pada tahun 2008.

Pada tahun itu, mereka masih sanggup mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif, walaupun lajunya berfariasi antar kuartal dan menurut negara. Diantara mereka, Indonesia memiliki laju pertumbuhan tertinggi pada kisaran 6,1%.

Satu hal yang menarik, bahwa sementara ekonomi darinegara-negara lain mengalami keterpurukan yang serius terutama selama bulan pertama tahun 2009.

Indonesia tidak hanya mempertahankan pertumbuhan PDB yang positif, tetapi juga laju pertumbuhannya sedikit lebih tinggi selama kuartal pertama dan kedua tahun 2009. Namun demikian, secara keseluruhan, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahu 2009 tercatat hanya bisa mencapai sekitar 4,5%, yang jauh lebih rendah dibandingkan apa yang telah dicapai pada 2007 dan 2008.

Hal ini memberi kesan bahwa ekonomi Indonesia juga terkena dampak dari krisis ekonomi global tersebut. Tetapi bagaimanapun juga, Indonesia sanggup mencegah terjadinya pertumbuhan ekonomi negatif (seperti yang telah terjadi selama krisis keuangan asia tahun 1998) selama periode krisis itu.

Seperti contoh pada tabel 2, selain Indonesia, ada beberapa negara lainnya dikawasan asia, seperti cina, India, Pakistan dan Banglades juga dapat mengurangi dampak negatif dari krisis tersebut, bahwa didalam kelompok NB, negara-negara di Asia dan Pasifik menunjukkan kinerja jauh lebih baik dibandingkan dikawasan lainnya di dunia yang juga terkena efek dari krisis tersebut.

Tabel 2 Pertumbuhan Ekonomi di NB menurut Kawasan, 2007-2010

	2007	2008	2009	2010
Asia timur dan pasifik	11,4	8,0	6,8	8,1
• Cina	13,0	9,0	8,4	9,0
• Indonesia	6,3	6,2	4,5	5,6 (5,8)**
• Thailand	4,9	2,2	-2,7	3,5
Eropa dan Asia tengah	7,1	4,2	-6,2	2,7
Asia Selatan	8,5	5,7	5,7	6,9
• India	9,1	6,1	6,0	7,5
• Pakistan	5,7	2,0	3,7	3,0
• Bangladesh	6,4	6,2	5,9	5,5
Amerika Latin dan Karibia	5,5	3,9	-2,6	3,1
Timur Tengah dan Afrika Utara	5,9	4,3	2,9	3,7
Afrika Sub-Sahara	6,5	5,1	1,1	3,8

Seperti yang dijelaskan lebih lanjut dalam laporan Asian Development Bank (ADB) tersebut, Penambahan konsumsi domestik selain dipengaruhi oleh banyaknya pengeluaran yang terkait dengan kegiatan-kegiatan pemilihan parlemen dan presiden tersebut, juga didukung oleh melemahnya laju inflasi, dan hasil panen pertanian yang baik yang meningkatkan pendapatan petani.

Selain itu pemerintah pusat juga mentransfer dana segar ke 18,5 juta rumah tangga miskin dalam dua bulan pertama tahun 2009 dan menurukan beberapa pajak sebagai bagian dari apa yang disebut dengan stimulus fiskal. Tujuan utama stimulus fiskal adalah untuk mengurangi dampak krisis 2008-2009 terhadap ekonomi domestik.

Namun demikian, disisi lain, ketatnya penyaluran kredit perbankan baik untuk tujuan konsumsi rumah tangga maupun untuk kegiatan produksi/ dunia usaha pada saat itu, membuat tingginya tingkat suku bunga pinjaman, permintaan maupun penawaran pasar sedikit lesu.

Dalam hal kredit konsumen, kurangnya kredit tersebut menyebabkan penjualan terutama barang-barang yang sifatnya tahan lama, seperti kendaraan bermotor menjadi berkurang. Sedangkan rendahnya arus kredit perbankan yang mengalir pada kegiatan ekonomi saat ini disebabkan oleh dua alasan utama, Pertama, banyak perusahaan di dalam negeri yang

membatalkan rencana perluasan produksi mereka akibat kondisi perekonomian nasional yang tidak kondusif terkait dengan krisis, sehingga permintan kredit tidak bertambah. Kedua, sejak pengalaman buruk yang dialami oleh sektor perbankan pada masa krisis keuangan Asia pada tahun 1997-1998 lalu, dengan banyaknya kredit macet dari perusahaan peminjam membuat perbankan menjadi ekstra hati-hati dalam menyalurkan kredit, khususnya dalam kondisi ekonomi tidak kondusif seperti pada saat krisis 2008-2009.

3. Krisis Utang Zona Euro

Krisis ekonomi zona euro akan berdampak buruk pada ekonomi UE, dan pada gilirannya krisis ekonomi UE akan berdampak buruk pada ekonomi dunia karena ekonomi UE sangat terbuka, dalam arti ekonomi UE sangat terintegrasi dengan ekonomi global khususnya lewat tiga jalur yakni perdagangan, produksi dan keuangan.

Apalagi salah satu mitra besar ekonomi UE adalah AS, yang berarti apabila ekonomi AS terpuruk akibat krisis ekonomi UE, perekonomian dunia akan mendapatkan pukulan dua kali. Belum lagi hubungan ekonomi antara AS dan China juga sangat intens, yang berarti, paling tidak secara teori, ekonomi china yang sedang naik daun dalam 10 tahun terakhir ini juga bisa terpukul. Jika itu memang terjadi, maka ekonomi dunia akan lebih terpuruk lagi, melihat kenyataan bahwa sumbangan china terhadap perdagangan global, khususnya barang, paling besar.

Mengenai dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, sejumlah lembaga memberikan angka-angka prediksi yang berbeda dan terus dilakukan revisi.

BAB VI
PELAKU-PELAKU EKONOMI

A. Latar Belakang Persoalan

Di dalam sistem perekonomian Indonesia dikenal ada tiga pilar utama yang meyangga perekonomian. Ketiga pilar itu adalah badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik swasta (BUMS) dan koperasi atau dapat dikatakan bahwa didalam perekonomian nasional ada dua kelompok pelaku ekonomi yakni, swasta dan pemerintah. Kelompok swasta dapat dibagi dalam dua sub-kelompok, yaitu koperasi dan perusahaan-perusahaan non-koperasi. Sedangkan kelompok pemerintah adalah BUMN. Menurut unit jumlah usaha, jumlah BUMN jauh lebih kecil dibandingkan perusahaan-perusahaan swasta, namun kelompok BUMN tersebut beroperasi di sektor-sektor atau sub-sektor- sub-sektor ekonomi yang sangat sangat strategis seperti pertambangan, energi, dan sejumlah industri manufaktur.

Peran dalam perekonomian Indonesia tersebut di dalam perekonomian Indonesia selama ini dapat dilihat dari sejumlah indikator, terutama dalam sumbangannya terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDB (pangsa PDB), kesempatan kerja (pangsa kesempatan kerja), peningkatan cadangan valuta asing (Devisa) terutama lewat ekspor (pangsa ekspor) dan sumbangannya terhadap keungan pemerintah kewat pembayaran pajak dan lainnya.

B. Perusahaan-Perusahaan Non-Koperasi

1. BUMN

Walaupun jumlah perusahaan skala besar (UB), termasuk BUMN, saat ini jauh lebih banyak dibandingkan awal orde baru, namun masih

jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah perusahaan skala mikro, kecil dan menengah (UMKM). Menurut *database* dari Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM (Menegkop& UKM) dan Biro Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 1997 ada sekitar 39,7 juta usaha mikro dan kecil (UMK), dengan nilai penjualan rata-rata per tahun kurang dari RP 1 miliar per unit atau sekitar 99.8 % dari total unit usaha pada tahun itu. Pada tahun 1998, pada saat krisis ekonomi mencapai titik terburuknya dengan dampak negatif yang sangat besar terhadap hampir semua sektor ekonomi di Indonesia.

Tabel berikut menunjukkan distribusi perusahaan dalam jumlah unit usaha dan jumlah pekerja menurut skala jumlah usaha dan sektor ekonomi. Satu hal yang menarik untuk diamati dari kedua tabel tersebut adalah bahwa sebagian besar dari jumlah UMK terdapat di sektor pertanian, sementara itu, sebagian besar dari umlah UB terdapat di sektor industri dan manufaktur. Ini menandakan bahwa keunggulan komparatif dari UMK relatif dibandingkan dengan keunggulan UM dan UB adalah dalam produksi pertanian. Sekaligus, struktur perusahaan menurut sektor ini juga menandakan bahwa UMKM pada umumnya dan UMK pada khususnya di Indonesia masih sangat lemah dalam kegiatan-kegiatan industri manufaktur dibandingkan manufaktur di negara-negara lain, seperti Taiwan, Republik Korea, dan Jepang yang termasuk jauh lebih maju di dalam kegiatan industri, termasuk di subsektor elektronika dan subsektor mesin.

Tabel 3Contoh Struktur Perusahaan Menurut Skala Usaha dan Sektor di Indonesia, tahun 2008 (unit usaha)

Sektor	UMI	UK	UM	UB	Total
Pertanian (1)	26.398.113 (52,07)	1.079 (0,21)	1.677 (4,23)	242 (5,54)	26.401.111 (51,50)
Pertambangan & penggalian (2)	258.974 (0,5)	2.107 (0,41)	260 (0,66)	80 (1,83)	261.421 (0,51)
Industri pengolahan (3)	3.176.471 (6,27)	53.458 (10,28)	8.182 (20,63)	1.309 (29,94)	3.239.420 (6,32)
Listrik, gas & air bersih (4)	10.756 (0,02)	551 (0,11)	315 (0,79)	125 (2,86)	11.747 (0,02)
Bangunan (5)	159.883 (0,32)	12.622 (2.43)	1.854 (4,68)	245 (5,60)	174.604 (0,34)
Perdagangan, hotel & restoran (6)	14.387.690 (28, 38)	382.084 (73,45)	20.176 (50,88)	1.256 (28,73)	14.791.206 (28,85)
Transpor & komunikasi (7)	3.186.181 (6,29)	17.420 (3,35)	1.424 (3,59)	319 (7,30)	3.205.344 (6,25)
Keuangan, penyewaan& jasa (8)	970.163 (1,91)	23.375 (4,49)	3.973 (10,02)	599 (13,70)	998.110 (1,95)
Jasa lainnya (9)	2.149.428 (4,24)	27.525 (5,29)	1.796 (4,53)	197 (4,51)	2.178.946 (4,25)
Jumlah	50.697.659 (100,00)	520.221 (100,00)	39.657 (100,00)	4.372 (100,00)	51.261.909

Tabel 4 Contoh Stuktur Perusahaan Menurut Skala Usaha dan Sektor di Indonesia, tahun 2008 (orang pekerja)

Sektor	UMI	UK	UM	UB	Total
(1)	41.749.303	66.780	643.981	229.571	42.689.635
(2)	591.120	28.762	21.581	78.847	720.310
(3)	7.853.435	1.145.066	1.464.915	1.898.674	12.362.090
(4)	51.583	19.917	31.036	54.233	156.769
(5)	576.783	137.555	51.757	31.016	797.111
(6)	22.168.835	1.672.351	427.876	179.895	24. 493.957
(7)	3.496.493	145.336	111.854	98.191	3.851.874
(8)	2.063.747	313.921	279.877	156.064	2.813.609
(9)	5.096.412	462.683	178.311	49.723	5.787.129
Jumlah	83.647.711	3.992.371	3.256.188	2.776.214	93.672.484

Dari tabel 4 dapat dipahami kenapa UMKM, khususnya UMK, beggitu penting bagi penciptaan kesempatan kerja dan sumber pendapatan, baik sebagai sumber utama atau satu-satunya atau sebagai sumber tambahan.

Namun, tidak semua pekerja di UMKM adalah pekerja yang digaji. Terutama UMK banyak mengerjakan anggota-anggota keluarga. Berdasarkan data BPS 2010 mengenai UMK di industri pengolahan, menunjukkan bahwa jumlah pekerja yang digaji di kelompok usaha tersebut paling banyak terdapat di provinsi Jawa Tengah, di susul kemudian di peringkat kedua dan ketiga, masing-masing di provinsi Jawa Timur dan provinsi Jawa Barat. Distribusi UMK, baik dalam jumlah unit usaha maupun jumlah pekerja digaji, di Indonesia tidak seimbang menurut wilayah : lebih banyak terdapat di wilayah Indonesia bagian Barat, khusunya pulau Jawa dan Bali dibandingkan di Indonesia bagian Timur.

Berdasarkan data BPS, ada 2.732.724 UMK di industri pengolahan yang terbagi dalam 23 kelompok industri berdasarkan Klasifikasi Bahan Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Banyaknya perusahaan / usaha diurutkan dari yang terbanyak, yaitu industri makanan, industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk meubel), dan barang anyaman dari rotan, bambu dan sejenisnya , industri pakaian jadi ; industri tekstil, hingga kelompok-kelompok industri dengan jumlah UMK kecil, yakni industri peralatan listrik, industri komputer, industri elektronik dan industri mesin dan pelengkapannya.

Pada umumnya, peran UMKM di NSB dalam pembentukan total nilai tambah atau PDB selalu lebih kecil di bandingkan perannya sebagai pencipta kesempatan kerja: lebih dari 90% dari jumlah tenaga kerja yang diserap di dalam ekonomi di NSB bekerja di UMKM, namun sumbangan output yang dihasikan di UMKM terhadap pembentukan PBD pada umumnya di bawah 90% (walaupun rasionya bervariasi menurut negara).

Diperkirakan dari 2014-2016 jumlah UMKM lebih dari 57.900.000 unit dan pada tahum 2017 jumlah UMKM diperkirakan berkembang sampai lebih dari 59.000.000 unit.

Pada 2016, Presiden RI menyatakan UMKM yang memiliki daya tahan tinggi akan mampu untuk menopang perekonomian Negara, bahkan saat terjadi krisis global. Pada November 2016 Presiden Jko Widodo (Jokowi) menerima para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

di Istana Merdeka untuk dimintai pendapatnya. Jokowi sangat berharap pelaku UMKM menjadi garda terdepan dalam membangun ekonomi masyarakat. "Pemerintah sangat sadar betul betapa pentingnya pengembangan usaha mikro usaha kecil dan usaha menengah," ujar Jokowo di Istana Merdeka, Jakarta, Jum'at (25/11/2016).

Struktur PDB menurut skala usaha dan sektor ekonomi telah ditunjukkan di sebelumnya, menegaskan kembali bahwa UMKM Indonesia memiliki keunggulan hanya disektor-sektor ekonomi berbasis sumber daya alam (lokal) dan padat karya, seperti pertanian dan perdagangan, hotel,& restoran. Sumbangan PDB dari kelompok usaha tersebut di masing-masing dari kedua sektor itu tercatat diatas 80%. Sekali lagi, struktur itu menegaskan bahwa di Indonesia secaara tradisional UMKM sangat kuat di pertanian.

Sejak krisis ekonomi 1997-1998, BUMN menjadi salah satu topik perdebatan publik dan akademis karena di satu sisi, citra BUMN yang selama ini buruk, antara lain karena dianggap sebagai sarang KKN, sumber pemerasan dari birokrat, tidak membawa manfaat bagi masyarakat banyak maupun sekitarnya. Menurut Santosa (2005), dari 158 BUMN yang ada pada tahun 2004 hanya 76 BUMN yang dapat menyetorkan dividen ke APBN 2004 sebesar Rp 7,8 triliun, dimana angka ini turun 47% dari tahun 2003 sebesar Rp 12,29 triliun. Sedangkan untuk tahun 2005, waktu itu ditargetkan dividen dari BUMN ini hanya sebesar Rp 9,42 triliun, sedangkan untuk tahun 2006 sebesar Rp 12,3 triliun.

Dari realisasi tahun 2004, 81,77% dari laba BUMN sebesar Rp 25,09 triliun diperolehhanya dari 10 BUMN, yaitu Telkom, Bank Mandiri, Pertamina, BNI, BRI, Pusri, Jamsostek, PGN, Pelindo II, dan Astek. Sedangkan jumlah BUMN yang merugi adalah 55 BUMN dengan kerugian sebesar Rp 6,48 triliun (data 2003). Sumbangan dari 10 BUMN dengan laba terbesar terhadap total laba dari semua BUMN sangat signifikan, mencapai hampir 88%. Sedangkan menurut Yustika (2009), dengan memakai data dari Global Asia 2007, jika dilihat dari aspek pendapatan kotor yang diperoleh, ada 10 BUMN yang tergolong sangat besar, yakni Pertamina, PLN, Telkom, Bank Mandiri, BRI, BNI, Garuda Indonesia, Semen Gresik, PGN,dan Aneka Tambang.

Tabel 5 Contoh Sepuluh BUMN Terbesar Tahun 2007

No	BUMN	Sektor	Pendapatan kotor (juta SAS)	Keuntungan bersih (juta SAS)	Aset (juta SAS)
1	Pertamina	Minyak & gas	33.333	1.526	15.000
2	PLN	Infrastruktur, jasa & transportasi	7.859	(214)	27.546
3	Telkom	Infrastruktur, jasa & taransportasi	5.699	1223	8.348
4	Bank Mandiri	Perbankan	3.240	269	29.724
5	BRI	Perbankan	2.341	473	17.191
6	BNI	Perbankan	2.004	214	18.823
7	Garuda Indonesia	Infrastruktur, jasa & transportasi	1.371	(22)	897
8	Semen Gresik	Industri dasar & kimia	970	144	832
9	PGN	SDA	737	210	1.679
10	Aneka Tambang	SDA	625	173	810

Bahkan menurut berita di Kompas September 2008, PT PLN tidak sanggup membayar tagihan PT Pertamina yang mencapai Rp 40 triliun. Tagihan ini untuk penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangkit listrik, yang hingga Agustus 2008 sudah mencapai 82% dari rencana kerja dan anngaran PLN. Menurut pengakuan PT PLN, perusahaan tersebut mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajbannya terhadap PT Pertamina karena kekurangan dana, karena sebagian besar dari dana operasinya digunakan untuk menalangi proyek percepatan kelistrikan.

Sementara itu menurut data dari Bursa Efek Jakarta (BEJ), selama periode yang sama, jumlah BUMN yang terdaftar di pasar bursa (BUMN terbuka) menurun sedikit dari 13 ke 12 perusahaan, termasuk PT Indosat Tbk yang kepemilikan pemerintah hanya 15%, namun nilai kapitalisasi pasar dari mereka mengalami suatu penambahan, yakni dari Rp 239,16 triliun atau 36,8% pada tahun 2004 menjadi Rp 452,69 triliun atau 36,82% terhadap total kapitalisasi pasar pada tahun 2006. Pada tahun 1999, porsi dari BUMN terbuka dari total kapitalisasi pasar baru 25% dan tahun 2000 sempat turun drastis ke 19%.

Sebenarnya isu privatisasi BUMN sudah mulai muncul secara bertahap sejak era orde baru. Waktu itu, privatisasi sebagai bagian dari kebijakan liberalisasi ekonomi UU ini kemudian diikuti oleh Peraturan

Pemerintah No.31 Tahun 2003. BUMN yang termasuk awal di privatisasi adalah PN Pertamina yang diubah menjadi PT Pertamina (Persero) pada tahun 2003. Keberhasilan privatisasi ini segera dilanjutkan dengan penjualan saham milik pemerintah, misalnya PT Indosat. Kasus PT Indosat ini mengundang kotroversial, terutama karena dijual kepada pihak asing, yakni Singapore Telkom& Telemedia (Anggoro,2008).

Privatisasi BUMN telah menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat Indonesia. Pihak yang setuju dengan privatisasi BUMN berargumentasi bahwa bahwa privatisasi pelu dilakukan untuk meningkatkan kinerja BUMN serta menutup devisit APBN. Mereka berargumen bahwa devisit anggaran harus ditutup dengan sumber lain, bukan dari hasil penjualan BUMN. Mereka memprediksi bahwa defisit APBN juga akan terjadi pada tahun-tahun mendatang. Apabila BUMN dijual setiap tahun untuk menutup defisit APBN, suatu ketika BUMN akan habis terjual dan defisit APBN pada tahun-tahun mendatang tetap akan terjadi (Purwoko. 2002).

Purwoko (2002) termasuk dari sejumlah kecil pengamat yang selama ini sangat memperhatikan kinerja dan upaya privatisasi BUMN di Indonesia. Menurutnya privatisasi BUMN dapat ditempuh melalui beberapa metode, antara lain malalui penjualan saham di pasar modal, private placement (penempatan swasta) oleh investor dalam negeri dengan penyertaan dibawah atau diatas 50%,dan penempatan swasta oleh investor luar negeri dengan prnyertaan juga di bawah atau diatas 50%.

Tabel 6 Contoh Efek dari Sejumlah privatisasi BUMN

Kriteria Privatisasi Ideal	Pasar Modal	Privatisasi Investor Dalam Negeri		Privatisasi Investor Luar Negeri	
		<50%	>50%	<50%	>50%
Mampu mwningkatkan kinerja BUMN	X	X	V	X	V
Mampu menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan BUMN	X	X	V	X	V
Mampu meningkatkan akses ke pasar internasional	X	X	V	V	V
Terjadinya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi	X	X	V	X	V
Terjadinya perubahan budaya	X	X	V	X	V
Mampu memberikan kontribusi menutup devisit APBN	V	V	V	V	V

Tabel diatas menunjukkan bahwa diantara 5 alternatif model privatisasi BUMN tersebut, yang paling mendekati ideal adalah model privatisasi dengan penempatan swasta oleh investor asing dengan penyertaan diatas 50%. Menururut Purwoko(200), beberapa manfaat akan didapat dengan privatisasi model ini,,antara lain peningkatan kemampuan untuk mengakses peluang dipasar internasional, adanya transfer teknologi, terjadinya perubahan budaya kerja yang positif, serta penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan BUMN.

Berikut adalah ulasan secara garis besar dari analisa Purwoko (2002) mengenai metode-metode tersebut.

1. Strategi privatisasi melalui pasar modal: pemerintah menjual kepada public semua atau sebagian saham dimiliki atas BUMN tertentu kepada public melalui pasar modal. Umumnya pemerintah hanya menjual sebagian dari saham yang dimiliki atas BUMN tersebut. Strategi ini akan menghsilkan suatu perusahaan yang dimiliki bersama antara pemerintah dan swasta. Proporsi kepemilikan pemerintah atas BUMN ini akanmenurun. Privatisasi melalui pasar modal akan menghasilkan dana yang bias dipakai untuk menutup dvisit APBN. Namun demikian privatisasi tidak akan banyak merubah pola pengelolaan BUMN. Privatisasi BUMN melalui pasar modal akan mendatangkan investor dalam jumlah banyak dengan rasio penyertaan yang relative kecil. Pemerintah masih menjadi pemegang saham mayoritas. Tidak ada pergeseran peran pemerintah dalam BUMN setelah privatisasi.

2. Privatisasi melalui penempatan swasta oleh investor dalam negeri dengan penyertaan dibawah 50 %: pemerintah menjual sebagian kecil (<50%) dari saham yang dimiliki atas BUMN tertentu kepada satu atau sekelompok investor dalam negeri. Calon investor pada umumnya sudah diidentifikasi terlebih dahulu, sehingga pemerintah dapat memilih investor mana yang paling cocok untuk dijadikan partner usahanya.

3. Privatisasi melalui penempatan swasta oleh investor dalam negeri dengan penyertaan diatas 50%. Penyertaan diatas 50% akan menyebabkan investor baru memiliki kekuatan untuk ikut menentukan kebijakan dalam menjalankan kegiatan operasional BUMN, sehingga akan terjadi pergeseran peran pemerintah dari pemilik dan pelaksana usaha menjadi regulator dan promotor kebijakan.

2. Peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

BUMN memiliki peranan penting dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut.

a. BUMN dapat mengelola dan menggunakan cabang-cabang produksi yang pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada umumnya.

b. Pemerintah melalui perusahaan negara (BUMN) dapat melayani masyarakat secara maksimal.

c. BUMN menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari pendapatan non - pajak.

d. BUMN dapat menyediakan lapangan pekerjaan sehingga dapat membantu mengatasi pengangguran.

e. BUMN dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Peranan BUMN ditegaskan dalam Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003, yaitu sebagai berikut.

a. Memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional umumnya dan penerimaan negara khususnya.

b. Mengadakan pemupukan keuntungan dan pendapatan.

c. Menyediakan kebutuhan umum berupa barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat orang banyak.

d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha swasta dan koperasi.

e. Menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swasta dan koperasi, antara lain menyediakan kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk barang maupun jasa dengan memberikan pelayanan yang bermutu dan memadai.

f. Turut aktif memberikan bimbingan kegiatan sektor swasta, khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah.

g. Turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan umumnya.

3. Visi dan Misi BUMN

Sebagai institusi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam rangka mengelola aset negara, Kementerian BUMN memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi :

"Meningkatkan peran BUMN sebagai instrumen negara untuk peningkatan kesejahteraan rakyat berdasarkan mekanisme korporasi"

Misi :

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, kementerian BUMN menetapkan misi sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas pengelolaan BUMN yang semakin transparan dan akuntabel

b. Peningkatan peran BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pendapatan negara

c. Peningkatan kualitas pelaksanaan penugasan pemerintah untuk pelayanan umum

d. Peningkatan peran BUMN dalam keperintisan usaha dan pengembangan UMKM

e. Mewujudkan sistem pengelolaan BUMN berbasis mekanisme korporasi

f. Peningkatan peran BUMN untuk percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional

C. Koperasi

1. Sejarah Koperasi

Sejarah koperasi pada awalnya dimulai pada abad ke-20. Pada umumnya sejarah koperasi dimulai dari hasil usaha kecil yang spontan dan dilakukan oleh rakyat kecil. Kemampuan ekonomi yang rendah mendorong para usaha kecil untuk terlepas dari penderitaan .Secara spontan mereka ingin merubah hidupnya.

Di Indonesia ide - ide perkoperasian diperkenalkan oleh, R. Aria Wiraatmadja yang pada tahun 1896 yang mendirikan sebuah Bank untuk para Pegawai Negeri. Karena semangat yang tinggi perkoperasian pun selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode.

Pada tahun 1908, Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo . Dr Sutomo sangat memiliki peranan bagi garakan koperasi untuk memperbaiki dan mensejahtrakan kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan-peraturan ***Verordening op de Cooperatieve Vereeniging***dan pada tahun 1927 ***Regeling Inlandschhe Cooperatiev.***

Pada tahun 1927 dibentuklah Serikat Dagang Islam. Dengan tujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi para pengusah-pengusaha pribumi. pada tahun 1929 berdiri Partai Nasional Indonesia yang memberikan dan memperjuangkan semangat untuk penyebaran koperasi di Indonesia.Pada tahun 1942 negara Jepang menduduki Indonesia.Lalu jepang mendirikan koperasi yang diberi nama koperasi kumiyai.

Setelah bangsa Indonesia merdeka tanggal 12 Juli 1947. Gerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi pertama kalinya di Tasikmalaya.Hari itu kemudian ditetapkanlah sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Kongres Koperasi pertama menghasilkan beberapa keputusan:

a. Mendirikan sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia [SOKRI]

b. Menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi

c. Menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai hari Koperasi

Pada tanggal 12 Juli 1953, mengadakan kembali Kongres Koperasi yang ke-2 di Bandung.

Kongres koperasi ke -2 mengambil putusan :

a. Membentuk Dewan Koperasi Indonesia [**Dekopin**]sebagai pengganti SOKRI

b. Menetapkan pendidikan koperasi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah

c. Mengangkat Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia

d. Segera akan dibuat undang-undang koperasi yang baru

Pelaksanaan program perkoperasian pemerintah mengadakan kebijakan:

a. menggiatkan pembangunan organisasi perekonomian rakyat terutam koperasi

b. memperluas pendidikan dan penerangan koperasi

c. memberikan kredit kepada kaum produsen, baik di lapangan industri maupun pertanian yang bermodal kecil

Pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum. Setiap koperasi yang ada harus melandaskan seluruh kegiatannya pada prinsip koperasi serta asas kekeluargaan untuk meningkatkan gerakan ekonomi rakyat.

Selama sejarahnya, koperasi sebenarnya bukanlah organisasi yang khas berasal dari Indonesia. Kegiatan berkoperasi dan organisasi koperasi pada mulanya diperkenalkan di Inggris pada abad pertengahan. Pada waktu itu, misi utama pada koperasi adalah untuk menolong kaum buruh dan perani yang menghadapi masalah-masalah ekonomi dengan menggalang kekuatan mereka sendiri. Kemidian di Perancis yang didorong oleh gerakan kaum buruh yang tertindas oleh kekuatan kaum kapitalis sepanjang abad ke19 dengan tujuan utamanya membangun suatu ekonomi alternatif dari asosiasi-asosiasi koperasi menggantikan perusahaan-perusahaan milik kapitalis (Moene & Wallerstein,1993). Ide koperasi ini kemudian menjalar ke Inggris dan negara-negara lainnya. Di Indonesia, koperasi baru muncul pada abad ke 20.

Sutrisno (2001) mencatat bahwa pada akhir dekade 80-an, koperasi dunia mulai gelisah dengan proses globalisasi dan liberalisasi ekonomi dan perdagangan yang semakin pesat, sehingga berbagai langkah pengkajian ulang kekuatan koperasi dilakukakan. Hingga tahun 1992, Kongres Internasional ICA di Tokyo memalui pidato presiden ICA (Lars Marcus) masih melihat perlunya koperasi melihat pengalaman swasta, khususnya di NM yang mampumembangun koperasi menjadi unit-unit usaha yang besar yang mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan non-koperasi, termasuk perusahaan-perusahaan multinasional, dan pentingnya koperasi di NSB, terutama sebagai salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan.

Pada tahun 1995, gerakan koperasi menyelengarakan kongres koperasi di Manchester, Inggris dan melahirkan suatu landasan baru yang dinamakan Int ernational Cooperative Identitiy Statement (ICIS), yang menjadi dasar tentang pengertian prinsip dan nilai dasar koperasi untuk menjawab tantangan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dan perdagangan.

D. Tujuan Koperasi

Dalam peraturan perundang undangan telah diatur tentang tujuan koperasi. Berdasarkan Pasal 3 UU No. 25 tahun 1992, tujuan koperasi adalah:

· Memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat (Promote the welfare of members of cooperatives and community)

· Turut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional (Participate in building a national economic order) dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur, adil dan maju dengan tetap berlandaskan pada pancasila dan UUD 1945.

1. Fungsi dan Peranan Koperasi

Dalam setiap organisasi memiliki fungsi dan peranan tertentu, begitupun dengan organisasi koperasi. Perkoperasian di Indonesia seharusnya berfungsi dan memiliki peran sebagai berikut:

a. Mengembangkan serta membangun kemampuan dan potensi anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi

b. Berperan secara aktif (role actively) dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kualitas kehidupan anggota koperasi dan masyarakat

c. Memperkuat serta mengkokohkan perekonomian rakyat Indonesia sebagai dasar ketahanan dan kekuatan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

E. Kelebihan dan kekurangan koperasi

Sama dengan badan badan usaha lainnya, koperasi juga memiliki kelebihan dan kelemahan sebagai berikut:

1. Kelebihan Koperasi

· Koperasi lebih mengutamakan tujuan yang berupa kesejahteraan anggota (*Cooperative prioritize goals such as the welfare of members*). Pendapatan dan laba yang diperoleh koperasi hanyalah merupakan konsekuensi atau akibat dari usaha pencapaian tujuan menyejahterkan anggota tersebut. Keuntungan yang diperoleh koperasi (tidak disebut laba, melainkan SHU=Sisa Hasil Usaha), setiap akhir tahun dikembalikan lagi kepada anggota disamping untuk dana cadangan

· Mengutamakan pelayanan terhadap anggota (*Prioritizing services to members*)

· Keanggotaanya bersifat sukarela (*volunteer*) dan terbuka

· Setiap orang dapat menjadi anggota koperasi dengan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib (*Everyone can become a member of the cooperative to pay the principal savings and mandatory savings*)

· Besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib ditentukan bersama (*The amount of principal savings and mandatory savings are determined together*) sehingga terjangkau oleh semua anggota

· Tidak ada perbedaan di antara para anggota dalam bentuk apapun (*There were no differences among members in any form*)

· Tanggung jawab anggota terbatas

· koperasi berpotensi menjadi raksasa bisnis masa depan.

2. Kelemahan Koperasi

Kondisi yang terjadi di lapangan adalah persentase tingkat kesadaran anggota koperasi secara keseluruhan sangat rendah untuk melakukan peningkatan dalam koperasi.

Karena rendahnya kesadaran anggota koperasi maka sulit memilih pengurus koperasi yang profesional. Daya saing koperasi lebih rendah jika dibandingkan dengan badan usaha swasta yang murni bertujuan mencari laba

3. Perkembangan Koperasi di Indonesia

a. Perkembangan Koperasi Pada Masa Reformasi

Potensi koperasi pada saat ini sudah mampu untuk memulai gerakan koperasiyang otonom, namun fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada ciri universalitas kebutuhan yang tinggi seperti jasakeuangan, pelayanan infrastruktur serta pembelian bersama. Dengan otonomi selain peluang untuk memanfaatkan potensi setempat juga terdapat potensi benturan yang harus diselesaikan di tingkat daerah.

Dalam hal ini konsolidasi potensi keuangan, pengem-bangan jaringan informasi serta pengembangan pusat inovasi dan teknologi merupakan kebutuhan pendukung untuk kuat-nya kehadiran koperasi. Pemerintah di daerah dapat mendo-rong pengem-bang-an lembaga penjamin kredit di daerah. Pemusatan koperasi di bidang jasa keuangan sangat tepat untuk dilakukan pada tingkat kabupaten/kota atau "kabupaten dan kota" agar menjaga arus dana menjadi lebih seimbang dan memperhatikan kepentingan daerah (masyarakat setempat).

Fungsi pusat koperasi jasa keuangan ini selain menjaga likuiditas juga dapat memainkan peran pengawasan dan perbaikan manajemen hingga pengembangan sistem asuransi tabungan yang dapat diintegrasikan dalam sistem asuransi secara nasional. Pendekatan pengembangan koperasi sebagai instrumen pembangunan terbukti menimbulkan kelemahan dalam menjadikan dirinya sebagai koperasi yang memegang prinsip-prinsip koperasi dan sebagai badan usaha yang kompetitif. Reformasi kelembagaan koperasi menuju koperasi dengan jatidirinya akan menjadi agenda panjang yang harus dilalui oleh koperasi di Indonesia.

Dalam kerangka otonomi daerah perlu penataan lembaga keuangan koperasi (koperasi simpan pinjam) untuk memperkokoh pembiayaan kegiatan ekonomi di lapisan terbawah dan menahan arus ke luar potensi sumberdaya lokal yang masih diperlukan. Pembenahan ini akan merupakan elemen penting dalam membangun sistem pembiayaan mikro di tanah air yang merupakan tulang punggung gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Dalam sistem perekonomian indonesia di kenal ada tiga pilar utama yang meyangga perekonomian, yakni BUMN, BUMS, & Koperasi. Menurut Widiyanto (1998), dari ketiga pilar itu, koperasi sering disebut sebagai soko guru perekonomian, secara umum merupakan pilar ekonomi

yang "jalannya paling terseok" disbanding dengan BUMN & apalagi BUMS. Padahal koperasi selama ini sudah didukung oleh pemerintah (bahkan berlebihan) sesuai kedudukan istimewa dari koperasi di dalam sistem perekonomian indonesia.

Memasuki tahun 2000, koperasi indonesia di dominasi oleh koperasi kredit yang menguasai antara 55-60% dari keseluruhan aset koperasi, sementara itu, dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah, hanya sekitar 25% dari populasi koperasi atau sekitar 35% dari populasi koperasi aktif. Hingga akhir 2002, posisi koperasi dalam pasar perkreditan

Tabel 7 Contoh Perkembangan Usaha Koperasi 2004-2013

Indikator	Satuan	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
Jumlah Koperasi (00)	Unit	130,7	134,96	141,3	149,79	154,96	170,4	177,5	188,2	194,3
Pertumbuhan Koperasi	Persen	6,1	3,2	4,7	5,99	3,5	9,97	4,2	6,03	3,3
Jumlah Koperasi Aktif	Unit	93,4	94,8	98.9	104,99	108,9	120,5	124,9	133,7	139,3
Prosentase Koperasi Aktif & Total Jumlah Koperasi	Persen	71,5	70,3	70,01	70,1	70,3	70,7	70,4	71,1	71,7
Pertumbuhan Jumlah Koperasi Aktif	Persen	-0.42	1.52	4.35	6.12	3.74	10.60	3.64	7.06	4.23
Jumlah Anggota Koperasi Aktif (00)	Orang	27 523,1	27 286,8	27 776,1	28 888,1	27 318,6	29 240,3	30 461,1	30 849,9	33 869,4
Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi Aktif	Persen	0.88	-0.86	1.79	4.00	-5.43	7.03	4.18	1.28	9.79
Permodalan	Rp Miliar	28 886,5	55 667,9	38 853,1	43 555,7	49 823,3	59 852,6	64 788,7	75 484,2	102 826,2

Pertumbuhan Permodalan	Persen	18.58	92.71	-30.21	12.10	14.41	20.11	8.25	16.51	36.22
Volume Usaha	Rp Miliar	37 649,1	40 831,7	62 718,5	63 080,6	68 446,3	82 098,6	76 822,1	95 062,4	119 182,7
Pertumbuhan Volume Usaha	Persen	18,8	8,5	53,6	0,6	8,5	19,95	-6.43	23.74	25.37
Selisih Hasil Usaha (SHU)	Rp Miliar	2 164,2	2 198,3	3 216,8	3 964,8	3 964,8	5 303,8	5 622,2	6 336,5	6 661,9
Pertumbuhan SHU	Persen	15.62	1.57	46.33	7.88	14.24	33.77	6.00	12.71	5.14

4. Apakah Koperasi Indonesia Mempunyai Prospek Baik?

Menurut Rahardjo (2002b), gagasan tentang koperasi telah dikenal di Indonesia sejak akhir abad 19, dengan dibentuknya organisasi swadaya (self-help organization) untuk menangggulangi kemiskinan di kalangan pegawai dan petani, oleh Patih Purwokerto dan Tirto Adisuryo, yang kemudian dibantu pengembangannya oleh pejabat Belanda dan akhirnya menjadi program resmi pemerintah.

Gerakan koperasi sendiri mendeklarasikan sebagai suatu gerakan yang sudah dimulai sejak tanggal 12 juli 1947 melalui Kongres Koperasi di Tasikmalaya. Menurut Rahardjo (2002b), Bung Hatta mulai tertarik kepada sistem koperasi karena pengaruh kunjungannya ke negara-negara Skandinavia, khususnya Denmark, pada akhir tahun 1930an. Walaupun ia sering mengaitkan koperasi dengan nilai dan lembaga tradisional gotong-royong, namun persepsinya tentang koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi modern yang berkembang di Eropa Barat.

Sutrisno (2001), berpendapat bahwa cirri utama perkembangan koperasi di Indonesia adalah dengan pola penitipan program yaitu (i) program pembangunan secara sektoral seperti koperasi pertanian, koperasi KUD, (ii) Lembaga-lembaga pemerintah dalam koperasi pegawai negeri dan koperasi fungsional lainnya, (iii) perusahaan baik BUMN maupun BUMS dalam dalam koperasi karyawan.

Pandangan Sutrisno (2001), tersebut ddukiung oleh Widiyanto (1998), yang mengatakan bahwa keberhasilan usaha koprperasi di Indonesia biasanya bergantung pada dua hal. Pertama, program pemerintah karena koperasi sering dijadikan "kepanjangan"tangan pemerintah dalam mengatur sendi perekonomian. Kedua, keinginan penentuan kebutuhan

anggota; jadi koperasi-koperasi seringkali dipakai sebagai alat pemenuhan kebutuhan anggota yang biasanya juga berkaitan dengan program yang telah dicanangkan pemerintah.

Hasil penelitian Widiyanto (1998), menunjukkan bahwa jenis usaha yang sering menjadi andalan koperasi adalah suatu, kredit usaha tani, penggilingan padi, pengadaan pupuk dan obat, simpan pinjam pertokoan, jasa tagihan listrik atau air. Keismpulan dari Widiyanto, adalah bahwa tidak banyak koperasi yang memiliki profil keunggulan bersaing, dan secara umum sebenarnya Widiyanto menemukan bahwa posisi bisnis koperasi cenderung pada posisi "dapat bertahan" menjadi "lemah" (Widiyanto, 1996).

BAB VII
PEREKONOMIAN INDONESIA SEKTOR INDUSTRI

A. Pengertian Industri

Pengertian industri sering dihubungkan dengan adanya mekanisasi, teknologi dan]hal-hal lain yang datang dari negara yang lebih maju. Jadi, dapat dikatakan bahwa sebuah industri merupakan suatu kelompok perusahaan yang memproduksi barang yang sama, untuk pasar yang sama pula. Sedangkan perusahaan itu sendiri tidak selalu menggunakan material atau proses produksi yang sama dengan yang lainnya (Swastha & Sukotjo, 1993:10-11).

Selain itu, Dumairy (1996:227) menyatakan bahwa istilah industri mempunyai dua arti: *Pertama,* industri dapat berarti himpunan perusahaan-perusahaan sejenis. *Kedua,* industri dapat pula merujuk ke suatu sektor ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi.

Selain itu, pengertian industri menurut undang-undang No. 5 tahun 1984 tentang perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang yang mempunyai nilai lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk juga kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha dalam mencukupi kebutuhan (ekonomi).

B. Sektor dan Sub-Sektor Industri

Industri merupakan kegiatan ekonomi yang luas, maka jumlah dan macam industri berbeda-beda untuk tiap negara atau daerah. Pada

umumnya, semakin maju tingkat perkembangan perindustrian di suatu negara atau daerah, semakin banyak jumlah dan macam industri serta semakin kompleks pula sifat kegiatan dan usaha tersebut. Cara penggolongan atau pengklasifikasian industri pun berbeda-beda. Namun pada dasarnya, pengklasifikasian industri didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu bahan baku, tenaga kerja, pangsa pasar, modal, atau jenis teknologi yang digunakan. Selain faktor-faktor tersebut, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara juga turut menentukan keanekaragaman industri.

Adapun klasifikasi industri berdasarkan kriteria masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Klasifikasi industri berdasarkan bahan baku

Tiap-tiap industri membutuhkan bahan baku yang berbeda, tergantung pada apa yang akan dihasilkan dari proses industri tersebut. Berdasarkan bahan baku yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi:

a. Industri ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam.

b. Industri non ekstraktif, yaitu industri yang mengolah lebih lanjut hasil-hasil industri lain.

c. Industri fasilitatif atau disebut juga *industri tersier.* Kegiatan industrinya adalah dengan menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain.

2. Klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja

Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi:

a. Industri rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari empat orang.

b. Industri kecil, yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5 sampai 19 orang.

c. Industri sedang, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20 sampai 99 orang.

d. Industri besar, yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang.

3. Klasifikasi industri berdasarkan produksi yang dihasilkan

Berdasarkan produksi yang dihasilkan, industri dapat dibedakan menjadi:

a. Industri primer, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang tidak perlu pengolahan lebih lanjut.

b. Industri sekunder, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sebelum dinikmati atau digunakan.

c. Industri tertier, yaitu industri yang hasilnya tidak berupa barang atau benda yang dapat dinikmati atau digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung, melainkan berupa jasa layanan yang dapat mempermudah atau membantu kebutuhan masyarakat.

4. Klasifikasi industri berdasarkan bahan mentah

Berdasarkan bahan mentah yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi:

a. Industri pertanian, yaitu industri yang mengolah bahan mentah yang diperoleh dari hasil kegiatan pertanian.

b. Industri pertambangan, yaitu industri yang mengolah bahan mentah yang berasal dari hasil pertambangan.

c. Industri jasa, yaitu industri yang mengolah jasa layanan yang dapat mempermudah dan meringankan beban masyarakat tetapi menguntungkan.

5. Klasifikasi industri berdasarkan lokasi unit usaha

Keberadaan suatu industri sangat menentukan sasaran atau tujuan kegiatan industri. Berdasarkan pada lokasi unit usahanya, industri dapat dibedakan menjadi:

a. Industri berorientasi pada pasar (market oriented industri), yaitu industri yang didirikan mendekati daerah persebaran konsumen.

b. Industri berorientasi pada tenaga kerja (employment oriented industri), yaitu industri yang didirikan mendekati daerah pemusatan

penduduk, terutama daerah yang memiliki banyak angkatan kerja tetapi kurang pendidikannya.

c. Industri berorientasi pada pengolahan (supply oriented industri), yaitu industri yang didirikan dekat atau ditempat pengolahan. Misalnya, industri semen di Palimanan Cirebon (dekat dengan batu gamping), industri pupuk di Palembang (dekat dengan sumber pospat dan amoniak), dan industri BBM di Balongan Indramayu (dekat dengan kilang minyak).

d. Industri berorientasi pada bahan baku, yaitu industri yang didirikan di tempat tersedianya bahan baku. Misalnya, industri konveksi berdekatan dengan industri tekstil, industri pengalengan ikan berdekatan dengan pelabuhan laut, dan industri gula berdekatan lahan tebu.

e. Industri yang tidak terikat oleh persyaratan yang lain (footloose industri), yaitu industri yang didirikan tidak terikat oleh syarat-syarat di atas. Industri ini dapat didirikan di mana saja, karena bahan baku, tenaga kerja, dan pasarnya sangat luas serta dapat ditemukan di mana saja. Misalnya, industri elektronik, industri otomotif, dan industri transportasi.

6. Klasifikasi industri berdasarkan proses produksi

Berdasarkan proses produksi, industri dapat dibedakan menjadi:

a. Industri hulu, yaitu industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Industri ini sifatnya hanya menyediakan bahan baku untuk kegiatan industri yang lain.

b. Industri hilir, yaitu industri yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi sehingga barang yang dihasilkan dapat langsung dipakai atau dinikmati oleh konsumen.

7. Klasifikasi industri berdasarkan barang yang dihasilkan

Berdasarkan barang yang dihasilkan, industri dapat dibedakan menjadi:

a. Industri berat, yaitu industri yang menghasilkan mesin-mesin atau alat produksi lainnya.

b. Industri ringan, yaitu industri yang menghasilkan barang siap pakai untuk dikonsumsi.

8. Klasifikasi industri berdasarkan modal yang digunakan

Berdasarkan modal yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi:

a. Industri dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN), yaitu industri yang memperoleh dukungan modal dari pemerintah atau pengusaha nasional (dalam negeri).

b. Industri dengan penanaman modal asing (PMA), yaitu industri yang modalnya berasal dari penanaman modal asing.

c. Industri dengan modal patungan (join venture), yaitu industri yang modalnya berasal dari hasil kerja sama antara PMDN dan PMA. Misalnya, industri otomotif, industri transportasi, dan industri kertas.

9. Klasifikasi industri berdasarkan subjek pengelola

Berdasarkan subjek pengelolanya, industri dapat dibedakan menjadi:

a. Industri rakyat, yaitu industri yang dikelola dan merupakan milik rakyat.

b. Industri negara, yaitu industri yang dikelola dan merupakan milik Negara yang dikenal dengan istilah BUMN.

10. Klasifikasi industri berdasarkan cara pengorganisasian

Cara pengorganisasian suatu industri dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti: modal, tenaga kerja, produk yang dihasilkan, dan pemasarannya. Berdasarkan cara pengorganisasianya, industri dapat dibedakan menjadi:

a. Industri kecil, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal relatif kecil, teknologi sederhana, pekerjanya kurang dari 10 orang biasanya dari kalangan keluarga, produknya masih sederhana, dan lokasi pemasarannya masih terbatas (berskala lokal).

b. Industri menengah, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal relative besar, teknologi cukup maju tetapi masih terbatas, pekerja antara 10-200 orang, tenaga kerja tidak tetap, dan lokasi pemasarannya relative lebih luas (berskala regional).

c. Industri besar, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal sangat besar, teknologi canggih dan modern, organisasi teratur, tenaga kerja dalam jumlah banyak dan terampil, pemasarannya berskala nasional atau internasional.

11. Klasifikasi industri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian

Selain pengklasifikasian industri tersebut di atas, ada juga pengklasifikasian industri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 19/M/ I/1986 yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Adapun pengklasifikasiannya adalah sebagai berikut:

a. Industri Kimia Dasar (IKD)

Industri Kimia Dasar merupakan industri yang memerlukan: modal yang besar, keahlian yang tinggi, dan menerapkan teknologi maju.

b. Industri Mesin Logam Dasar dan Elektronika (IMELDE)

Industri ini merupakan industri yang mengolah bahan mentah logam menjadi mesin-mesin berat atau rekayasa mesin dan perakitan.

c. Aneka Industri (AI)

Industri ini merupakan industri yang tujuannya menghasilkan bermacammacam barang kebutuhan hidup sehari-hari.

d. Industri Kecil (IK)

Industri ini merupakan industri yang bergerak dengan jumlah pekerja sedikit, dan teknologi sederhana. Biasanya dinamakan industri rumah tangga,

e. Industri pariwisata

Industri ini merupakan industri yang menghasilkan nilai ekonomis dari kegiatan wisata.

C. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan pada Perekonomian Indonesia Khususnya terhadap Produk Domestik Bruto

Kondisi perekonomian suatu negara dapat dilihat dari nilai pendapatan nasional negara tersebut yang dipengarui oleh beberapa sektor usaha yang ada didalamnya.Salah satu indikator ekonomi makro untuk mengetahui peranan dan kontribusi suatu sektor usaha terhadap pendapatan nasional adalah Produk Domestik Bruto. Produk Domestik Bruto (PDB) diartikan sebagai total nilai atau harga pasar (*market prices*) dari seluruh barang dan jasa akhir (*final goods and services*) yang dihasilkan oleh suatu

perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun) (Nanga, 2001). PDB merupakan indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara

PDB disajikan dalam dua konsep harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan. Penghitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan konsep harga konstan *(constant prices)* dengan tahun dasar tertentu untuk mengeliminasi faktor kenaikan harga. Pada saat ini BPS menggunakan tahun dasar 2000.

Tidak dapat dipungkiri bahwa industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB nasional, hal tersebut dilihat dari angka kontribusi tertinggi yang disumbangkan dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), industri pengolahan memberikan kontribusi paling tinggi terhadap PDB atas dasar harga berlaku dan konstan tahun 2000 menurut lapangan usaha dari tahun ke tahun.

Tabel 8 PDB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan UsahaTahun 2004-2012 (milyar rupiah)

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku								
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011*	2012**
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	329,124.60	364,169.30	433,223.40	541,931.50	716,656.20	857,196.80	985,470.50	1,091,447.30	1,190,412.40
2. Pertambangan dan Penggalian	205,252.00	309,014.10	366,520.80	440,609.60	541,334.30	592,060.90	719,710.10	879,505.40	970,599.60
3. Industri Pengolahan	**644,342.60**	**760,361.30**	**919,539.30**	**1,068,653.90**	**1,376,441.70**	**1,477,541.50**	**1,599,073.10**	**1,806,140.50**	**1,972,846.60**
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	23,730.30	26,693.80	30,354.80	34,723.80	40,888.60	46,680.00	49,119.00	56,788.90	65,124.90
5. Konstruksi	151,247.60	195,110.60	251,132.30	304,996.80	419,711.90	555,192.50	660,890.50	754,483.50	860,964.80

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	368,555.90	431,620.20	501,542.40	592,304.10	691,487.50	744,513.50	882,487.20	1,024,009.10	1,145,600.90
7. Pengangkutan dan Komunikasi	142,292.00	180,584.90	231,523.50	264,263.30	312,190.20	353,739.70	423,172.20	491,283.10	549,115.50
8. Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan	194,410.90	230,522.70	269,121.40	305,213.50	368,129.70	405,162.00	466,563.80	535,152.90	598,523.20
9. Jasa-jasa	236,870.30	276,204.20	336,258.90	398,196.70	481,848.30	574,116.50	660,365.50	783,970.50	888,676.40
Produk Domestik Bruto	2,295,826.20	2,774,281.10	3,339,216.80	3,950,893.20	4,948,688.40	5,606,203.40	6,446,851.90	7,422,781.20	8,241,864.30
Produk Domestik Bruto Tanpa Migas	2,083,077.90	2,458,234.30	2,967,040.30	3,534,406.50	4,427,633.50	5,141,414.40	5,941,951.90	6,797,879.20	7,604,759.10

* Angka Sementara

*** Angka Sangat SementaraSumber: Badan Pusat Statistik 2012*

Gambar 6 Grafik PDB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2012

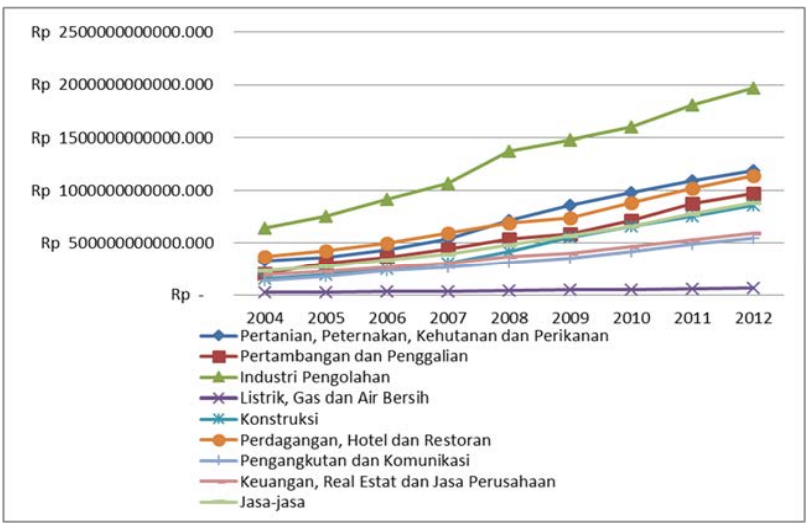

Tabel 8 menunjukkan berbagai kegiatan ekonomi di Indonesia dan kontribusinya terhadap PDB.Dua sektor teratas, yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian, disebut sektor primer.Tiga sektor berikutnya, yaitu sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, dan air minum, serta sektor konstruksi digolongkan sebagai sektor sekunder.Sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor lembaga keuangan, *real estate*, dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa lainnya digolongkan sebagai sektor jasa atau sektor tersier.

Data statistikpada tabel 8 menunjukkan bahwa industri pengolahan merupakan sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDB.PDB berdasarkan harga berlaku tahun 2004 sebesar 644,342.60 milyarrupiah. Pada tahun 2005 dan 2006, kontribusi industri pengolahan terhadap PDB sebesar 760,361.30 milyar rupiah dan 919,539.30 milyar rupiah dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 1,972,846.60 milyarrupiah pada tahun 2012.

Berdasarkan data BPS, PDB atas dasar harga konstan tahun 2000 juga menunjukkan bahwa industri pengolahan memberikan kontribusi paling tinggi terhadap PDB dari tahun ke tahun.

Tabel 9 PDB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000Menurut Lapangan UsahaTahun 2004-2012 (milyar rupiah)

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000								
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 *	2012**
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	247,163.60	253,881.70	262,402.80	271,509.30	284,619.10	295,883.80	304,777.10	315,036.80	327,549.70
2. Pertambangan dan Penggalian	160,100.50	165,222.60	168,031.70	171,278.40	172,496.30	180,200.50	187,152.50	189,761.40	192,585.40
3. Industri Pengolahan	**469,952.40**	**491,561.40**	**514,100.30**	**538,084.60**	**557,764.40**	**570,102.50**	**597,134.90**	**633,781.90**	**670,109.00**
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	10,897.60	11,584.10	12,251.00	13,517.00	14,994.40	17,136.80	18,050.20	18,921.00	20,131.40

5. Konstruksi	96,334.40	103,598.40	112,233.60	121,808.90	131,009.60	140,267.80	150,022.40	159,993.40	171,996.60
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	271,142.20	293,654.00	312,518.70	340,437.10	363,818.20	368,463.00	400,474.90	437,199.70	472,646.20
7. Pengangkutan dan Komunikasi	96,896.70	109,261.50	124,808.90	142,326.70	165,905.50	192,198.80	217,980.40	241,298.00	265,378.40
8. Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan	151,123.30	161,252.20	170,074.30	183,659.30	198,799.60	209,163.00	221,024.20	236,146.60	253,022.70
9. Jasa-jasa	152,906.10	160,799.30	170,705.40	181,706.00	193,049.00	205,434.20	217,842.20	232,537.70	244,719.80
Produk Domestik Bruto	1,656,516.80	1,750,810.20	1,847,126.70	1,964,324.30	2,082,456.10	2,178,858.40	2,314,454.80	2,464,676.50	2,618,139.20
Produk Domestik Bruto Tanpa Migas	1,506,296.60	1,605,261.80	1,703,422.40	1,821,757.70	1,939,625.90	2,036,685.50	2,171,113.50	2,323,763.50	2,480,955.80

* Angka Sementara

*** Angka Sangat SementaraSumber: Badan Pusat Statistik 2012*

Berikut ini adalah grafik PDB atas dasar harga konstan tahun 2000 menurut lapangan usaha tahun 2004-2012.

Gambar 7 PDB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2012

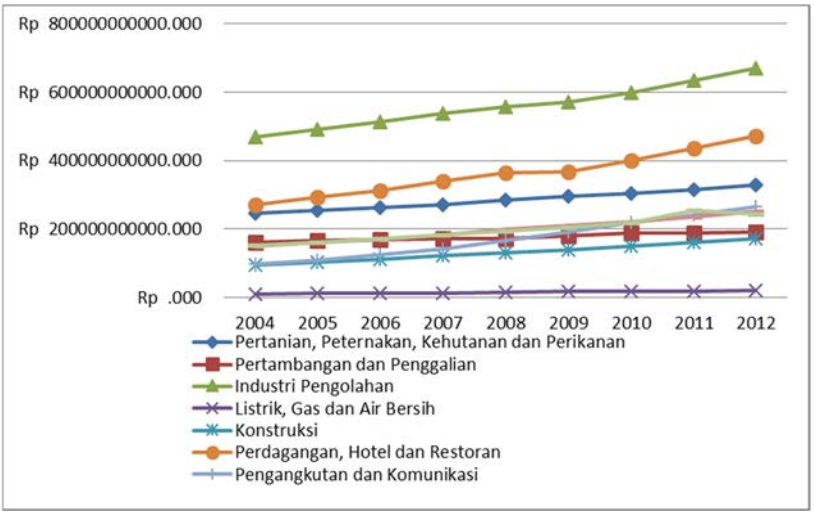

Data statistik pada tabel 9 menunjukkan bahwa industri pengolahan merupakan sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDB.PDB atas harga konstan tahun 2000 menunjukkan bahwa pada tahun 2004, industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 469,952.40 milyar rupiah.Pada tahun berikutnya, industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 491,561.40 milyar rupiah dan terus meningkat mencapai 557,764.40 milyar rupiah pada tahun 2008.

Sehingga dari data diatas dapat disimpulkan bahwa industri pengolahan memberikan kontribusi yang sangat besar jika dibandingkan dengan sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan lingkungan, sektor pertambangan dan penggalian dan sektor-sektor lainnya.Sehingga dapat dikatakan jika sektor industri pengolahanmenjadi sektor yang mempunyai peranan yang sangat vital bagi PDB.

Tabel 10 Distribusi Persentase PDB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2012

Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011*	2012**
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	14.30	13.10	13.00	13.70	14.50	15.30	15.29	14.70	14.44
2. Pertambangan dan Penggalian	8.90	11.10	11.00	11.20	10.90	10.60	11.16	11.85	11.78
3. Industri Pengolahan	**28.10**	**27.40**	**27.50**	**27.10**	**27.80**	**26.40**	**24.80**	**24.33**	**23.94**
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	1.00	1.00	0.90	0.90	0.80	0.80	0.76	0.77	0.79
5. Konstruksi	6.60	7.00	7.50	7.70	8.50	9.90	10.25	10.16	10.45
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	16.10	15.60	15.00	14.90	14.00	13.30	13.69	13.80	13.90
7. Pengangkutan dan Komunikasi	6.20	6.50	6.90	6.70	6.30	6.30	6.56	6.62	6.66
8. Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan	8.50	8.30	8.10	7.70	7.40	7.20	7.24	7.21	7.26
9. Jasa-jasa	10.30	10.00	10.10	10.10	9.70	10.20	10.24	10.56	10.78
Produk Domestik Bruto	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Produk Domestik Bruto Tanpa Migas	90.70	88.60	88.90	89.50	89.50	91.70	92.17	91.58	92.27

* Angka Sementara

*** Angka Sangat SementaraSumber: Badan Pusat Statistik 2012*

Berikut ini adalah grafik distribusi persentase PDB industri pengolahan atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2004-2012.

Gambar 8 Grafik Distribusi Persentase PDB Industri Pengolahan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2012

Dari tabel 10 di atas dapat dilihat bahwa sektor industri memiliki andil yang besar dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional, hal tersebut dapat dilihat dari tingginya kontribusi yang diberikan terhadap PDB nasional melebihi sektor-sektor lain. Meskipun kontribusi yang diberikan cukup tinggi, ternyata pertumbuhannya selama kurun waktu sembilan tahun cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan. Pada tahun 2004 kontribusi yang diberikan adalah sebesar 28,10 persen, pertumbuhan pada tahun berikutnya mengalami penurunan ditunjukkan dengan kontribusi pada tahun 2005 hanya sebesar 27,40 persen dan pada tahun 2007 hanya sebesar 27,10 persen. Pada tahun 2008 kontribusi yang diberikan oleh sektor industri mengalami peningkatan sebesar 27,80 persen tetapi pada kurun waktu 4 tahun terakhir kontribusi sektor industri mengalami penurunan mencapai angka 23,94 persen di tahun 2012.

D. Peranan Sektor Industri Dalam Penyerapan Tenaga Kerja

Pengertian tenaga kerja berdasarkan data BPS (2010) adalah Penduduk usia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja, yang memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan dikategorikan bekerja. Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan tujuan memperoleh nafkah atau membantu memperoleh nafkah paling sedikit satu jam secara terus menerus selama seminggu yang lalu.

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Salah satu sasaran utama pembangunan Indonesia adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun.

Selain sebagai sektor yang berperan menjadi penyumbang produk domestik bruto (PDB), sektor industri juga mempunyai kontribusi lain didalam perekonomian suatu negara yaitu sebagai penyerap tenaga kerja di dalam negara tersebut.

Tabel 11 Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri Tahun 2001-2012

No.	Tahun	Tenaga Kerja (orang)	% Pertumbuhan (Dari tahun ke tahun)
1.	2001	10.492.846	-
2.	2002	10.931.101	4,18%
3.	2003	10.637.445	-2,69%
4.	2004	10.887.638	2,35%
5.	2005	11.952.985	9,78%
6.	2006	11.890.170	-0,53%
7.	2007	12.368.729	4,02%
8.	2008	12.549.376	1,46%
9.	2009	12.839.800	2,31%
10.	2010	13.824.251	7,67%
11.	2011	14.542.081	5,19%
12.	2012	15.367.242	5,67%

Sumber : Badan Pusat Statisik (Agustus 2012)

Berikut ini grafik untuk mempermudah pengamatan data pada tabel 10 mengenai penyerapan tenaga kerja oleh sektor industri dari tahun 2001-2012 :

Gambar 9 Grafik Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri Tahun 2001-2012

E. Sumbangan Sektor Industri terhadap Pendapatan per Kapita

Salah satu komponen pendapatan nasional yang dianggap penting adalah pendapatan per kapita, yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu Negara pada suatu masa tertentu. Nilainya diperoleh dengan membagi produk domestik bruto (PDB) atau produk nasional bruto (PNB) suatu tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut.

Pendapatan per kapita dalam sektor industri ini yaitu dengan membagi PDB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha dengan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam sektor industri. Adapun data sumbangan sektor industri terhadap pendapatan per kapita dari tahun 2004-2012 ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 12 Sumbangan Sektor Industri terhadap Pendapatan per Kapita Tahun 2004-2012

No.	Tahun	Pendapatan per Kapita	% Pendapatan per Kapita
1.	2004	59181,12	6,73%
2.	2005	63612,67	7,23%
3.	2006	77336,09	8,79%
4.	2007	86399,65	9,82%
5.	2008	109682,08	12,47%
6.	2009	115075,12	13,08%
7.	2010	115671,59	13,15%
8.	2011	124200,97	14,12%
9.	2012	128380,00	15,59%
Jumlah		**879539,29**	-

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan data pada tabel 12 dapat diketahui bahwa persentase pendapatan per kapita yang disumbangkan oleh sektor industri relatif mengalami kenaikan.

Adapun untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai sumbangan sektor industri terhadap pendapatan per kapita dari tahun 2004-2012, berikut adalah disajikan diagram dari tabel 12 :

Gambar 10 Grafik Sumbangan Sektor Industri terhadap Pendapatan per Kapita Tahun 2004-2012

BAB VIII
PERSOLAN LIQUIDITAS PERBANKAN

A. Pengertian Liquiditas

Liquiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (cash flow) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai, dimana fungsi - fungsi liquiditas secara umum adalah untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, dan memuaskan permintaan nnasabah agar pinjaman dan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investai menarik yang menguntungkan.

Liquiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Dari sudut aktiva, adalah kemampuan untuk mengubah seluruh asset menjadi bentuk tunai (cash), sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas.

B. Pengelolaan Liquiditas

Pengelolaan liquiditas bank juga merupakan bagian dari pengelolaan leabilitas (liability management). Melalului pengelolaan liquiditas yang baik, bank dapat memberikan keyakinan pada para penyimpan dana bahwa mereka dapt mengambil dananya sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu bank harus mempertahankan sejumlah alat liquid guna memastikan bahwa bank sewaktu-waktu dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Dalam liquiditas terdapat 2 resiko yaitu resiko kelebihan dana, hal ini akan menimbulkan pengorbanan tingkat bunga yang tinggi. Selanjutnya

kekurangan dana, akibatnya dana yang tersedia untuk mencukupi kebutuhan kewajiban jangka pendek tidak ada. Kedua keadaan ini tidak diharapkan oleh bank Karena akan mengganggu kinerja keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Jadi dapat di simpulkan bahwa ketika bank megharapkan keuntungan yang maksimal akan beresiko pada tingkat liquiditas yang rendah atau ketika liquid tinggi berarti tingkat keuntungan tidak maksimal disini terjadi konflik kepentingan antara memperhatikan liquiditas yang tinggi dan mencari keuntungan yang tinggi.

Pengelolaan liquiditas sangat penting bagi bank terutama untuk mengatasi resiko liquiditas yang di sebabkan oleh dua hal diatas. Untuk menjaga agar resiko liquiditas ini tidak terjadi maka yang dapat dilakukan adalah dengan maenjaga asset jangka pendek seperi kas.

C. Perhitungan Ratio Likuiditas

Untuk menilai likuiditas perusahaan terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisa dan menilai posisi liquiditas perusahaan yaitu:

a. Current Ratio

Current ratio biasanya digunakan sebagai alat untuk mengukur keadaan liquiditas suatu perusahaan dan juga merupakan petunjuk untuk dapat mengetahui dan menduga samapai dimanakah kiranya kita, apabila memberikan kredit berjangka pendek kepada seoarang nasabah, dapat merasa aman atau tidak. Dasar perbandingan tersebut di pergunakan sebagai alata petunjuk, apakah perusahaan yang mendapat kredit kira kira mampu atau tidak untuk memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kembali atau pada pelunasan pada tanggal tempo yang sudah di tentukan.

Rumus current ratio

Current ratio= (aktiva lancer: hutang lancer) x 100%

b. Quick ratio

Ratio ini di sebut juga sebagai acid test ratio yaitu perbandingan antara aktiva lancer di kurangi persediaan dengan hutang lancer. Rasio ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam mememnuhi kewajibannya denagn tidak memperhitungkan persdiaan, karena

menganggap persediaan memerlukan waktu lama untuk di realisasi menjadi kas.walaupun pada kenyataannya mungkinpersediaan lebih liquid dari piutang. Rasio ini lebih tajam daripada carren ratio karena hanya membandingkan aktiva yang sangat liquid. Jika carrent ratio tinggi tapi quick ratio rendah, hal ini menunjukkan adanya investasi yang sangat besar dalam persediaan.

Rumus dari quick ratio adalah sebagai berikut

Quick ratio= (aktiva lancer – persediaan) : (utang lancer)x 100%

Pada tahun 2017 akan ditandai oleh ketatnya likuiditas perekonomian, terutama karena deficit anggaran Negara yang cukup besar, walaupun pemerintah telah menargetkan tidak lebih dari 2,5 persen dari PDB. Beban suku bunga obligasi, rasio pinjaman terhadap tabungan (LDR= *loan to deposit ratio*) telah mencapai 92%, ekspektasi lalu inflasi yang lebih besar, stabilitas nilai tukar dan dangkalnya pasar keuangan secara umum adalah beberapa tantangan liquiditas perekonomian yang mewarnai perjalanan tahun ketiga pemerintahan jokowi- JK

Selama tahun 2016, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) di sektor perbankan hanya 5,58 persen, yang lebih rendah dari pada pertumbuhan kredit yang mencapai 6,65 persen. Benar bahwa penghimpunan DPK dipengaruhi oleh pelaksanaan amnesty pajak dan penerbitan surat berharga Negara (SBN). Namun penyaluran kredit dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan resiko sektor rill, yang masih terasa sampai kuartal ketiga tahun 2016. Dua implikasi amat penting dari ketatnya likuiditas adalah fungsi intermediasi perekonomian dari sektor perbankan masih cukup rendah dan koordinasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter masih belum baik.

Pada instrument pasar modal terdapat kecenderungan bahwa *convertible bond* tidak melalui badan koordinasi penanaman modal (BKPM) sehingga data kepemilikan asing tidak terdeteksi secara lengkap oleh pemerinta. Pemerintah dan bank Indonesia juga tidak secara penuh mampu mamantau *devisa hasil ekspor* (DHE) sebagai konsekuensi dari karakter pasar valuta asing di indonesia saat ini. Arus dana asing yang keluar masuk juga menjadi risiko tersendiri, apalagi tidak semua perusahaan di Indonesia melakukan lindung nilai (hedging) dari investasi pasar modal tersebut.

Per 9 November 2016, perbankan memiliki Surat Berharga Negara (SBN) yang dapat diperdagangkan senilai Rp 435,13 Triliun Atau Naik 12,99 Persen dibandingkan dengan posisi per 4 januari 2016 (ytd). Porsi kepemilikan SBN rupiah oleh bank mencapai 24,73 persen dari total SBN rupiah yang dapat diperdagangkan, kebijakan *prefunding* untuk belanja fiskal awal 2017 sebesar Rp 116 triliun. Dalam merealisasikan strategi *prefunding*. Tersebut, pemerintah berencana menerbitkan SBN sekitar Rp 63,5 triliun. Namun, disisi lain, yield yang ditawarkan SBN juga relative tinggi (8-9 persen) sehingga perbadingan juga harus mengeluarkan biaya tinggi dalam menghimpun dana. Waktu penerbitan SBN juga menjadi isu krusial karena sering berdekatan dengan penerbitan instrument depositi atau surat utang bank.

Pasar uang antar bank (PUAB) sebenarnya dapat menjadi instrument untuk memenuhi sumber pendanaan sebagaimana di Negara-negara maju. PUAB disana berfungsi sebagai pemenuhan liquiditas di luar simpanan dan deposito. Akan tatapi, di Indonesia, karakter efisiensi pasar uang tidak terpenuhi sehingga bank tidak saling meminjam. Dalam konteks ini, pendalaman pasar keuangan amat diperlukan, termasuk dalam jangka pendek, banyak yang dapat di repo. Bank-bank kecil seharusnya akan tersegmentasi karena dari dulu pricing atau suku bunganya berada pada tingkat premium, 100-150 basis poin di atas suku bunga pasar. Setidaknya terdapat 110 bank yang banya megandalkan DPK dan seharusnya juga pinjaman antar bank. Suku bunga pasar uang antar bank (PUAB)cukup fluktuatif sehingga bank Indonesia perlu melakukan interverensi di pasar spot dan interverensi di pasar spot dan interverensi PUAB.

Keinginan presiden joko widodo untuk menggunakan yuan China sebagai referensi tampaknya tidak akan terjadi dalam jangka pendek, disamping karena volume Yuan China masih kecil, volume transaksi di tingkat global berkisar 60-70 persen menggunakan dollar AS. Pemerintah sebenarnya perlu lebih serius memikirkan alternative sistem devisa bebas seperti saat ini, setidaknya agar pemerintah dan bank Indonesia memiliki instrument pasar yang lebih baik dibandingkan dengan para spekulan.sekadar catatan, rezim devisa bebas yang di terapkan Indonesia diperkirakan masih akan berlaku sekian tahun ke depan sepanjang peraturan perundangannya blum revisi. Apabila BI ingin menerapkan aturan pemantauan devisa hasil ekspor (DHE), hal tersebut tidak lebih dari

imbauan moral saja. Ketentuan yang ditetapkan dalam UU No. 24/1999 tentang lalu lintas devisa dengan jelas menyebutkan bahwa stiap penduduk bebas memiliki dan menggunakan devisa.

Salah satu faktor dari semakin mengecilnya dana pihak ketiga(DPK) pada setiap perbankan Indonesia adalah tingkah laku dari eksportr Indonesia. Mereka meminjam uang dari perbankan di dalam negeri, tetapi pendapatan dana dari hasil ekspornya di simpan di bank asing. Akibatnya, banyak sekali dana atau devisa hasil ekspor tersebut yang disimpan di bank asing, bahkan yang berkependudukan di luar negeri. Beberapa penjelasan di atas telah lebih dari cukup untuk menggambarka rendahnya fungsi intermediasi perbankan dalam negeri, yang juga menjadi determinan dari rendahnya pertumbuhan ekonomi idonesia

Sebenarnya BI telah berusaha melakukan pendalaman pasar. Repo antar bank kini telah menggunakan Giro Wajib Minimum (GWM). Sebelumnya repo ke BI saja sekarang bisa antar bank. Mereka harus ada jaminan/ koleteral. GWM primer seperti ini patut diapresiasi. Kebijakan BI tentang GWM primer seperti ini patut di apresiasi. Kebijakan BI tentang GWM rata-rata, masyarakat dan pelaku pasar masih menunggu dengan harap –harap cemas, apakah sekian macam instrument ini mampu berkontribusi pada persoalan likuiditas prekonomian dalam sekian tahun mendatang.

D. Persoalan Liuiditas Perbankan

Dr. Anton Hendranata di Indonesia, likuiditas perekonomian didominasi oleh sektor perbankan melalui deposito, sekitar 41 % dari produk domestik bruto (PDB) diikuti saham 27% dan obligasi 14%. Menjelang krisis ekonomi dan moneter 1998, pemerintah mengeluarkan pakjul (paket juli) untuk membatasi kredit, sayangnya, pada 1998, Indonesia jatuh dalam krisis moneter dan perbankan sehingga ada 16 bank yang dilikuidasi. Untuk mengatasi krisis ini, dimulailah program strukturisasi perbankan selama 4 tahun dari 1998-2002 restrukturisasi perbankan ini meliputi: rekapitalisasi perbankan, pembekuan dan penutupan bank, pendirian badan penyehatan perbankan Nasional (BPPN), *bianked guarantee*, *supervision nd law nforcement*. Pengalaman ini membuat Indonesia makin berhati-hati sehingga kita masuk dalam era

makro-mikro prudensial (2003-2009). Dan sejak 2010, perbankan Indonesia mulai memasuki pertumbuhan yang berkesinambungan. pada saaat ini, jumlah bank komersial di Indonesia masih banyak yaitu 118 bank, walaupun sudah jauh brkurang di bandingkan 1998, yang tecatat 222 bank.

Jika dibandingkan dengan Negara kawasan ASEAN, indonesia mempunyai bank komersial terbanyak dan berkali lipat (118). Walaupun jumlah bank sangat banyak, ternyata masyarakat Indonesia yang *bank-able* atau memiliki rekening di bank hanya 36 %. Artinya rakyat Indonesia masih alergi terhadap bank sehingga sebagian transaksi di perekonomian cenderung menggunakan uang kontan (cash). Ini cenderung menghambat, uang yang beredar di perekonomian atau masyarakat kembali ke sistem perbankan. Seperti yang dipaparkan sebelumnya, sektor perbankan Indonesia mengalami segmentasi. Yang terlibat likuidas perbankan yang tidak merata antar bank. Komunikasi dan koordinasi menjadi kunci utama agar suku bunga PUAB O/N tidak mengalami distorsi. Institusi yang terlibat dalam liquiditas perbankan, yaitu bank, BI, pemerintah,dan OJK harus saling percaya dan ada keterbukaan satu dengan yang lain.pada intinya, kita semua berharap likiditas perekonomian berjalan normal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Masyarakat Indonesia harus didorong untuk lebih berpatisipasi dalam kegiatan perbankan. Jika kita lihat rasi uang yang di pegang masyarakat yang di sebut uang kartal (uang kertas + logam) terhadap uang bereadar. Oleh karena itu, ada baiknya transaksi perekonomian yang gunakan uang kontan (*cash*) dikurangi secara bertahap sehingga akan memantu liquiditas perbankan DPK yang masih rendah diharapkan akan melonjak signifikan.

E. Mendorong Sektor Perbankan Lebih Kuat.

Andry Asmoro

Pada awal karirnya Andry tercatat sebagai peneliti di lembaga penyelidikan ekonomi dan masyarakat FEUI peranan perbankan dalam pembiyaan korporasi masih sangat besar dibandingkankan dengan isntitusi keuangan lainnya. Total pembiyaan melalui perbankan masih sekitar 80 %, dibandingkan dengan penerbitan obligasi dan saham korporasi. Likuiditas sektor perbankan yang masih relative dangkal dan inklusi

finansial yang masih rendah menyebabakan sektor keuangan relative lebih mudah untuk dipengaruhi oleh gejolak dari pasar keuangan dunia dengan besaran votalitas yang lebih besar. Terkait dengan tersebut, maka perlu diusulkan beberapa kebijakan sebai berikut:

a. Saat ini perbankan nasional sedang menghadapi tantangan perlambatan pertumbuhan kredit. Berdasarkan data agustus, peryumbuhan kredit terus melambat menjadi hanya 6,8%, yang merupaka level terendah sejak akhir 2009. Perlambatan pertumbuhan kredit di sebabkan oleh kondisi ekonomi yang masih lesu.

b. Diperlukan lebih banyak instrumen keuangan alternative sabagai sumber pembiayaan sektor swasta, misalnya melalui pasar modal. Pada 2016, instrument obligasi korporasi yang digunakan lebih banyak ke intrumen jangka panjang.

c. Sektor keuangan juga harus di perdalam dengan meningkatkan aktivitas pasar repo. Peningkatan aktivitas pasar repo saaat ini masih didominasi oleh instrument surat berharga Negara. Peningkatan aktivitas pasar repo saat ini masih di dominasi oleh instrument surat berharga Negara. Untuk itu perlu di buat aturan yang membolehkan transaksi repo yanga menggunakan *underlying* instrument yang lebih luas dengan tenor yang lebih pendek.

d. Lebih memperluas jangkauan pasar keuangan, peningkatan akses layanan perbankan akan sangat membantu program pemerintah dalm hal pengentasan rakyat dari kemiskinan.perlu di percepat implementasi program national *single payment gateway* bank- bank besar di indoneia harus diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada bank-bank yang lebih kecil dalam menggunakan sistem pembayaran.

F. Normalisasi Peran Perbankan Sabagai Intermediasi Perekonomian

Dr. Aviliani

Bagi Negara berkembang sektor keuangan masih didominasi oleh sektor perbankan (*bank based*). Tahun 2016 menjadi salah satu periode terberat bagi sektor perbankan. Realisasi pertumbuhan kredit secara nasional hanya 7% dan menjadi pertumbuhan terendah dalam beberapa tahun

terakhir. Stimulasi belanja pemerintah tertahan karena rendahnya realisasi. Investasi asing juga melambat karena persoalan iklim investasi. Sementara kinerja ekspor dan impor tertahan oleh gejolak global. Akibat dari turunnya harga komoditas dunia, serta ketidak pastian global, menyebabkan investor lebih memilih investasi jangka pendek yang juga mempengaruhi kondisi domestik.

Ada beberapa hal yang haras dilakukan untuk memperbaiki kinerja perabankan dan sektor keuangan secara keseluruhan:

a. Memacu sektor penggerak ekonomi.

Upaya untuk mendukung perkembangan sektor perbankan juga harus diikuti dengan memacu perkembangan sektor penggerak perekonomian. Beberapa diantaranya adalah infrastruktur, pariwisata dan property. Selain itu, persoalan daya beli harus menjadi perhatian. Dengan demikian, target penyaluran kredit hingga dua digit, sebagaimana yang di tetapkan otoritas jasa keuangan (OJK), dapat di capai.

b. Mengelola likuiditas.

Upaya mengelola likuiditas perbankan tidak dapat dilakukan secara individual bank, tetapi juga harus didukung oleh regulator. Banyaknya regulasi yang menyebabkan migrasi dana dari perbankan ke rekening pemerintah akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan ke depan. Untuk itu, perlu adanya koordinasi antara perbankan dan pemerintah, terutama ketika akan mengeluarkan obligasi. Dengan demikian, perbankan dapat merencanakan sumber likuiditas yang lebih baik dan terencana sehingga mampu menekan suku bunga.

c. Memperbaiki iklim usaha dan bauran kebijakan.

Sektor keuangan menjadi sektor yang diatur ketat oleh regulator (*highly regulated*). Sayangnya, sektor riil, yang menjadi sektor terkait langsung dengan aktivitas keuangan, tidak di perbaiki secara menyeluruh baik dari sisi arah kebijakan maupun peta jalan, sehingga menyebabkan terbatasnya sektor keunagan menjalankan fungsi intermediasinya.

d. Meningkatkan literasi keuangan.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan aktivitas sektor perbankan adalah memperdalam literasi keuangan. Hingga saat ini

tingkat literasi keuangan di Indonesia hanya 21,7% Filipina 27%, Malaysia 66% Thailand 77% dan singapur 98%

G. Jalan Keluar Dangkalnya Sektor Keuangan

Bhima Yudhistira Adhinegara

FINTECH atau Financial Technology mengacu pada inovasi jasa kuangan dengan sentuhan jasa teknologi modern. Keberadaan FinTech mampu merevolusi akses keuangan yang selama ini belum bisa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional. Dengan kecepatan, jaringan dan kemudahan dalam menarik simpanan atau menyalurkan pinjaman, FinTech jelas menawarkan masa depan bagi jasa keuangan. Era masyarakat yang antri di depan bank akan segera berakhir. Potensi FinTech di Indonesia cukup besar seiring kegagalan perbankan dalam meningkatakan porsi simpanan terhadap produk domestik bruto (PDB) yang terbilang sangat lambat. Dangkalnay sektor keuangan juga terbukti dalam hal kredit. Kredit sifatnya masih beredar di kota-kota besar, terjadi konsentrasi penyaluran kredit yang kurang berpihak pada masyarakat di pedesaan. Akses kredit ke UMKM juga berkaitan dengan mahalnya biaya untuk menyalurkan kredit ke sektor UMKM. Hal itu terjadi karena selama ini model penyaluran kredit sifatnya masih sangat tradisional dan konvensional. Salah satu jalan kuar yang ditawarkan adalah terus mendorong FinTech. Akses simpanan ataupuan pinjaman di era FinTech akan dilakukan melalui tlepon genggam tanpa bertatap muka. Peralihan dari *offline* ke online*banking* ini jelas akan memotong biaya gemuk yang selama ini membuat *net interest margin* (NIM) menjadi tinggi. Pada akhirnya, dengan menipisnya biaya operasional akan membuat bunga pinjaman menjadi lebih murah dan ujungnya masyarakat serta pelaku usaha kecil yang lebih diuntungkan.

H. Memecah Kebutuhan Likuiditas Untuk Memicu Pertumbuhan Inklusif

Budi Hikmat

Keterbatasan liquiditas ditunjukkan oleh rasio dana pihak ketiga (DPK) terhadap produk domestik bruto (PDB) kurang dari 40%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan singapura yang mencapai 130%.

Pemerintah kita menrbitkan obligasi Negara termasuk yang menyasar investor perseorangan tidak hanya unyuk membiayai deficit anggaran. Pemerintah sendiri membuat obligasi Negara menarik dengan menetapkan tingkat kupon yang lebih tinggi ketimbang suku bunga deposito. Adapun perusahaan membutuhkan liquiditas, terutama melalui kredit perbankan, untuk pembiyaan investasi guna mengapitalisasi prospek pemulihan ekonom.

Reformasi pada sisi pengeluaran dengan memperbaiki sistem subsidi dan alokasi untuk ifrastruktur yang lebih banyak, pemerintah memanfaatkan momentum emnesti pajak untuk meningkatkan *tax based* dan penegakan kepatuhan pajak (*tax compliance*). Pemerintah juga berencana meninggalkan *value added tax.* Dengan perluasan basis pajak dan kepatuhan pajak, pemerintah dapat menurunkan tariff pajak pendapatan, baik untuk badan maupun perserongan, yang secara regional kompetitif. Kalau dipahami lebih dalam, berbagai kebijakan untuk memacu pertumbuhan yang lebih gegas baru semacam *necessary condition* di tujukan untuk mencegah risiko *middle income trap* dan ketimpangan kemakmuran. Sebab, *sufficientcondition* yang pemungkas sangat bergantung pada kemampuan masyarakat mengelola beragam jenis kelas asset yang akan menjadi sumber pembelanjaan setelah pensiun.

I. Upaya Meningkatkan Liquiditas

Prof. Dr. Hermanto Siregar

Untuk mengatasi persoalan likuiditas, ada beberapa langkah yang dapat ditempuh. Pertama, meningkatkan *saving rate* (rasio tabungan masyarakat terhadap produk domestik bruto/ PDB). Sekitar 60% penduduk Indonesia tidak memiliki rekening bank.

Kedua, terkait dengan upaya peningkatan *saving rate,* bank daerah maupun bank perkreditan rakyat perlu didorong agar lebih giat meningkatkan jumlah penabung atau dana pihak ketiga (DPK). Dengan langkah tersebut, implementasi program-program Otoritas Jasa Keuangan ataupun Bank Indonesia terkait *financial inclucion* perlu semakin ditingakatkan.

Ketiga, menekan *non performing loans* (NPL) sembari menyelesaikan kredit/ pebiayaan bermasalah. Saat ini nilai NPL atau *non performing finance* (NPF untuk perbankan syariah) masih relatif tinggi sehingga sebetulnya tersedia "ruang" yang cukup lebar untuk menurunkannya secara signifikan. Dengan demikian, penurunan non perfoming loan (NPL) yang disertai dengan penyelesaian kredit/ pembiayaan bermasalah akan mendorong kenaikan likuiditas.

Keempat, mendorong perbankan untuk menurunkan *net interest margin* (NIM) yang saat ini masih relatif tinggi dibandingkan dengan NIM dibeberapa negara tetangga. Penurunan suku bunga pinjaman dilakukan sedemikian rupa sehingga dalaam jangka menengah/ panjang menurunkan NIM haruslah diiringi dengan peningkatan efisiensi perbankan, yaitu dengan menurunkan BOPO. Penerapan kedua hal ini secara simultan dapat mendorong peningkatan ketersediaan dana untuk dipinjamkan kepada debitur.

Kelima, terus melaksanakan perbaikan iklim invertasi ditataran nasional ataupun ditataran daerah sehingga investasi langsung asing (*foreign direct invesment*, FDI) meningkat. Masuknya FDI kedalam industri-industri ini serta kedalam sektor pariwisata akan meningkatkan dana segar (yang tentunya tidak bersifat *hot money*) kedalam perekonomian Indonesia.

Keenam, likuiditas juga dapat ditingkatkan melalui peningkatan melalui peningkatan ekspor (peningkatan devisa). Perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa depresiasi rupiah ternyata tidak diikuti dengan peningkatan ekspor.

BAB IX
KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

Penduduk memiliki peran penting dalam perekonomian.Penduduk berfungsi ganda dalam perekonomian karena berada pada sisi permintaan maupun sisi penawaran. Di sisi permintaan, penduduk adalah konsumen dan sumber permintaan akan barang-barang dan jasa. Di sisi penawaran, penduduk adalah produsen jika ia pengusaha atau pedagang; atau tenaga kerja jika ia hanya bekerja dalam konteks pembangunan. Pandangan terhadap penduduk terpecah menajadi dua, yaitu ada yang menganggapnya sebagai penghambat pembangunan, dan ada pula yang menganggapnya sebagai pemacu pembangunan.

A. Konsep Teoritis Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Indonesia

Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi dan usaha membangun perekonomian.Dalam usaha meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi, penduduk memegang peranan yang sangat vital karena menyediakan tenaga kerja, pimpinan perusahaan dan tenaga usahawan yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Dalam kehidupannya, penduduk akan menghadapi suatu masalah yang cukup rumit, di mana yang paling utama adalah pesatnya laju pertambahan jumlah penduduk di negara-negara berkembang. Pertambahan penduduk yang pesat dengan sendirinya akan menambah jumlah angkatan kerja.

1. Konsep Kependudukan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan mempunyai jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa pada tahun 2013.Indonesia menempati urutan keempat dalam jumlah penduduk terbesar di dunia setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat.

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja menurut BPS adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Usia kerja di Indonesia adalah 15-64 tahun. Sedangkan penduduk bukan usia kerja adalah penduduk yang berusia 0-14 tahun dan penduduk yang berusia 65 tahun ke atas. Penduduk usia kerja dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan, tetapi untuk sementar tidak bekerja , maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Angkatan kerja terdiri dari bekerja dan pengangguran. Menurut BPS, bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan tujuan memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara terus-menerus dalam seminggu ynag lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu usaha/kegiatan ekonomi).

Angkatan kerja yang bekerja dapat dikelompokkan menjadi:

1) Penduduk yang bekerja menurut kelompok umur, yang tujuannya adalah melihat kontribusi pekerja muda, pekerja prima, dan pekerja tua dalam dunia pasar tenaga kerja.

2) Penduduk yang bekerja menurut tingkat pendidikan, yang tujuannya adalah melihat seberapa besar pasar tenaga kerja dapat menyerap tenaga kerja denga tingkat keahlian atau keterampilan tertentu atau sesuai denga tingkat pendidikannya.

3) Penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha, dimana distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha akan menunjukkan sektor ekonomi apa yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

4) Penduduk menurut status pekerjaan, dimana kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha atau kegiatan.

5) Penduduk yang bekerja menurut jumlah jam kerja, yaitu proporsi penduduk yang bekerja menurut jumlah jam kerja

Pengangguran

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaab dan belum mendapatkannya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. BPS mengumpulkan data tentang pengangguran melalui survey rumah tangga, seperti Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Sensus Penduduk, Survei Penduduk Antarsensus (SUPAS), dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya:

1) pengangguran friksional adalah pengangguran yang bersifat sementara akibat adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dan pembuka lamaran pekerjaan.

2) Pengangguran structural adalah keadaan dimana penganggur yang mencari pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju perekonomian suatu daerah, semakin meningkat kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas lebih baik dari sebelumnya.

3) Pengangguran Musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus nganggur.

4) Pengangguran Siklis adalah pengangguran siklis adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah ketimbang penawaran kerja.

5) Pengangguran Teknologi adalah pengangguran yang ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia.

Jenis pengangguran berdasarkan cirinya

1) Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedng mempersiapkan suatu usaha.

2) Pengangguran Tersembunyi merupakan pengangguran yang terjadi karena jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih besar dari yang sebenarnya diperlukan agar dapat melakukan kegiatannya dengan efisien.

3) Pengangguran Bermusim merupakan keadaan seseorang yang menganggur karena fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek,

4) Setengah Menganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.

Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Menurut BPS, rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang biasanya tinggal bersama dalam suatu bangunan serta mengelola makan dari satu dapur.

2. Pertumbuhan Penduduk

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk yang akan datang.

Akan tetapi, prediksi jumlah penduduk dengan cara ini belum dapat menunjukkan karakteristik penduduk di masa yang akan datang. Karena itu diperlukan proyeksi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang membutuhkan data yang lebih rinci. Faktor yang mengakibatkan pertumbuhan penduduk menurut BPS ada 3 komponen di antaranya:

1) Kelahiran (fertilitas)

2) Kematian (mortalitas)

3) Migrasi, baik migrasi masuk maupun migrasi keluar

Tabel 13 Analisis Growth and Share Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 1998-2017

Tahun	Jumlah Penduduk Total (Juta Jiwa)
1998	204.423
1999	207.440
2000	205.132
2001	207.928
2002	210.736
2003	213.551
2004	216.382
2005	219.205
2006	222.051
2007	224.905
2008	227.779
2009	230.633
2010	233.477
2011	236.331
2012	239.179
2013	242.014
2014	252.124
2015	255.461
2016	258.708
2017	261.890

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

3. Konsep Ketenagakerjaan

Menurut Mulyadi S (2002:59), tenaga kerja adalah manpower yang berarti penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam akitvitas tersebut.

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Sedangkan menurut Sumitro Djojohadikusumo, tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja.Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud dengan tenaga kerja (labor) bukanlah semata-mata tenaga kerja saja, tetapi lebih luas lagi yaitu human resources (sumber daya manusia).

4. Kesempatan Kerja

1) Pengertian Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan atau intansi (Disnakertrans, 2002).Model kesempatan kerja dapat dijelaskan dari dua sudut pandang, yaitu dari teori klasik dan teori Keynes. Teori klasik mengemukakan pandangannya mengenai kesempatan kerja, yaitu tingkat output dan harga keseimbangan atau ekuilibrium hanya bisa dicapai kalau perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja penuh. Sedangkan menurut Keynes, kegiatan perekonomian tergantung pada segi permintaan yaitu tergantung pada pembelanjaan atau pengeluaran agregat yang dilakukan perekonomian pada suatu waktu tertentu.Pengeluaran agregat adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam tahun tertentu, dan hanya bisa diukur untuk tahun tertentu.

2) Jenis-jenis Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja akan menampung semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia. Kebijakan negara dalam kesempatan kerja meliputi upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan dan perluasan lapangan kerja di setiap daerah, serta perkembangan jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia agar dapat memanfaatkan seluruh potensi pembangunan di daerah masing-masing.

Bertitik tolak dari kebijakan tersebut dalam rangka mengatasi masalah perluasan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran, Departemen Tenaga Kerja dalam UU No. 13 Tahun 2002, tentang Ketenagakerjaan memandang perlu untuk menyusun program yang mampu, baik secara langsung maupun tidak langsung, mendorong penciptaan lapangan kerja

dan mengurangi pengangguran. Program-program ini dituangkan dalam kebijakan pokok Sapta Karya Utania yang terdiri dari:

- Perencanaan tenaga kerja nasional
- Sistem informasi dan bursa tenaga kerja yang terpadu
- Tenaga kerja pemuda mandiri professional
- Pemagangan
- Hubungan industrial pancasila dan perlindungan tenaga kerja
- Ekspor tenaga kerja

Perluasan dan penciptaan kesempatan kerja adalah melalui:

a) Kebijakan Makro seperti penyederhanaan mekansime investasi, pengembang sistem pajak yang ramah pengembangan usaha, sistem kredit yang menggerakkan sektor riil.

b) Kebijakan Regional, yaitu kebijakan sektoral (di sektor pertanian dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan (koperasi) yang membentuk kelompok yang terdiri dari beberapa usaha kecil (UKM) dalam pengolahan hasil pertanian, perbaikan teknik usaha tani, hingga pengembangan sistem pengemasan sesuai kebutuhan pasar di luar komunitas. Sementara itu, di sektor industri melalui penyederhanaan mekansime investasi, penataan sistem keamanan yang lebih baik, melakukan promosi peluang investasi daerah serta di sektor lainnya melalui sistem regulasi dan perizinan usaha yang lebih sederhana dan kebijakan khusus (usaha kerajinan dan makanan bagi wanita di pedesaan, TKMT (Tenaga Kerja Muda Terdidik) yaitu program perluasan kesempatan kerja bagi lulusan SLTA ke pedesaan.

Tabel 14 Analisis Growth and Share Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 1998-2017

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja Total (Juta Jiwa)
1998	138.556
1999	141.096
2000	141.170
2001	144.033
2002	148.729
2003	152.649
2004	153.948
2005	155.549
2006	160.811
2007	164.118
2008	166.641
2009	169.328
2010	172.070
2011	171.756
2012	173.926
2013	176.662
2014	182.990
2015	235.589
2016	239.058
Feb 2017	124.538

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

B. Potret Kependudukan dan Ketenagakerjaan Indonesia

1. Penduduk

Penduduk Indonesia cenderung mengalami kenaikan.Dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun mengalami kenaikan.Namun laju pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 1998-2013 cenderung mengalami penurunan sedangkan tahun 2014 dan tahun berikutnya cenderung mengalami kenaikan.Hal ini terjadi karena adanya program Keluarga Berencana (KB) yang berhasil menekan angka kelahiran.

Pertumbuhan penduduk berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi karena akan memperluas angkatan kerja, namun tentunya harus didukung dengan SDM yang memadai dan mempunyai daya saing yang handal. Jika belum memiliki daya saing, laju pertumbuhan penduduk diasumsikan harus berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan antara penduduk dan pendapatan Negara.

Penduduk Usia Produktif

Usia produktif adalah tahap pertumbuhan / perkembangan dan mengalami emosi yang tidak stabil, yaitu 17+ setelah itu melewati tahap pendewasaan diri melalui transisi massa dan cerita juga pemilahan sikap serta perilaku, 20+ - 57 sudah matang dan siap menjalani transisi yang dilalui dalam kehidupan.

Penduduk Usia Non-produktif

Penduduk usia non-produktif adalah usia di mana seseorang belum mencapai usia untuk mencari pekerjaan (umur < 15 tahun) dan seseorang yang sudah berumur (umur 65 tahun lebih).

2. Ketenagakerjaan

Usia Kerja

Peningkatan laju pertumbuhan usia kerja yang tinggi diimbangi dengan laju pertumbuhan penduduk, dan meskipun selama tahun tersebut laju pertumbuhannya tinggi, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Besarnya jumlah penduduk Indonesia menurut usia kerja ini mengindikasikan bahwa Negara Indonesia mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang melimpah. Apabila dibandingkan antara angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, sebagian besar penduduk berada pada angkatan kerja.Ini berarti bahwa penduduk di Indonesia didominasi oleh orang yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan.

Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi untuk sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Untuk penurunan jumlah penduduk dan tingkat angkatan kerja merupakan dampak dari krisis moneter yang terjadi, yang kemudian menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi.

Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya.Kondisi kenaikan bukan angkatan kerja disebabkan karena

meningkatnya jumlah penduduk dan pertumbuhan usia kerja dari tahun sebelumnya. Penurunan pertumbuhan bukan angkatan kerja ini disebabkan oleh dampak krisis moneter yang membuat tidak stabilnya pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Bekerja

Bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam.Peningkatan kondisi ini dipengaruhi oleh usaha yang dilakukan pemerintah, terutama oleh dukungan paket stimulus dan penurunan suku bunga secara konsisten serta ditopang oleh konsumsi domestik yang tinggi.Hal ini terjadi karena dampak jangka panjang dari krisis ekonomi.Selain itu, pada tahun tersebut pertumbuhan ekonomi Indonesia juga belum stabil dan jumlah penduduk di Indonesia juga mengalami penurunan.

Pengangguran

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Peningkatan pengangguran di Indonesia disebabkan karena usia kerja dan jumlah penduduk menurut usia produktif serta angkatan kerja juga terus meningkat. Sementara itu, kesempatan kerja tidak diperluas sehingga tidak sebanding antara para pencari kerja dan kesempatan kerja yang tersedia.Ini mengakibatkan peningkatan pengangguran di Indonesia.Penurunan jumlah pengangguran di Indonesia terjadi karena adanya penurunan jumlah angkatan kerja dan pertumbuhan ekonomi setelah krisis global secara perlahan mulai membaik kembali, ditandai dengan adanya peningkatan ekspor impor yang kemudian berpengaruh ke tingkat pengangguran.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada waktu dalam periode.

Peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan usia kerja dari tahun-tahun sebelumnya yang

kemudian mendorong pertumbuhan TPAK yang cukup baik. Sedangkan penurunannya terjadi karena masalah yang dialami yaitu faktor politik, inflasi, krisis di kawasan euro, dan hubungan industrial.Namun, yang paling menjadi fenomena adalah adanya rujukan unjuk rasa buruh yang menuntut kesejahteraan yang pada akhirnya mempengaruhi TPAK saat itu.

4. Analisis Tren

Analisis tren adalah metode analisis statistika yang ditujukan untuk melakukan estimasi atau peramalan di masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan yang baik, di butuhkan berbagai informasi (data) yang cukup banyak dan diamati dalam waktu yang relative cukup panjang, sehingga hasil analisis dapat mengetahui sampai seberapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan tersebut.

Secara teoritis, dalam analisis time series hal yang paling menentukan adalah kualitas dan keakuratan data-data yang diperoleh, serta waktu atau tahun data-data tersebut dikumpulkan. Jika data yang dikumpulkan semakin banyak, maka semakin baik estimasi atau peramalan yang diperoleh. Sebaliknya jika data yang dikumpulkan semakin sedikit, maka hasil estimasi atau peramalannya akan semakin jelek. Metode yang digunakan untuk melakukan analisis time series adalah garis linear secara bebas (free hand method), metode setengah rata-rata (semi average method), metode rata-rata bergerak (moving average method), dan metode kuadrat terkecil (least squares method).

Menurut prediksi, pada tahun 2045 Indonesia akan mengalami bonus demografi, yaitu jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari penduduk non-produktif. Kondisi ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk menjadi negara produktif yang memiliki jumlah tenaga kerja yang berkualitas demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara global, namun bisa juga penuh resiko.

Agar peningkatan jumlah penduduk ini bisa kita jadikan peluang, maka pendidikan dan keterampilan harus ditingkatkan.Jadi, setiap orang yang ingin produktif harus meningkatkan kualitas kemampuannya sehingga mudah mendapatkan pekerjaan dan tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja asing.

BAB X
PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF

A. Definisi dan Konsep

Ali dan Zhuang (2007), Ali dan Son (2007), serta Rauniyar dan Kabur (2009), tidak ada kesepakatan bersama mengenai definisi atau tidak ada definisi umum perihal apa yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi inklusif. Namun demikian, konsepnya dibangu di atas dasar dua konsep lainnya, yakni inklusif dan pembangunan, dan inklusif adalah sebuah proses dan sekaligus sebuah tujuan. Inklusif adalah mengenai sebuah masyarakat atau komunitas yang sedang berubah untuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan yang ada ditengah masyarakat dengan menghilangkan semua rintangan-rintangan yang ada yang mendiskriminasi atau membuat individu-individu / kelompok-kelompok masyarakat tertentu menjadi eksklusif.

Bagi Prasetyantoko, dkk. (2012), Pembangunan inklusif adalah pembangunan untuk semua orang, tidak peduli latar belakangnya, agamanya, sukunya, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Dalam hal peluang, untuk memberikan semua anggota dari sebuah masyarakat peluang-peluang yang sama, menurut Sachs (2004), strategi pembangunan ekonomi yang inklusif harus memiliki tiga (3) komponen paling penting, *pertama*, menjamin hak-hak politik, sosial, dan kewarganegaraan. *Kedua*, semua warga negara harus memiliki akses yang sama ke semua program kesejahteraan bagi orang-orang cacat, ibu-ibu, anak-anak, dan orang tua, yang didesain untuk mengkompensasi ketidaksamaan secara fisik atau alamiah. *Ketiga*, semua populasi juga harus mendapatkan peluang-peluang yang sama terhadap akses ke pelayanan-pelayanan publik, seperti pendidikan, perlindungan/jaminan kesehatan, dan perumahan.

Pembangunan tiga komponen ini dengan akses sepenuhnya bagi semua orang membuat peluang untuk mencapai pembangunan ekonomi inklusif lebih besar.

Menurut Elfindri, guru besar ekonomi sumber daya manusia (SDM) Universitas Andalas, dalam konsepsi pembangunan ekonomi inklusif, bayak aspek yang perlu di perhatikan, di antaraya pembngunan infrastruktur, kususya infrastruktur ekonomi (baik fisik maupun non-fisik), pembngunan kesehatan dan pembngunan pendidikan (fasilitas fisik, SDM dan sistem pelayanan), yang merupakan tiga komponen penting bagi semua penduduk, termasuk kelompok rumah tangga yang tinggal di daerah-daerah pedalaman terpencil.

Ide dari pembangunan ekonomi yang inklusif pertama kali muncul setelah diperkenalkan didalam tujuan-tujuan pembangunan milenium atau dikenal secara luas dengan sebutan MDGs, yang dimotivasi oleh banyak fakta bahwa banyak negara di dunia yang telah mencapai hasil-hasil yang menakjubkan didalam pembangunan jangka panjang mereka dalam banyak bentuk, termasuk laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat pendapatan riil masyarakat perkapita yang tinggi, dan perubahan struktur ekonomi yang pesat dari berbasis pertanian ke berbasis industri. Fakta menunjukkan banyak negara dengan laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang tinggi, namun mereka tidak berhasil menekan tingkat kemiskinan, semetara banyak negara lain laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun yang relative rendah, tetapi jumlah orang yang hidup dibawah garis kemiskinan berkurang setiap tahun dengan laju yang menakjubkan. UNCTAD (2010) berargumen bahwa masalah fundamental dalam mencapai Millenium *Development Goals* (MDGs) selama ini adalah strategi pembangunan ekonomi yang dditerapkan oleh banyak Negara yang kurang inklusif yang mengintegrasikan dan mendukung ambisi pembangunan SDM mereka.

Kemiskinan adalah sebuah konsekuensi dan juga sebuah peyebab dari ketidak mampuan. Oleh karena itu, kemiskinan tidak akan bisa berkurang tanpa mengikutsertakan orang-orang peyandang disabilitas di dalam proses pembangunan. Mentri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabinet 2009-2014, Linda Amalia Sari Gumelar, bahwa pembngunan ekonomi inklusif membuka peluang-peluang yang lebih komprehensif bagi kaum perempuan untuk mengakses pendidikan yang lebih baik dari

sebelumya. Ia juga mengatakan pentingya penerapan prinsip kemitraan yang sama dalam pembngunan ekonomi sebagai strategi yang tepat untuk menerapkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembngunan.

B. Strtegi Pengembangan Inklusif Indonesia

1. Mencari Kebijakan-Kebijakan Yang Tepat

Pada periode 1997-1998 indonesia dilanda sebuah krisis ekonomi tebesar yang Indonesia pernah alami sejak merdeka tahun1945, yang dikenal dengan sebutan krisis keuangan Asia. Pada tahun 1998, saat krisis tersebut mencapai titik terpuruknya, kondisi Indonesia diperparah dengan kerusuhan sosial dan krisis politik (Mei) yang tidak ada satu orang pun di Indonesia dan diluar negeri yang pada saat itu menduga hal itu akan pernah terjadi di Indonesia (apalagi menduga presiden Suharto akan lengser). Sejak itu, masyarakat Indonesia memutuskan untuk mengambil sebuah langkah baru dalam sejerah, yakni langkah menuju demokrasi.sistem politik Indonesia juga mengalami sebuah transformasi secara fundamental dengan diterapkannya demokrasi dan desentralisasi, serta dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam era setelah 1998, yang dikenal dengan era reformasi, perhatian pemerintah telah bergeser menuju pembangunan ekonomi nasional yang inklusif. Semua sepakat bahwa kebijakan-kebijakan yang diperlukan adalah yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyrakat lewat pemberian peluang pendidikan, pelayanan kesehatan, perumahan, akses air bersih, kesempatan kerja atau membuka usaha, dan lainnya sebesar-besarnya kepada semua anggota masyarakat, tentu secara proporsional atau dalam kata lain, diperlukan empat kebijakan utama, yaitu kebijakan pendidikan, kebijakan jesehatan, kebijakan perumahan, dan kebijakan kesempatan kerja.

Pada bidang pendidikan, persoalan utama adalah sulitnya kelompok warga miskin atau kelompok masyarakat yang tinggal di daerah-dearah terpencil mendapatkan akses ke pendidikan, apalagi sekolah atau perguruan tinggi berkualitas baik. Menurut Elfindri, pembangunan pendidikan di Indonesia selama ini sebaiknya dikoreksi dengan lebih mendayagunakn sumber daya yang ada dengan mempertajam penyediaan pendidikan layanan khusus. Diperlukan penanganan khusus agar keberlangsungan pendidikan anak-anak yang mendiami daerah-daerah tematik disesuaikan

pula dengan penyiapan masa depan mereka agar dengan pendidikan baik yang mereka dapat mereka mampu mandiri di kemudian hari.

Pada bidang kesehatan, Elfindri menegaskan bahwa dalam penyediaan layanan kesehatan di daerah-daerah tematik harus diperhatiakn beberapa hal berikut ini: keterjangkauan layanan, teknologi kesehatan, akses terhadap *input* kesehatan dan kampanye tingkah laku yang kondusif terhadap hidup bersih dan gizi seimbang. Agar pembangunan pendidikan dan kesehatan yang inklusif bisa tercapai, menurut Elfindri, perlu mendeteksi akar permasalahannya (misalnya masalah kemiskinan) yang tidak dapat digeneralisasikan sama untuk semua daerah dalam kondisi normal.

Sedangkan aspek kependudukan penting untuk diperhatikan karena angka kelahiran di indonesia relatif masih tinggi. Selain pasangan usia subur (PUS) memiliki pendidikan rendah dan capaian ekonominya juga rendah angka ketidak jangkaunya PUS yang ingin mengatasi kelahiran masih cukup tinggi di kisaran 11-12 % (konfirmasi dari hasil survay demograsidan kesehatan indonesia (SDKI) 2012). Oleh karena itu dia menegaskan bahwa jangkauan pada kepastian program keluarga berencana (KB) di daerah-daerah sulit adalah suatu yang besar manfaatnya dalam jangka panjang.

2. Strategi dan kebijakan pemerintah

Dalam penyampaian pidatonya mengenai pembangunan nasional dari perspektif regional di depan Dewan Perwakilan Rakyatt Republik Indonesia (DPRI) pada agustus 2009, Presiden Susilo Bmbang Yudhoyono (SBY) mengatakan bahwa paradigm pembangunan untuk semua dalam konteks Indonesia hanya bisa dilaksanakan dengan mengadopsi 6 (enam) strategi pembangunan fundamental (SNRI,2001). *Pertama*, sebuah strategi pembangunan inklusif yang menjamin kesamaan dan keadilan yang respek serta memelihara keragaman masyarakat Indonesia.

Dasar skala dari prioritas dan strategi dari masing masing RPNJM di rangkum sebagai berikut:

a. RPNJM pertama 2005-2009 diarahkan pada reformasi dan pembangunan indonesia di semua bidang yang bertujuan untuk menciptakan sebuah indonesia yang aman dan damai adil dan demokrasi, dan yang memiliki sebuah populasi yang kesejahterannya terus meningkat.

b. RPNJM kedua 2010-2014 bertujuan pada perluasan konsolidasi dari reformasi di indonesia di semua bidang dengan memberi penekanan pada upya-upaya untuk peningkatan kualitas SDM, termasuk mendorong pembngunan kapasitas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan memperkuat daya saing ekonomi nasional.

c. RPNJM ketiga 2015-2019 pembngunan ekonomi di semua bidang dengan penekanan pada pencapaiyan daya saing ekonomi nasional yang tinggi berdasarkan daya saing yang tinggi dari sumber daya alam SDA, dan kualitas yang baik dari SDM dan dengan kemampuan yang terus bertambah dalam penguasan iptek.

d. RPNJM keempat 2020-2025 bertujuan untuk sebuah masyarakat indonesia yang mandiri,maju,adil, dan makmur melalui akselerasi dari proses pembngunan di berbagai bidang dengan menekankan pada struktur ekonomi yang terrealisasi yang lebih kooh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah di tanah air, dan di dukung oleh SDM berkualitas dan daya saing tinggi.

Strategi pembangunan fundamental kedua (2) adalah bahwa dalam kerangka kerja dari pembanguana untuk semua orang, konsekoensi dari pembanguan Indonesia harus punya sebuah dimensi wilayah. Ini artinya,setiap provinsi,setiap kabuaten dan kota, dan bahkan setiap kecematan merupakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang harus mengkapitalisasi semua potensi yang dimiliki setiap wilayah (provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan), apakah itu SDA,SDM,atau lokasinya yang strategis.

Srategi pembangunan fundamental ketiga (3) adalah untuk menciptakan sebuah ekonomi nasional terintgrasi didalam era globalisasi.Indonesia adalah anggota dari banyak kelompok ekonomi regional yang pro rebelisasi perdagangan internasional, seperti ASEAN dan APEC, dan juga anggota dari banyak lembaga dunia yang juga pro perdaganag bebas dunia, serti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Ini artinya ekonomi Indonesia berhubungan dengan ekonomi global, dan Indonesia punya komitmen penuh untuk megeliminasi semua hambatan-hambatan perdagangan antara Indonesia dengan dunia, tetapi pada waktu bersamaan, Indonesia harus memnafaatkan hubunganya denagn ekonomi dunia untuk mendaptkan keuntugan semaksimum mungkin bagi masyarakt Indonesia.

Strategis pembangunan fundamental keempat (4) pelajaran-pelajaran yang Indonesia dapat dari krisis ekonomi global selama periode 2008-2009 adalah fakta bahwa Negara-negara yang mampu menghadapi resesi ekonomi global atau bisa bertahan salama resesi terjadi adalah negara-negara dengan sebuah ekonomi domestik yang kuat lebih lanjut sebuah ekonomi domsetik yang kuat juga menjamin kemampuanya memnuhi ksemua kebutuhan dasarnya (mandiri).

Strategi pembanguan fundamental kelima(5) adalah untuk mengharmonisasikan dan membuat keseimbangan antara pertumbuahan dan pemerataan (pertumbuan dengan pemerataan). Strategi seperti ini juga merupakan sebauh koreksi atau penyempurnaan terhadap kebijakan-kebijakan pembagunan sebelumnya, dengan tujuan untuk memperbesar damapak positif dari pembanguna ekonomi yang dirasakan oleh semua anggota masyarakat, yang dikenal dengan sebutan efek '*trickle-down*'.Strategi efek 'mengalir ke bawah' ini mengamsumsikan adanya kebutuhan untuk memprioritasakan perumbuhan ekonomi di atas pemerataan.Pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga bertujuan menciptakaan pekerjaan bagi semua dengan mendukung pertumbuhan sektor-sektor riil dan pada waktu bersamaan, pembangunan ekonomi focus pada pengurangan atau eliminasi kemiskinan lewat kebijakan-kebijakan revitalisasi pertanian dan perdesaan dan program-program pro rakyat.

Strategis pembangunan fundamental keenam (6) merupakan esensi dari pembangunan yang adil dan merata,yang adalah sebuah pembangunan ekonomi yang menekankan pada peningkatakan kualitas manusia. Didalam strategi ini, masyarakat Indonesia tidak semata- mata dia nggap sebagai objek, tetapi sebaliknya , sebagi subjek pembangunan. Didalam strategi ini, masyarakat atau SDM adalah pelaku dan juga fokus dari tujuan-tujuan pembangunan, sehingga kualitas hidup dari mayarakat Indonesia bisa di tingkatkan.

Pada tahun 2011, pemerintah mengeluarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).dengan tema "Percepataan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan, Didukung oleh pemantapan tata kelola dan Sinergi Pusat Daerah". Sesuai dengan prioritas RKP 2011 tersebut, anggaran pembelanja pemerintahan pusat untuk tahun itu diarahkan untuk mencapai tujuh sasaran utama, yaitu: (1) menunjang pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang didukung oleh pembangunan infrastruktur,

termasuk transportasi dan energi; (2) perlindungan social melalui BOS dan Jamkesmas; (3) pemberdayaan masyarakat antara lain melalui PNPM mandiri; (4) pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi; (5) perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan; (6) penyediaan anggaran subsidi yang lebih tepat sasaran; dan (7) pemenuhan kewajiban pembayaran utang tepat waktu.

C. Indeks Pembangunan Inklusif

1. Kerangka Kerja dari Indikator-Indikator Pembangunan Inklusif

Didalam sebuah publikasi dari Bank Pembangunan Asia (ADB,2011) dijabarkan sebuah set yang terdiri atas 35 indikator kunci yang dapat digunakan dalam menjelaskan pembangunan inklusif, yang didasarkan pada kerangka kerja dari indikator-indikator dari pembangunan inklusif yang mengidentifikasi unsur-unsur kebijakan kunci dari pembangunan inklusif. Indikator-indikator tersebut dan kerangka kerjanya diusulkan pertama kali oleh Zhuang 2010). Indikator-indikator tersebut memiliki delapan (8) dimensi: (1) kemiskinan dan ketimpangan (pendapatan dan non-pendapatan); (2) pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; (3) sokongan-sokongan infrastruktur kunci; (4) akses dan *input-input* bagi pendidikan dan kesehatan ; (5) akses dan *input-input* bagi keperluan-keperluan dan pelayanan-pelayanan infrastruktur dasar; (6) kesetaraan dan kesempatan *gender;* (7) jaringan pengaman social; dan (8) tata kelola dan lembaga-lembaga.

Tabel 15 kerangka kerja dari indikator-indikator dari pembangunan inklusif

Dimensi	Pilar kebijakan (PK)	Indikator
(1)	PK 1	Pendapatan : • persentase dari populasi hidup dibawah garis kemiskinan. • persentase dari populasi hidup dengan krang dari 2 dolar Amerika Serikat (AS) per hari berdasarkan paritas daya beli (PPP) (dalam dolar AS) dari tahun tertentu. • rasio dari pendapatan/konsumsi dari paling atas (terkaya) 20 persen terhadap [aling bawah (termiskin) 20 persen. • Non-pendapatan : • Rata-rata lamanya mengikuti pendidikan (muda dan dewasa). • Anak-anak berumur lima tahun dengan berat badan kurang dari normal. • tingkat mortalitas 5 tahun.
(2)		• laju pertumbuhan PDB riil per kapita pada PPP dolar dari tahun tertentu. • laju pertumbuhan dari pendapatan/konsumsi rata-rata per kapita pda PPP dolar dari tahun tertentu (kuntil terendah dank until tertinggi dan total). • tingkat kesempatan kerja. • elastisitas pendapatan (PDB) dari kesempatan kerja. • rasio berusaha sendiri dan pekerja-pekerja keluarga terhadap pekerja-pekerja yang digaji/upah
(3)		• konsumsi listrik per kapita • persentase dari jalan-jalan beraspal • jumlah dari pendaftaran telepon seluler per 100 orang • jumlah deposan per 100 anak muda (yang terdiri atas deposan-deposan dengan bank-bank dan lembaga-lembaga deposito atau tabungan lainnya kecuali bank sentral)
(4)	PK 2	• harapan mencapaian tingkat pendidikan untuk semua tingkatan • rasio anak-guru dipendidikan primaer (sekolah dasar) • cakupan imunisasi diantara bayi berumur 1 tahun • jumlah dokter, perawat, dan bidan per 10.000 penduduk • pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan, masing-masing sebagai persentase dari

		jumlah pengeluaran pemerintah
(5)		• persentase dari populasi dengan akses ke elektristis • persentase dari populasi yang memekai bahan-bahan bakar padat untuk memasak • persentase dari populasi yang memakai sumber-sumber air minum yang baik • persentase dari populasi yang memakai fasilitas-fasilitas sanitasi yang baik
(6)		• rasio jumlah wanita terhadap jumlah pria dalam pendidikan untuk semua tingkatan • rasio jumlah wanita terhadap jumlah pria dalam partisipasi tenaga kerja • cakupan pemeriksaan kandungan (paling tidak dalam satu kali kunjungan) • persentase kuri yang ditempati wanita di partemen nasional (DPRI/DPRD)
(7)	PK 3	• perlindungan sosial dan penilaian tenaga kerja • pangsa pengeluaran jaminan sosial untuk kesehatan didalam jumlah pengeluaran pemerintah untuk kesehatan • pangsa pengeluaran jaminan sosial dan kesejahteraan didalam jumlah pengeluaran pemerintah
(8)		• suara dan akuntabilitas • efektivitas pemerintah • indeks persepsi korupsi

Menurut Zhuang (2010), pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif memiliki tiga (3) pilar, seperti yang diilustrasikan.

Pilar kebijakan 1 adalah untuk menciptakan kesempatan kerja dan peluang ekonomi yang produktif (jadi tidak semata-semata laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun tidak efisien, atau hanya kesempatan kerja penuh namun produktivitasnya rendah).

Pilar kebijakan 2 adalah untuk menjamin akses yang sama pada peluang-peluang ekonomi.

Pilar kebijakan 3 adalah untuk mencegah orang-orang miskin jatuh ke kemiskinan kronis dan memitigrasi efek-efek dari ketidakstabilan atau goncangan-goncangan pencaharian (yang bersifat sementara) akibat krisis-krisis ekonomi (seperti krisis keuangan Asia 1997-1998, krisis ekonomi global 2008-2009, dan krisis zona Euro 2010-2011), bencana-bencana

alam (seperti Tsunami 2004 dan meletusnya gunung api Sinabung Sumatera utara 2013-2014), atau kerusuhan-kerusuhan sosial, seperti yang pernah terjadi pada tahun 1998 sebagai salah satu akibat dari krisis keuangan Asia 1997-1998. Pada gilirannya, pilar-pilar kebijakan tersebut harus didasarkan pada tata kelola dan kelembagaan yang baik.

Gambar 11 Tiga Pilar Pembangunan Ekonomi Inklusif

2. Membuat Sebuah Indeks Pembangunan Insklusif (IPI)

Seperti yang dibahas sebelumnya, konsep dari pembangunan ekonomi yang inklusif didasarkan pada dua (2) konsep lainnya, yakni: inklusif dan pembangunan ekonomi, dan inklusif artinya pembangunan tanpa rintangan-rintangan yang mendiskriminasiindivdu-individu atau kelompok-kelompok sosial tertentu. Dengan perkataan lain, pembangunan ekonomi dengan 'kualitas tinggi', yaitu pertumbuahan ekonomi dengan peluang-peluang ekonomi yang sama bagi semua anggota masyarakat. Peluang-peluang itu bisa dalam arti kesempatan kerja atau kesempatan melakukan usaha atau membuka usah sendiri.

Dari 34 indikator tersebut, dapat direduksi ke hanya 7 indikator kunci yang mewakili semua pilar kebijakan tersebut. Dari sini, sebuah indeks pembangunan insklusif (IPI) dapat dikalkulasi,yang secara sederhana adalah jumlah dari tujuh indictor kunci tersebut.

X1: pertumbuhan ekonomi,diukur dengan laju pertumbuhan, (dalam persentase) dari PDB riil (setelah dikoreksi dari pengaruh inflasi) per kapita (tanda :positif).

X2: kesempatan kerja, diukur dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja sebagai persentase daru jumlah penduduk atau jumlah angkatan kerja (tanda : positif).

X3: pembangunan manusia, diukur dengan IPM yang dikembangkan oleh UNDP (tanda : positif).

X4: kemiskinan, diukur dengan persentase dari jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional yang berlaku atau yang di terapkan secara internasional (misalnya 1,25% dolar AS per orang per hari) (tanda: negatif).

X5: pendapatan yang mereta, yang diukur dengan koefisien Gini yang terkenal itu (tanda: negatif).

X6: kesetaraan gender, yang diukur dengan, misalnya *Global Gender Index* (GGI) dari sebuah lembaga peringkat dunia, *The World Economic Forum* (WEF). Indek ini (tanda: positif).

X7: tata kelola/pemerintahan dan kelembagaan, yang diukur Corruption Perception Index (CPI), yang memperingatkan Negara-negara/ wilayah-wilayah berdasarkan pada persepsi masyarakat mangenai korupsi disektor publik/pemerintah dinegara-negara/wilayah-wilayah tersebut (tanda: positif).

Nilai-nilai dari indikator-indikator tersebut yang dikalkulasi berdasarkan pada data paling akhir yang tersedia (tahunan) dan bisa dengan mudah diakses di Negara-negara tertentu diasia dipresentasikan.

Tabel 16 Tujuh Indikator Utama untuk IPI di Sejumlah Negara Asoa Tertentu (berdasarkan pada data paling akhir yang tersedia)

Negara	Indikator						
	X_1 (2010;%)	X_2 (%)	X_3 (2011)	X_4 (1,25 dolar AS/ (orang/hari) (%)	X_5	X_6 (2011)	X_7 (2011)
Kamboja	5,9	-3,5 (2007)	0,52	-28,3 (2007)	-0,44 (2007)	0,500	2,1
Indonesia	6,1	-7,1 (2010)	0,62	-18,7 (2009)	-0,37 (2009)	0,505	3,0
Laos	7,9	-2,5 (2009)	0,52	-33,9 (2008)	-0,37 (2008)	0,513	2,2
Malaysia	7,2	-3,0 (2012)*	0,76	0,0 (2009)	-0,46 (2009)	0,286	4,3
Filipina	7,6	-7,3 (2010)	0,64	-22,6 (2006)	-0,44 (2006)	0,427	2,6
Singapura	14,5	-2,1 (2012)*	0,87	0,0***	-0,43 (1998)	0,086	9,2
Thailand	7,8	-1,0 (2012)*	0,68	-10,8 (2004)	-0,43 (2004)	0,382	3,4
Vietnam	6,8	-2,3 (2011)*	0,59	-13,1 (2008)	-0,38 (2008)	0,305	2,9
PRC	10,3	-4,1 (2012)*	0,69	-15,9 (2005)	-0,42 (2005)	0,209	3,6
Rep. korea	6,2	-3,2 (2012)*	0,897	-15,0 (2006)	-0,32 (1998)	0,111	5,4
India	8,5	-3,8 (2011/12)**	0,55	-41,6 (2005)	-0,37 (2005)	0,617	3,1
Jepang	4,0	-4,4 (2012)*	0,90	-16,0 (2007)	-0,25 (1993)	0,123	8,0

Catatan: * kuartal satu/Maret/April/Juni; ** tahun fiskal; *** mendekati nol.

D. Agenda ke Depan untuk Indonesia

Pencapaian-pencapaian antara lain laju pertumbuhan ekonomi yang rata-rata mencapai 8 persen terutama pada dekade 80-an hingga berakhirnya ere reformasi (1998) hingga sekarang ini, pemerintah Indonesia belum berhasil menggenjot laju pertumbuhan PDB ke 8 persen, seperti yang pernah dicapai oleh pemerintahan Soeharto waktu itu, namun Indonesia cukup berhasil dalam menghadapi dua krisis ekonomi yang berasal dari luar yang berturut-turut, yakni krisis ekonomi global 2008-2009 dan kresis

Euro 2010-2011 dengan mempertahankan laju pertumbuhan PDB tetap positif sekitar 5 hingga 6 persen rata-rata pertahun. Sekarang ada dua hal utama yang harus dilakukan Indonesia, yakni terus berusaha meningkatakan laju pertumbuhan ekonomi diatas 6 persen hingga mencapai 8 persen atau bahkan melebihi angka tersebut, dan meningkatkan kualitas dari pembangunana/pertumbuhan ekonomi.

Seperti yang pernah ditegaskan oleh presiden SBY sendiri beberpa tahun lalu bahwa untuk tahun-tahun ke depan, Indonesia harus tetap berusaha melakukan perbaikan-perbaikan dibanyak bidang, termasuk kesejahteraan rakyat, keadilan, penerapan tata kelola yang baik, kualitas dari demokrasi, dan pemeliharaan kesatuan dan keamanan nasional. MPN adalah sebuah formulasi dari upaya-upaya keras yang harus dilakukan sesuai visi Indonesia 2014, yakni sebuah Indonesia yang makmur, demokrasi, aman,dan adil.

Upaya-upaya untuk merealisasikan visi 2014 tersebut dielaborasikan kedalam misi-misi pemerintah berikut ini, yang tercantum didalam MPN (MNDP,2010, halaman I-31).

Misi 1: meneruskan pembangunan menuju sebuah Indonesia yang makmur. Kemakmuran diukur tidak hanya dalam bentuk material , tetapi juga dalam bentuk spiritual, yang akan memungkinkan bagi masyarakat Indonesia menjadi satu dalam nengejar cita-cita tersebut, dan partisipasinya secara penuh dan aktif didalam pembangunan dalam sebuah cara yang kreatif, inovatif, dan kontruktif.

Misi 2 : memperkuat pilar-pilar dari demokrasi. sejak dimulainya reformasi politik pada tahun 1998 lalu, Indonesia telah tumbuh menjadi satu dari tiga ekonomi demokrasi terbesar didunia bersama dengan AS dan India. Kebijakan-kebijakan kunci dalam misi 2 ini terkait dengan mereformasikan hubungan antara lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga keamanan dan pertahanan di Indonesia : reformasi dari struktur politik yang menekankan pada memperkuat kinerja dari lembaga-lembaga pemerintah dengan mengimplementasikan tugas-tugas dan fungsi-fungsi mereka yang di atur atau di tetapkan oleh UUD 1945 dan undang-undang lainnya dan peraturan-peraturan pemerintah : dan implementasi dari desentralisasi , otonomi daerah dan proses demokrasi di daerah-daerah.

Untuk mereaisasikan misi-misi tersebut, lima(5) agenda pembangunan nasional telah di tentukan yakni pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Agenda 1), meningkatkan tata kelola yang baik (Agenda II), memperkuat pilar-pilar demokrasi (Agenda III), Penegakan hukum dan pembasmian korupsi (Agenda IV), dan pembangunan yang inklusi dan adil (Agenda V).Agenda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Agenda I) tetap menjadi prioritas pemerintah. Bentuk final dari peningkatan kesejahteraan akan terefleksikan oleh peningkatan pendapata riil, penurunan tingkat pengangguran, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam hal agenda II, reformasi birokrasi akan dilakuakan di semua kementrian dan badan-badan pemerintah-pemerintah daerah. Sebagai usaha-usah keras untuk mempraktikan tata kelola yang baik yang tidak hanya terbatas pada sektor public, tetapi juga pada sektor swasta,termasuk manajemen dari BUMN, pemerintah menganjurkan lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan swasta untuk mengubah status mereka menjadi perusahaan-perusahaan public agar korporas-korporsi di Indonesia lebih terbuka lagi dan lebih bertanggung jawab.

Untuk menegakan pilar-pilar demokrasi (Agenda III), penekanan-penekanana yang kuat akan diberikan hak-hak dasar manusia, kebebesan berekspresi (termasuk kebebasan pers); pengawasan dan pengaturan yang adil: menghargai perbedaan; peraturan penegakan hukum; pemberlakuan yang sama dan adil; pemilihan umum ditingkat nasional maupun ditingkat daerah yang adil; dan perlindungan semua warga negara Indonesia tanpa melihat perbedaan mereka dalam kepercayaan,asal,atau jenis kelamin.

Untuk penegakan hukum (Agenda IV), yang adalah sebuah elemen pokok didalam proses pembasmian korupsi, agenda tersebut meliputi proses-proses pembuatan undang-undang, elaborasi,pengamatan, dan penegakan hukum dari undang-undang yang berlaku, termasuk didalam kasus-kasus korupsi. Masalah yang terkait dengan struktur hukum dengan meningkatkan kemandirian dan akuntabilitas dari lembaga-lembaga hukum, dengan meningkatkan SDM dalam bidang hukum, dan dengan menciptakan transparasi dan praktik terbuka dari sistem pengadilan.

Terkait Agenda V, di bidang ekonomi, keadilan dimanifestasi dalam reformasi-reformasi, atau proses-proses penegasan bagi kelompok-kelompok

tertinggal, tidak mampu, dan termarjinalkan. Di bidang sosial dan politik, keadilan dalam partisipasi (inklusif) dimansifestasi dengan akses yang meningkat pada kegiatan-kegiatan politik, pada kesetaraan *gender* dalam kegiatan-kegiatan politik dan dalam penghilangan semua bentuk deskriminasi. Di bidang ekonomi, khususnya dalam hal upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan pendapatan , satu kebijakan kunci adalah realokasi subsidi-subsidi yang diterima oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi ke masyarakat miskin melalui program-program yang langsung ditargetkan pada mereka.

Menyangkut upaya-upaya mengurangi kemiskinan, berbagai pendekatan telah di adopsi, termasuk pendekatan pembangunan dari bawah ke atas, yang telah dipraktikan didalam berbagai program, termasuk PNPM (Program Pemberdayaan Masyarakat Nasional). Di dalam program ini, masyarakat terlibat langsung dalam fase perencanaan , seleksi proyek, dan fase evaluasi. Keterlibatan langsung masyarakat didalam proses pembangunan menjadi sebuah komponen pokok. Melalui pendekatan ini, masyarakat akan punya sebuah perasaan ikut memiliki dan akan bekerja sama secara sukarela didalam program tersebut, sementara pada waktu bersamaan akan mendapatkan keuntungan dari program itu.

Untuk tahun-tahun kedepan, penguatan keadilan dan inklusif akan dilakukan untuk setiap strategi pembangunan disetiap program. Kebijakan ini diharapkan bisa memberikan pendapatan ekstra bagi keluarga-keluarga miskin (yang berarti memperbaiki atau mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan) pada jangka pendek, dan akan menciptakan sebuah generasi dengan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik pada jangka panjang.

BAB XI
PEMBANGUNAN KERAKYATAN DAN USAHA MENENGAH KECIL & MIKRO

A. Ekonomi Rakyat

Dalam wacana teori ekonomi, istilah ekonomi rakyat memang tidak dapat ditemui. Hal ini memang karena ekonomi rakyat sebagai sebuah pengertian bukan merupakan turunan dari mazhab atau *school of thought* tertentu melainkan suatu konstruksi pemahaman dari realita ekonomi yang umum terdapat di negara berkembang. Jika kita membicarakan ekonomi rakyat, perlu dijadikan catatan bahwa sebagian terbesar dari pelaku ekonomi di dalamnya adalah usaha mikro yang menyerap tenaga kerja secara besar dan secara hipotesis menjangkau lebih dari 300 juta jiwa. Kegiatan-kegiatan yang digeluti pelaku ekonomi rakyat secara kasar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kegiatan-kegiatan primer dan sekunder pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan (semua dilaksanakan dalam skala terbatas), pengrajin kecil, penjahit, produsen makanan kecil, dansemacamnya.

2. Kegiatan-kegiatan tersier seperti transportasi (dalam berbagai bentuk), kegiatan sewa-menyewa baik perumahan, tanah, maupun alat produksi.

3. Kegiatan-kegiatan distribusi seperti pedagang pasar, pedagang kelontong, pedagang kaki lima, penyalur dan agen, serta usaha sejenisnya.

4. Kegiatan-kegiatan jasa lain seperti pengamen, penyemir sepatu, tukang cukur, montir, tukang sampah, juru potret jalanan, dan sebagainya.

Kegiatan primer seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan selama beberapa dasawarsa terakhir mendapatkan tekanan

struktural dari pemerintah sebagai akibat kebijakan yang menekankan pada pertumbuhan industri dan menuntut upah buruh yang rendah/Upah buruh rendah hanya dapat tercapai apabila salah satu komponen utamanya yaitu makan juga rendah. Sebagai akibatnya kegiatan primer ditekan untuk menyediakan pangan murah yang diperlukan bagi pertumbuhan industri. Orientasi pada industri juga menyebabkan berbagai kegiatan di masyarakat seperti pengrajin, penjahit, produsen makanan dan semacamnya karena skalanya yang terbatas tidak mendapatkan perhatian bahkan tidak dilihat sebagai aktivitas ekonomi yang perlu dipertimbangkan. Dalam kegiatan yang dikelompokkan sebagai tersier, transportasi baik orang maupun barang banyak diusahakan sendiri oleh rakyat. Hal ini merupakan gejala umum pada negara berkembang.

Negara memang telah mengusahakan berbagai sarana transportasi namun dalam kenyataannya transportasi yang diusahakan sendiri oleh rakyat tetap lebih dominan. Kegiatan sewa-menyewa seperti misalnya tempat tinggal baik kamar maupun rumah di kota dan tanah atau pekarangan di desa adalah kegiatan yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi dan tidak banyak tercatat. Di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Jogjakarta dan Malang, kegiatan ini telah secara efektif mendorong datang dan berkembangnya banyak wirausaha mikro seperti penjual bakso dan pedagang keliling lainnya dari berbagai daerah.

Kegiatan-kegiatan distribusi merupakan salah satu kegiatan yang paling populer bagi ekonomi rakyat karena relatif mudah dikerjakan, tidak menuntut keterampilan khusus, dan memiliki margin keuntungan yang relatif besar. Kegiatan distribusi juga merupakan tempat perputaran uang yang besar dancepat. Melalui kegiatan distribusi yang sebagian besar dilaksanakan secara informal (tanpa izin) berbagai produk baik yang dihasilkan oleh perusahaan besar maupun usaha rumah tangga mampu menjangkau masyarakat secara efektif. Berbagai kegiatan jasa lain yang diungkap di atas, dalam kenyataannya merupakan suatu "jaring pengaman sosial bagi kelompok masyarakat bawah yang menggantikan ketiadaan pelayanan dasar yang semestinya disediakan oleh pemerintah. Sebagian besar masyarakat pada kegiatan ini berada dalam tahapan bertahan hidup (*survival*) dan menjadikan aktivitas yang dijalaninya sebagai persiapan untuk masuk kedalam kegiatan ekonomi lain yang lebih mapan meskipun beberapa yang lain menjadikan kegiatan mereka sebagai profesi dan mereka

mampu menghtdupi keluarganya secara relatif memadai. Memperhatikan keunikan kegiatan jasa ini, tindakan pemerintah terutama pemerintah daerah untuk menertibkan atau mengatur kegiatan-kegiatan ini pada kenyataannya sering kali merusak jaring pengaman sosial yang secara riil telah mampu menyediakan pekerjaan pada masyarakat bawah.

B. Karakteristik Ekonomi Rakyat

Berbagai kebijakan pemerintah dapat secara dramatis mempengaruhi keberlangsungan suatu aktivitas ekonomi rakyat. Dalam merespon kondisi yang demikian, sektor ekonomi rakyat merupakan sektor yang relatif mudah dimasuki dan ditinggalkan. Apabila pada aktivitas ekonomi tertentu terdapat banyak peluang maka dengan segera akan banyak pelaku yang menerjuninya. Sebaliknya apabila terjadi perubahan yang mengancam keberlangsungan jenis usaha tertentu maka dengan segera para pelakunya akan berpindah ke jenis usaha lain.

Karakteristik lainnya adalah bahwa dalam suatu keluarga terutama yang berada pada strata bawah umumnya keluarga tersebut melalui anggotanya terlibat pada lebih dari satu aktivitas ekonomi yang dapat digolongkan sebagai ekonomi rakyat. Ketidakamanan dan keberlanjutan yang sulit diramalkan dalam ekonomi rakyat membuat pelakunya harus membuat beberapa alternatif yang dapat menggantikan apabila satu aktivitas ekonomi tidak terpaksa berhenti. Apabila tidak terjadi sesuatu maka akumulasi keuntungan pendapatan dari beberapa aktivitas ekonomi sangat mereka butuh kan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar.

C. Ekonomi Kerakyatan dan Sistem Ekonomi Pasar

Ekonomi rakyat tumbuh secara natural karena adanya sejumlah potensi ekonomi di sekelilingnya. Mulanya mereka tumbuh tanpa adanya intensif apa pun, atau dengan kata lain hanya mengandalkan naluri usaha dan kelimpahan sumber daya alam, sumber daya manusia, serta peluang pasar. Perlu dipahami bahwa dalam ruang ekonomi nasional pun terdapat sejumlah aktor ekonomi (konglomerat) dengan bentuk usaha yang kontras dengan apa yang diragakan oleh sebagian besar pelaku ekonomi rakyat. Namun mereka tidak digolongkan dalam ekonomi kerakyatan karena jumlahnya hanya sedikit sehingga tidak merupakan representasi dari kondisi

ekonomi rakyat yang sebenarnya, meskipun golongan yang kedua ini biasanya lebih banyak tumbuh karena mampu membangun partner usaha yang baik dengan penguasa sehingga memperoleh berbagai bentuk kemudahan usaha dan insentif serta proteksi bisnis.

Pengalaman pembangunan perekonomian Indonesia yang dijalankan berdasarkan mekanisme pasar sering tidak berjalan dengan baik, khususnya sejak masa orde baru. Kegagalan pembangunan ekonomi yang diragakan berdasarkan mekanisme pasar ini antara lain karena kegagalan pasar itu sendiri, intervensi pemerintah yang tidak benar, tidak efektifnya pasar itu berjalan, dan adanya pengaruh eksternal. Namun jika kita semua jernih melihat dan jujur untuk mengakui bahwa kegagalan-kegagalan pembangunan ekonomi nasional selama ini terjadi bukan disebabkan oleh karena ketidakmampuan mekanisme pasar mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi nasional, tetapi lebih disebabkan karena pasar sendiri tidak diberikan kesempatan untuk bekerja secara baik. Bentuk campur tangan pemerintah yang seharusnya diarahkan untuk menjamin bekerjanya mekanisme pasar guna mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi nasional, ternyata dalam praktiknya lebih diarahkan pada keberpihakan yang berlebihan pada pengusaha besar (konglomerat).

D. Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Ekonomi kerakyatan tidak bisa hanya sekadar komitmen politik untuk mengubah kecenderungan dalam sistem ekonomi yang amat membela kaum pengusaha besar. Perubahan itu hendaknya dilaksanakan dengan benar-benar memberi perhatian utama kepada rakyat kecil lewat program-program operasional yang nyata dan mampu merangsang kegiatan ekonomi produktif di tingkat rakyat sekaligus memupuk jiwa kewirausahaan. Pemerintah harus mempunyai ancangan yang pasti tentang kapan seharusnya pemerintah mengurangi bentuk campur tangan untuk mendorong ekonomi kerakyatan berkembang secara sehat. Oleh karena itu, diperlukan adanya kajian ekonomi yang akurat tentang *timing* dan *process* di mana pemerintah harus mengurangi bentuk keberpihakannya untuk pembangunan ekonomi rakyat. Hal ini perlu mendapat perhatian tersendiri, karena sampai saat ini masih banyak pihak (di luar UMKM dan Koperasi) yang memanfaatkan momen keberpihakan pemerintah ini sebagai *free-rider*. Justru kelompok ini yang mendorong adanya proses

phasing-out untuk mengkreasi mekanisme pasar yang sehat dalam rangka mendorong keberhasilan program ekonomi kerakyatan. Usaha pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian kuat dari ekonomi kerakyatan agar keluar dari permasalahan yang dihadapinya antara lain:

1. Aspek Manajerial, upaya yang dilakukan terkait aspek manajerial meliputi peningkatan produktivitas, kemampuan pemasaran, dan pengembangan sumber daya manusia.

2. Aspek Permodalan, upaya yang dilakukan meliputi pemberian bantuan modal, dalam bentuk penyisihan keuntungan BUMN sebesar 1-5 persen dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha mikro dan kecil minimum 20 persen dari portofolio kredit bank, serta kemudahan kredit.

3. Program Kemitraan, upaya yang dilakukan melalui program kemitraan adalah mengembangkan program kemitraan dengan usaha besar.

4. Pengembangan Sentra Industri, upaya yang dilakukan melalui pengembangan sentra industri adalah mengembangkan sentra industri kecil dalam suatu kawasan.

5. Program Pembinaan, upaya pemberdayaan yang dilakukan dalam bentuk pembinaan adalah pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat kelompok usaha bersama (KUB) maupun koperasi industri kecil dan kerajinan (KOPINKRA).

E. Lembaga Keuangan Mikro dan Program Pengentasan Kemiskinan

Banyaknya jenis lembaga keuangan mikro yang tubuh dan berkembang di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pengusaha kecil dan mikro yang selama ini belum terjangkau oleh jasa pelayanan keuangan perbankan khususnya bank umum. Pada lembaga keuangan mikro ini dapat menumbuhkan minat masyarakat di pedesaan untuk berusaha atau menumbuhkan pengusaha-pengusaha kecil di pedesaan, yang pada akhirnya dapat membantu program pemerintah untuk:

1. Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat kecil di pedesaan.
2. Meningkatkan pendapatan penduduk desa.

3. Menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan, sehingga dapat memperkecil keinginan masyarakat pedesaan melakukan urbanisasi.

4. Menunjang program pemerintah dalam mengupayakan pemerataan pendapatan penduduk desa dan upaya pengentasan kemiskinan.

F. Keuangan Mikro, Untuk Menggerakkan Ekonomi Rakyat

Dari jutaan unit usaha yang ada, sebagian besar merupakan usaha ekonomi rakyat atau sering disebut usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keberadaan usaha mikro, merupakan fakta semangat jiwa kewira-usahaan sejati di kalangan rakyat yang bisa menjadi perintis pembaharuan. Menyadari realitas ini, memfokuskan pengembangan ekonomi rakyat terutama pada usaha mikro merupakan hal yang sangat strategis. Di samping mengakomodasi pemerataan seperti disebut di atas, mengembangkan kelompok usaha ini secara riil strategis, setidaknya dilihat beberapa alasan yaitu:

1. Mereka telah mempunyai kegiatan ekonomi produktif sehingga kebutuhannya adalah pengembangan dan peningkatan kapasitas bukan penumbuhan sehingga lebih mudah dan pasti.

2. Apabila kelompok ini diberdayakan secara tepat, mereka akan secara mudah berpindah menjadi sektor usaha kecil.

3. Secara efektif, mengurangi kemiskinan yang diderita oleh mereka sendiri, maupun membantu penanganan rakyat miskin kategori fakir miskin, serta usia lanjut dan muda.

Pengembangan UMKM merupakan suatu keharusan karena UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia saat ini dan akan datang karena kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor ekonomi. Karena keunikannya, maka pembangunan UMKM diyakini akan memperkuat fondasi perekonomian nasional karena berbasis pada sumber daya ekonomi lokal sehingga mampu mengembangkan kegiatan ekonomi lokal dan perbedaan masyarakat serta tidak mudah bergantung pada impor melainkan menghasilkan sesuatu yang bisa diekspor.Untuk itu, pembangunan koperasi dan UMKM perlu menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional jangka panjang.Jika dikaji lebih jauh, maka masyarakat yang melakukan aktivitas usaha di bidang UMKM menghadapi dua permasalahan utama yaitu:

1. Masalah Finansial

a. Kurangnya kesesuaian antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UMKM.

b. Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKM.

c. Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang diluncurkan kecil.

d. Kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai.

e. Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi.

f. Banyak UMKM yang belum *bankable*, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial.

2. Masalah Non Finansial

a. Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan *quality control* yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan.

b. Kurangnya pengetahuan pemasaran yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMKM mengenai pasar.

c. Keterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya sumber daya untuk mengembangkan sumber daya manusia.

d. Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan finansial.

Sementara pada sisi yang lain ada keuntungan lain yang diterima bank sebagai kreditur bagi UMKM yaitu dari sisi risiko kemacetan pinjaman, meminjamkan kredit kepada pelaku UMKM tingkat kemacetannya relatif kecil. Hal ini dikarenakan pelaku UMK memiliki tingkat kepatuhan yang relatif tinggi dibandingkan dengan usaha besar. Selanjutnya pemberian kredit kepada nasabah UMK merupakan strategi penyebaran risiko, karena biasanya nominal kredit yang diberikan relatif lebih kecil dengan jumlah nasabah yang banyak sehingga pemberian kredit tidak terkonsentrasi pada satu kelompok atau sektor usaha saja, di samping

suku bunga kredit yang cenderung lebih tinggi dari tingkat bunga pasar memungkinkan bank-bank memperoleh pendapatan bunga yang memadai.

Upaya mendorong peningkatan akses pembiayaan untuk UMKM diperlukan ketersediaan pendanaan dan kemampuan perbankan dalam membiayai UMKM. Peningkatan kontribusi pembiayaan perbankan kepada UMKM memerlukan sinergi yang terarah antara bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR) dengan mengoptimalkan sumber daya masing-masing pihak. Sejak awal, keberadaan BPR di tengah masyarakat adalah mengemban amanat untuk mengutamakan pembiayaan UMKM. Dalam perkembangannya UMKM, memberikan daya tarik bagi bank umum, sehingga mulai mengarahkan strategi bisnisnya pada pembiayaan retail khususnya UMKM. Kondisi ini menimbulkan persaingan yang ketat antara BPR dan bank umum. Untuk itu, diperlukan pola kerja sama antara bank umum dan BPR dalam mengoptimalkan layanan pembiayaan kepada UMKM.

Melalui wadah APEX diharapkan bank umum dan BPR dapat bekerja sama dalam mengoptimalkan penyaluran kredit kepada UMKM. Bank umum dengan dukungan sumber dana yang relatif besar dan teknologi yang lebih maju diharapkan dapat bekerja sama dengan BPR yang memiliki keunggulan pengalaman dan sebaran jaringan kantor untuk melayani UMKM. Menurut praktik umum di negara-negara lain bahwa fungsi lembaga APEX dititik-beratkan pada peran dalam penyatuan/pengumpulan dana (*pooling funds*), pemberian bantuan keuangan (*financial assistance*) dan dukungan teknis (*technical support*). Bentuk paling ideal lembaga APEX adalah bank umum atau unit bank umum karena:

a. Mampu menjalani fungsi APEX terutama dalam penyediaan fasilitas/akses kepada sistem pembayaran,

b. Kemampuan manajerial dalam pengelolaan dana,

c. Permodalan yang relatif kuat, dan

d. Instrumen yang lengkap dalam rangka pengelolaan dana yang terkumpul Hal yang mendasari dalam kerja sama APEX adalah komitmen bank umum untuk mengayomi BPR dan kemudian secara bersama-sama melakukan peningkatan jumlah UMKM yang terlayani dengan suku bunga yang relatif rendah.

Di Indonesia, fokus utama pembentukan APEX adalah membangun sinergi antara bank umum di daerah dengan BPR, sehingga dikenal dengan APEX BPR. Upaya tersebut dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu top *down approach* yang melibatkan Bank Indonesia dan pemerintah daerah setempat dan asosiasi, serta *bussines approach*, yang mengedepankan aspek bisnis dan melibatkan peran bank umum dan BPR. Dalam praktiknya, keberadaan APEX BPR diharapkan dapat memperluas jaringan layanan UMKM dan nasabah lainnya melalui BPR sebagai kepanjangan tangan dari bank umum. menciptakan produk bersama, memanfaatkan *pooling funds* sebagai dana kelolaan serta *fee based income* dari pemanfaatan transaksi. Di sisi BPR, adanya APEX BPR dapat berfungsi sebagai pelindung yang dapat memberikan dukungan keuangan, penyedia jasa pembayaran serta kerja sama dalam pengembangan produk dan sumber daya.

Sinergi antara BPD dan BPR dalam kerja sama APEX sangat mendukung peningkatan pembiayaan UMKM dan pengembangan ekonomi regional serta sejalan dengan penguatan kelembagaan BPD atau dikenal dengan BPD Regional Champion bahwa BPD berperan sebagai agent of regional development. BPD antara lain diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan penyaluran kredit dan berperan sebagai APEX BPR untuk mengayomi BPR dan meningkatkan penyaluran kredit kepada BPR dan UMKM melalui linkage program, serta meningkatkan dana masyarakat di luar dana Pemerintah Daerah melalui produk tabungan. Saat ini, BPR merupakan komponen kunci dalam memajukan UMKM. Birokrasi rumit yang biasanya menjadi hambatan utama memperoleh akses pendanaan, dan solusi didapatkan melalui proses layanan kredit usaha rakyat (KUR).

Keuangan mikro berfungsi memberikan dukungan modal bagi pengusaha mikro (*micro-enterprises*) untuk meningkatkan usahanya, setelah itu usaha mereka akan berjalan lebih lancar dan lebih besar. Kebutuhan dana bagi *micro-enterprises* setelah mendapat dukungan modal itu akan meningkat, sehingga dibutuhkan Lembaga Keuangan Masyarakat (Mikro) yang dapat secara terus-menerus melayani kebutuhan mereka.

G. Pengertian Usaha Menengah Kecil & Mikro (UMKM) di Indonesia

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, Usaha Kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih

paling banyak Rp 200.000. 000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

1. Pengertian Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00.

2. Pengertian Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Selain itu usaha menengah menurut Inpres No. 10 tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000,00 sampai dengan paling banyak sebesar Rp 10.000.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp 500.000.000,00 sampai dengan Rp 5.000.000.0000,00

3. Pengertian Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro adalah salah satu

pilar utama ekonomi nasional yang mendapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan serta pengembangan yang secara luas sebagai wujud pihak yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah, dengan kriteria.

Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang per orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usahakecil atau usaha besar dan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00.

Selain itu pengertian Usaha Mikro menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun dan usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp. 50.000.000,-.

H. Karakteristik Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM)

Secara umum, karakteristik usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) sebagai berikut:

1. Manajemen pengolahan masih sederhana;
2. Banyak yang belum memiliki status badan hukum;
3. Terkonsentrasi pada kelompok usaha tertentu;
4. Jenis barang usahanya tidak tetap, dapat berganti pada periode tertentu;
5. Tempat usahanya tidak selalu menetap, dapat berubah sewaktu-waktu;
6. Tidak memisahkan antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha dan sumber daya manusianya belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.

7. Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah

8. Pada umumnya belum akses ke perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank

9. Umumnya tidak mempunyai izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP

Berikut ini akan dijabarkan beberapa karakteristik Usaha Kecil, Menengah dan Mikro (UMKM) sebagai berikut:

1. Karakteristik Usaha Kecil

a. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;

b. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;

c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;

d. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;

e. Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha;

f. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal;

g. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.

Contoh Usaha Kecil adalah Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja; Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya; Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubel, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan; Peternakan ayam, itik dan perikanan; dan Koperasi berskala kecil.

2. Karakteristik Usaha Menengah

a. Umumnya memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;

b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk *auditing* dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;

c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dan lain-lain;

d. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dan lain-lain;

e. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;

f. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

Contoh Usaha Menengah adalah Usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah; Usaha perdagangan (grosir) termasuk ekspor dan impor; Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garmen dan jasa transportasi taxi dan bus antarprovinsi; Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam; dan Usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan.

3. Karakteristik Usaha Mikro

a. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;

b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;

c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;

d. Sumber daya manusianya belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;

e. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;

f. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan nonbank;

g. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Contoh Usaha Mikro adalah Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya; Industri makanan dan minuman. industri mebel pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat; Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar dan lain sebagainya; Peternakan ayam, itik dan perikanan; dan Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).

Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasinya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha nonmikro, antara lain perputaran usaha (*turn over*) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang; UMKM tidak sensitif terhadap suku bunga karena kelompok usaha ini tidak memiliki akses perbankan dan keuangan secara baik sehingga tetap berkembang walaupun dalam situasi krisis ekonomi dan moneter; dan pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.

Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima; kemudian *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan; *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor serta*Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

I. UMKM dan 4 Pilar Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

MEA diharapkan dapat mewujudkan tercapainya suatu kawasan yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang berkembang serta berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan sosial

ekonomi. Para pemimpin ASEAN telah sepakat untuk mewujudkan MEA pada tahun 2015 dengan 4 pilar yaitu:

1. Pasar tunggal dan berbasis produksi
2. Kawasan ekonomi berdaya saing tinggi
3. Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang setara, dan
4. Kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

Dalam rangka memperkuat UMKM menghadapi MEA, beberapa upaya yang perlu dilakukan di antaranya: meningkatkan kualitas dan standarisasi produk UMKM yang setara di kawasan ASEAN; memperluas dan meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, meningkatkan kualitas SDM dan jiwa kewirausahaan terhadap pelaku UMKM, dan sebagainya. Dengan demikian, UMKM merupakan ujung tombak pertumbuhan perekonomian nasional. Pada akhirnya diharapkan akan mampu berkompetisi pada era integrasi ekonomi ASEAN yang dimulai pada tahun 2015.

Dalam rangka menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN, terdapat peluang besar bagi UMKM untuk meraih potensi pasar dan peluang investasi harus dapat dimanfaatkan dengan baik. Guna memanfaatkan peluang tersebut, maka tantangan yang terbesar bagi UMKM menghadapi MEA adalah bagaimana mampu menentukan strategi yang jitu guna memenangkan persaingan. Oleh karena itu, UMKM harus berbenah guna menghadapi perilaku pasar yang semakin terbuka di masa mendatang. Kerja sama dan pembentukan jejaring bisnis, baik di dalam dan di luar negeri sesama UMKM maupun dengan pelaku usaha besar harus dikembangkan. Peranan pemerintah tentu menjadi penting terutama untuk mengantarkan mereka agar mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

Selama ini belum banyak UMKM yang bisa memanfaatkan skema pembiayaan yang diberikan oleh perbankan. Hasil survei *Regional Development Institute* (REDI, 2002) menyebutkan bahwa ada 3 gap yang dihadapi berkaitan dengan akses finansial bagi UMKM yaitu:

1. Aspek Formalitas, karena banyak UMKM yang tidak memiliki legal status

2. Aspek Skala Usaha, di mana sering sekali skema kredit yang disiapkan perbankan tidak sejalan dengan skala usaha UMKM

3. Aspek Informasi, di mana perbankan tidak tahu UMKM mana yang harus dibiayai, sementara itu UMKM juga tidak tahu skema pembiayaan apa yang tersedia di perbankan.

Oleh karena itu, maka ketiga gap ini harus diatasi, di antaranya dengan peningkatan kemampuan bagi SDM yang dimiliki UMKM, perbankan, serta pendamping UMKM. Pada sisi lain, harus juga diberikan informasi yang luas tentang skema-skema pembiayaan yang dimiliki perbankan.

J. UMKM Mampu Bertahan dalam Kondisi Krisis

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Sektor UMKM telah dipromosikan dan dijadikan sebagai agenda utama pembangunan ekonomi Indonesia. Sektor UMKM telah terbukti tangguh, ketika terjadi krisis ekonomi 1998, hanya sektor UMKM yang mampu bertahan dari krisis ekonomi.

Beberapa alasan faktual sudah menunjukkan bahwa kegiatan usaha pelaku UMKM dapat bertahan di tengah kondisi krisis ekonomi maupun krisis moneter seperti sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan masyarakat tidak banyak berpengaruh pada permintaan. Sektor UMKM tidak mendapat modal dari bank. Implikasinya, keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga tidakbanyak mempengaruhi sektor ini. Pada saat krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sektor formal banyak memberhentikan pekerja-pekerjanya. Para penganggur tersebut memasuki sektor informal, melakukan kegiatan usaha yang umumnya berskala kecil, akibatnya jumlah UMKM meningkat, karena UMKM merupakan salah satu sektor industri yang sedikit bahkan tidak sama sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia. Dengan bukti ini, jelas bahwa UMKM dapat diperhitungkan dalam meningkatkan daya saing pasar dan stabilisasi sistem ekonomi yang ada.

BAB XII
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPAT

A. Permasalahan Pokok

Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan (kesenjang ekonomi) dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Di Indonesia , pada awal pemerintahan orde baru, para pembuat kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan ekonomi di jakarta masih sangat percaya bahwa proses pembangunan ekonomi di jakarta masih sangat percaya bahwa proses pembangunan ekonomi yang pada awalnya terpusatkan hanya di jawa, khususnya jakarta dan sekitarnya, dan hanya di sektor-sektor tertentu saja, yang pada akhirnya akan menghasilkan apa yang dimaksud dengan efek-efek 'cucuran/ tetesan kebawah'. Didasarkan pada kerangka pemikiran tersebut, pada awal periode Orde Baru hingga akihir tahun 1970-an, strategi pembangunan ekonomi yang di anut oleh pemerintahan Soeharto lebih berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi.Untuk mencapai tujuan tersebut maka pusat pembangunan ekonomi nasional di mulai di pulau jawa dengan alas an bahwa semua fasilitas-fasilitas yang di butuhkan, seperti pelabuhan, jalan raya dan kereta api, telekomunikasi, komplek industri dan ifrastruktur pendukung lainnya lebih tersedia di jawa (khususnya jakarta dan sekitarnya) di banding dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Pembanguna saat itu juga hanya terpusat di sektor-sektor tertentu.

Sebenarnya, menjelang akhir tahun 1970-an, pemerintah sudah mulai menyadari buruknya kualitas pembangunan yang di hasilkan dengan

setrategi tersebut. Oleh karena itu pembangunan mulai di rubah : tidak lagi hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dari pada pembangunan. Sejak itu, perhatian mulai diberikan pada usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya lewat pengembangan industri-industri padat karya, pembangunan pedesaan, dan modernisasi sektor pertanian. Hingga terjadinya krisis ekonomi, sudah banyak di laksanakan program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi jumlah orang miskin dan kesenjangan pendapatan antara kelompok miskin dan kaya di tanah air.

Namun banyak persoalan yang menjangkit perdesaan dimana permasalahan itu saling berkaitan satu sama lain sehingga, ada kecenderungan masyarakat di perdesaan sulit keluar dari permasalahan kemiskinan. Kondisi ini diperparah kurang maksimalnya upaya, pemerintah pusat, daerah dan tentunya desa serta masyarakatnya untuk benar-benar berupaya mencari jalan keluar dari kemiskinan tersebut.Sehingga lama-kelamaan kemiskinan tersebut semakin parah dan bertambah, sebab akar permasalahan serta solusi yang dicanangkan belum sepenuhnya menyentuh kemiskinan itu sendiri.

Kemiskinan kini menjadi suatu identitas yang melekat dengan perdesaan seperti warisan yang diterima turun-temurun. Sehingga tidak heran, banyak penduduk desa yang mengadu nasib baik di kota atau menjadi tenaga kerja di luar negeri dalam upayanya untuk memperbaharui taraf hidup keluarganya. Selain kurangnya perhatian pemerintah, banyak persoalan lain yang berkontribusi terhadap merebaknya kemiskinan, diantaranya: (1) tingkat pendidikan serta kualitas pendidikan masyarakat yang masih rendah; (2) rendahnya asset yang dikuasai masyarakat perdesaan; (3) pelayanan sarana dan prasarana pedesaan kurang memadai; (4) terbatasnya kesempatan melakukan usaha di perdesaan; (5) lemahnya pembangunan berbasis masyarakat dan (6) lemahnya koordinasi dalam pembangunan perdesaan itu sendiri.

Implikasi logis keadaan tersebut akan bermuara pada kenyataan bahwa bukan perkara mudah bagi pemerintah dalam upayanya mengentaskan kemiskinan, jika masyarakat sendiri terkesan enggan merubah kehidupannya. Dalam beberapa kasus, ada kecendrungan masyarakat dalam kategori miskin semakin apatis menjalani hidup, karena berharap banyak

dari sumbangan langsung yang terus diberikan oleh pemerintah dan pihak lain. Menyadari hal tersebut pemerintah (daerah dan desa) seharusnya dapat membuat terobosan dalam penanggulangan kemiskinan sesuai dengan karakter dan potensi daerah/desa masing-masing dan tidak menunggu intervensi program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah semata.

Pengembangan ekonomi lokal yang dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi lokal merupakan hal urgen yang perlu dilakukan.Hal ini dapat diharap berdampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat lokal.Sehingga dengan sendirinya dapat menekan angka kemiskinan di daerah bersangkutan.Solusi ini memang bukanlah satu-satunya solusi tepat, mengingat setiap daerah memiliki masalah berbeda, sehingga penanggulangan kemiskinan memerlukan solusi yang juga berbeda. Solusi tersebut tidak akan berjalan baik dan menyentuh dasar kemiskinan, bila pemerintah tidak serius menanggulanginya dan masyarakat sendiri enggan merubah nasibnya menjadi lebih baik lagi.

B. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan

Data tahun 1970-an dan 1980-an mengenai pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan di banyak Negara berkembang, terutama Negara-negara yang proses pembangunan ekonominya sangat pesat dan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti Indonesia, menunjukan seakan-akan ada suatu korelasi positif antara laju pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan : semakin tinggi pertumbuhan PDB atau semakin besar pendapatan per kapita, semakin besar perbedaan antara kaum miskin dan kaum kaya. Bahkan studi dari Ahuja, dkk. (1997) di negara-negara di Asia Tenggara menunjukan bahwa setelah sempat turun dan stabil selama 1970-an dan 1980-an pada saat negara-negara itu mengalami mengalami laju pertumbuhan ekonomi rata-rata pertahun tinggi, pada awal 1990-an, ketimpang dalam distribusi negara-negara tersebut mulai membesar kembali. Hal ini tidak hanya terjadi di negara berkembangan tetapi juga di negara maju.Jantti (1997) di dalam studinya membuat suatu kesimpulan bahwa semakin besarnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan di negara-negara tersebut di sebabkan oleh

pergeseran-pergeseran demografi, perubahan pasar buruh dan perubahan kebijakan kebijakan public. Dalam hal perubahan pasar buruh, membesarnya kesenjangan pendapatan dari kepala keluarga dan semakin besarnya saham pendapatan dari istri di dalam total pendapatan keluarga merupakan dua faktor penyebab penting.

Dalam hipotesis Kuznets 'apakah memang terbukti ada suatu korelasi positif jangka panjang antara tingkat pendapatan perkapita dan tingkat pemerataan dalam distribusi pendapatan atau suatu korelasi negative antara tingkat pendapatan per kapita dan besarnya kesenjangan pendapatan?' Sebagian besar studi-studi tersebut mendukung hipotesis Kuznets sedangkan sebagian lainnya menolak atau tidak menemukan adanya korelasi yang kuat.Ada beberapa studi yang melihat seberapa besar efek-efek tingkat negara tersebut terhadap perubahan distribusi pendapatan.Hasil dari studi-studi tersebut tidak menunjukan adanya suatu relasi antara tingkat pendapatan dan kesenjangan.

C. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Dasar teori dari korelasi antara pertumbuhan perkapita dan tingkat kemiskinan tidak berbeda dengan kasus pertumbuhan ekonomi dalam ketimpangan dalam distribusi pendapatan seperti yang telah di bahas sebelumnya. Mengikuti hipotesis Kuznets, pada tahap awal dari proses pembangunan , tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan pada saat mendekati tahap akhir dari pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Tentu, seperti telah di katakana sebelumnya, banyak factor-faktor lain selain pertumbuhan pendapatan yang juga berpengaruh pada tingkat kemiskinan di suatu wilayah/negara seperti derajat pendidikan, tenaga kerja, dan struktur ekonomi.

Dasar pesamaan untuk menggambarkan relasin antara pertumbuhan *output* agregat dan kemiskinan dapat di ambil dari persamaan (C.1). dalam persamaan tersebut, elastisitas dari ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan pemerataan adalah suatu komponen kunci dari perbedaan antara efec bruto (ketimpangan konstan) dan efek neto (ada efek dari ketimpangan) dari pertumbuhan pendapatan terhadap kemiskinan. Apabila elastisitas neto dan bruto dari kemiskinan terhadap pertumbuhan pendapatan dinyatakan masing-masing dengan ã dan ë,

elastisitas dari ketimpangan terhadap pertumbuhan dengan â, dan elastisitas dari kemiskinan terhadap ketimpangan dengan ä, maka di dapat persamaan (C.2) (wodon, 1999):

$$\text{Log } G_{kt} = \alpha + \beta Log\, W_{kt} + \alpha_k + \sum_{kt} \qquad \text{(C.1)}$$

$$\lambda = \gamma + \beta\delta \qquad \text{(C.2)}$$

Untuk mendapatkan elastisitas bruto dari kemiskinan terhadap pertumbuhan dan elastisitas dari kemiskinan terhadap ketimpangan (pertumbuhan sebagai variabel yang dapat dikontrol), digunakan persamaan:

$$\text{Log } P_{kt} = w + Log\, W_{kt} + Log\, G_{kt} + w_k + v_{kt} \qquad \text{(C.3)}$$

Di mana P_{kt} = kemiskinan untuk wilayah k pada periode t; W_{kt} dan G_{kt} seperti di persamaan (C.1),w_k= efek-efek yang tetap atau acak; dan v_{kt} = term kesalahan.

Sudah cukup banyak studi empiris dengan pendekatan analisa lintas negara yang menguji relasi antara pertumbuhhan ekonomi dan kemiskinan, dan hasilnya menunjukan bahwa memang ada suatu korelasi yang kuat antara kedua variabel ekonomi makro tersebut. Akhir-akhir ini juga cukup banyak studi yang mencoba membuktikan adanya pengaruh dari pertumbuhan *output* sektoral terhadap pengurangan jumlah orang miskin. Dengan kata lain, kemiskinan tidak hanya berkorelasi dengan pertumbuhan output agregat atau PDB/PN, tetapi juga dengan pertumbuhan output di sektor-sektor ekonomi secara individu. Misalnya studi dari Ravallion dan Datt (1996 a,b) dengan memakai data dari india menemukan bahwa pertumbuhan output di sektor-sektor primer, khususnya pertanian, jauh lebih efektif terhadap penurunan kemiskinan dibandingkan sektor-sektor sekunder. Sektor-sektor terakhir ini tidak mempunyai efek yang berarti terhadap penurunan kemiskinan di perdesaan maupun perkotaan.

Hasan dan Quibiria (2002) juga melakukan studi untuk menguji secara empiris dampak dari pola pertumbuhan output menurut sektor tehadap penurunan kemiskinan dengan menggunakan data panel dari 45 negara di Asia Tmur dan Selatan, Amerika Latin dan Karibia, dan Afrika (sub-sahara). Model yang digunakan untuk mengestimasi pengaruh dari pertumbuhan PDB terhadap tingkat kemiskinan pada prinsipnya sama seperti persamaan (C.3). sedangkan untuk mengukur relasi antara kemiskinan dan pertumbuhan sektoral, mereka mengestimasi persamaan berikut ini.

$$LnP = a + b_1 LnY_1 + b_2 LnY_2 + b_3 LnY_3 + u + R \quad \text{(C.4)}$$

Di mana P adalah kemiskinan yang didefinisikan sebagai suatu fraksi dari jumlah populasi dengan pengeluaran konsumsi dibawah suatu tingkat pengeluaran minimum tertentu yang telah di tetapkan sebelumnya, pada garis kemiskinan; Y mewakili tingkat output perkapita di tiga sektor ; pertanian industri pengolahan, dan jasa; sedangkan u dan R adalah term kesalahan.

Hasilnya memberi kesan bahwa ada suatu korelasi negative anatara tingkat pendapatan dan kemiskinan: semakin tinggi tingkat pendapatan perkapita, maka semakin rendah tingkat kemiskinan; atau dengan kata lain, negara-negara dengan tingkat PN perkapita yang lebih tinggi cenderung mempunyai tingkat kemiskinan yang lrbih rendah dibanding negara-negara yang tingkat PN perkapitanya lebih rendah. Hasil adri penelitian tersebut menujukan bahwa elastisitas pertumbuhan pendapatan dari kemiskinan untuk Asia Timur adalah yang tertinggi, disusul kemudian oleh Amerika Latin, Asia selatan dan Afrika (sub-sahara). Jadi, menurut hasil ini, 1% kenaikan PN perkapita akan mengurangi kemiskinan 1,6% di Asia Timur,dan 0,71% di Afrika Sub-Sahara.

Jadi dalam perdebatan akademis selama ini mengenai hubungan antara pertumbuhan dan penurunan kemiskinan, pertanyaan pokoknya adalah: apakah pertumbuhan ekonomi memihak kepada orang miskin. Dalam akhir 1990-an, term 'pertumbuhan yang pro kemiskinan' (sebut PPG) ini menjadi terkenal saat banyak ekoonom mulai menganalisis paket-paket kebijakan yang dpat mencapai penurunan kemiskinan yang lebih cepat lewat pertumbuhan ekonomi dan perubahan distribusi pendapatan.PPG secara umum didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang membuat penurunan kemiskinan secara sigiifikan.Dalam usaha memberikan relevansi analisis dan operasional terhadap konsep tersebut, di dalam literatur muncul dua pendekatan.Pendekatan pertama memfokuskan pada keyakinan bahwa orang miskin pasti mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi walaupun tidak proposional.Artinya, pertumbuhan ekonomi memihak kepada orang miskin jika di barengi dengan suatu pengurangan kesenjangan; atau dengan kata lain, pangsa pendapatan dari kelompok miskin meningkat bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi.Pendekatan ini disebut juga definisi relatif dari PPG.Walaupun secara intuisi menarik, pendekatan atau definisi ini terbatas, terutama saat di terapkan di dalam

suatu konteks operasional.Dalam definisi PPG ini, pertumbuhan bisa mengurangi kesenjangan.Tetapi dengan memfokuskan terlalu berat pada kesenjangan. Tetapi dengan memfokuskan pada kesenjangan, suatu paket kebijakan bisa mengakibatkan hasil-hasil yang suboptimal bagi kedua kelompok : miskin dan non-miskin; atau laju penurunan kemiskinan bisa lebih kecil (Word Bank, 2005).

Pendekatan kedua focus pada percepatan laju pertumbuhan pendapatan dari kelompok miskin lewat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan dengan memperbesar kesempatan-kesempatan bagi orang-orang miskin untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan, yang hasilnya memperbesar laju kemiskinan. Bukti empiris memberi kesan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah penggerak utama laju PPG,tetapi perubahan-perubahan dalam kesenjangan bisa memperbesar atau mengurangi laju tersebut. Jadi, mempercepat lajuu PPG mengharuskan tidak hanya pertumbuhan yang lebih pesat, tetapi juga upaya-upaya untuk memperbesar kemampun-kemampuan dari orang-orang miskin untuk mendapatkan keuntungan dari kesempatan-kesempatanyang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi. Dengan penekanan pada akselerasi laju pengurangan kemiskinan, pendekatan ini konsisten dengan komitmen masyarakat dunia terhadap sasaran pertama dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDG).Yakni pengurangan setengah dari proporsi dari masyarakat di dunia yang hidup kurang dari 1 dolar AS per hari (kemiskinan Ekstrim) antara Tahun 1990 dan tahun 2005.

D. Analisis Empiris

1. Kemiskinan

Kemiskinan bukan hanya masalah Indonesia, tetapi merupakan masalah dunia. Akibat krisis keuangan Asia selama periode 1997-1998, persentase penduduk di Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan mengalami suatu kenaikan yang dramatis yakni dari 17,47% pada tahun 1996 menjadi sekitar 24,23% pada tahun1998, saat krisis tersebut mencapai titik terburuknya, pada saat dimana ekonomi Indonesia mengalami suatu penurunan hingga 13%. Namun setelah itu, pada tahun 1999, tingkat kemiskinan mulai menurun secara perlahan hingga tahun 2005. Tetapi pada tahun 2006, jumlah kemiskinan kembali meningkat

menjadi 17,75% atau sekitar 39,30 juta orang. Jumlah rumah tangga miskin waktu itu di perkirakan mencapai 19,1 juta, terdiri dari 2,8 juta sangat miskin, 8,2 juta miskin, dan 6,9 juta dekat dengan kemiskinan. Kenaikan jumlah orang miskin tersebut, terutama akibat dampak dari pemotongan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yangterjadi menjelang akhir tahun 2005.

Tabel 17 Kemiskinan di Indonesia 1976 – Maret 2017

Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970-2017								
Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)			Persentase Penduduk Miskin			Garis Kemiskinan (Rp / Kapita / Bulan)	
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa
1970	n.a	n.a	70.00	n.a	n.a	60.00	n.a	n.a
1976	10.00	44.20	54.20	38.80	40.40	40.10	4 522	2 849
1978	8.30	38.90	47.20	30.80	33.40	33.30	4 969	2 981
1980	9.50	32.80	42.30	29.00	28.40	28.60	6 831	4 449
1981	9.30	31.30	40.60	28.10	26.50	26.90	9 777	5 877
1984	9.30	25.70	35.00	23.10	21.20	21.60	13 731	7 746
1987	9.70	20.30	30.00	20.10	16.10	17.40	17 381	10 294
1990	9.40	17.80	27.20	16.80	14.30	15.10	20 614	13 295
1993	8.70	17.20	25.90	13.40	13.80	13.70	27 905	18 244
1996	7.20	15.30	22.50	9.70	12.30	11.30	38 246	27 413
1996	9.42	24.59	34.01	13.39	19.78	17.47	42 032	31 366
1998	17.60	31.90	49.50	21.92	25.72	24.20	96 959	72 780
1999	15.64	32.33	47.97	19.41	26.03	23.43	92 409	74 272
2000	12.31	26.43	38.74	14.60	22.38	19.14	91 632	73 648
2001	8.60	29.27	37.87	9.79	24.84	18.41	100 011	80 382
2002	13.32	25.08	38.39	14.46	21.10	18.20	130 499	96 512
2003	12.26	25.08	37.34	13.57	20.23	17.42	138 803	105 888
2004	11.37	24.78	36.15	12.13	20.11	16.6	143 455	108 725
2005	12.40	22.70	35.10	11.68	19.98	15.97	165 565	117 365
2006	14.49	24.81	39.30	13.47	21.81	17.75	174 290	130 584
2007	13.56	23.61	37.17	12.52	20.37	16.58	187 942	146 837
2008	12.77	22.19	34.96	11.65	18.93	15.42	204 896	161 831
2009	11.91	20.62	32.53	10.72	17.35	14.15	222 123	179 835
2010	11.10	19.93	31.02	9.87	16.56	13.33	232 989	192 354
Mar 2011	11.05	18.97	30.02	9.23	15.72	12.49	253 016	213 395
Sep 2011	10.95	18.94	29.89	9.09	15.59	12.36	263 594	223 181
Mar 2012	10.65	18.49	29.13	8.78	15.12	11.96	267 408	229 226
Sep 2012	10.51	18.09	28.59	8.60	14.70	11.66	277 382	240 441
Mar 2013	10.33	17.74	28.07	8.39	14.32	11.37	289 042	253 273

Sep 2013	10.63	17.92	28.55	8.52	14.42	11.47	308 826	275 779
Mar 2014	10.51	17.77	28.28	8.34	14.17	11.25	318 514	286 097
Sep 2014	10.36	17.37	27.73	8.16	13.76	10.96	326 853	296 681
Mar 2015	10.65	17.94	28.59	8.29	14.21	11.22	342 541	317 881
Sep 2015	10.62	17.89	28.51	8.22	14.09	11.13	356 378	333 034
Mar 2016	10.34	17.67	28.01	7.79	14.11	10.86	364 527	343 647
Sep 2016	10.49	17.28	27.76	7.73	13.96	10.70	372 114	350 420
Mar 2017	10.67	17.10	27.77	7.72	13.93	10.64	385 621	361 496

Catatan:
1. Sejak Desember 1998 digunakan standar kemiskinan baru yang merupakan penyempurnaan standar lama. Data tahun 1976-1996 menggunakan standar lama, angka tahun 1996-2013 menggunakan standar baru
2. Referensi waktu untuk seluruh data adalah Februari, kecuali data tahun 1998 (Desember) dan tahun 2006-2010 (Maret).
Data mulai tahun 1999 tanpa Timor TimurSumber: BPS (www.bps.go.id)

Selama periode 2005-2006, jumlah orang miskin di Indonesia tercatat bertambah sebanyak 4,2 juta orang. Baru setelah beberapa penyesuaian kebijakan dan stabilisasi ekonomi makro, tingkat kemiskinan mulai menurun lagi sejak tahun 2007. Dalam bentuk relatif, tingkat kemiskinan pada tahun 2007 sama seperti sebelum krisis 1997-1998 terjadi. Namun demikian dalam bentuk absolut, jumlah orang yang pengeluaran rat-rata perhari di bawah garis kemiskinan yang berlaku tetap lebih tinggi dibanding pada era Orde Baru sebelum krisis 1997-1998.Walaupun perbedaan wilayah berfariasi menurut tahun, tingkat kemiskinan di daerah perkotaan juga selalu lebih kecil di bandingkan di daerah perdesaan dan terus berlangsung pada tahun berikutnya. Berdasarkan pada data bulan maret 2010, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yang berlaku pada tingkat nasional adalah sekitar 13% kemudianpersentase pada tahun berikutnya berangsur menurun. Menurut data bulan maret 2017 telah mencapai sekitar 10%.

Selain tingkat kemiskinan, ada dua hal lain yang juga harus di perhatikan dalam membahas soal kemiskinan di Indonesia,yakni kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Kedalamam kemiskinan menujukan rata-rata kesenjangann pengeluaran penduduk miskin terhaadap batas miskin (garis kemiskinan yangberlaku), sedangkan keparahan kemiskinan menunjukan ketimpangan pengeluaran dari penduduk paling miskin, atau yang makin jatuh di bawah garis kemiskinan yang berlaku.Semakin besar

nilai kedua indeks ini di sebuah negara mencerminkan semakin seriusnya persoalan kemiskinan di negara tersebut.

Tentu keberhasilan pemerintahan Orde Baru mengurangi kemiskinan lewat pertumbuhan ekonomi yang tingggi tidak mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah satu-satunya yang diperlukan untuk mengeentaskan kemiskinan. Dengaan kata lain, pertumbuhan ekonomi adlah suatu factor yang sangat penting bagi penurunan kemiskinan, tetapi bukan satu-satunya penentu. Kebijakan-kebijakan yang pro miskin sangat diperlukan agar pertumbuhan ekonomi bersifat PPG, yakni yang mempunyai suatu dampak positif yang berarti bagi pengurangan kemiskinan, terutama kebijakan-kebijakan yang produktif seperti perluasan akses bagi semua orang ke pendidikan (khusus pendidikan dasar)vdan pelayanan kesehatan, peningkatan kesempatan kerja, dan pembangunan sektor pertanian dan ekonomi perdesaaan. Hal ini di dasari sejak awal oleh presiden soeharto, dan memang sejak awal orde baru, pemerintah Indonesia sudah memperlihatkan kesungguhan dalam upaya memerangi kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sudah banyak program pemerintah pusat hingga saat ini yang mencerminkan usaha tersebut, seperti UMKM dan koperasi, inpres desa tertinggal (IDT), program Transmigrasi, peningkatan Upah Minimum Regional (UMR) dll.

Kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap kemiskinan adalah para pekerja pabrik dan rumah tangga yang beberapa tahun belakangan kondisi ekonomi mereka membaik akibat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan yang menciptakan kesempatan kerja lebih besar dan lebih baik (dari sisi pendapatan), namun mereka berada persis dibawah garis kemiskinan yang berlaku.Kondisi seperti ini membuat merekan sangat terancam kembali mrnjadi miskin apabila ada sebuah krisis ekonomi seperti pada tahun 2008-2009.Kelompok pekerja yang masuk didalam kategori ini adalah pekerja-pekerja tidak berpendidikan tinggi seperti pekerja pekerja kontrak atau borongan di industri-industri berorientasi ekspor dan padat karya seperti tekstil dan pakaian jadi, makanan minuman, dan barang-barang dari kulit (termasuk alas kaki) dan barang-barang dari kayu (termasuk meubel).

2. Kesenjangan

Kalau dilihat peada tingkat agregat dengan memperhatikan perkembangan sejumlah variabel-variabel ekonomi makro selama Orde Baru hingga saat ini, missal laju pertumbuhan PDB rata-rata pertahun, peningkatan PN perkapita, diversifikasi ekonomi, dan pangsa ekspor non-migas, diakui ada keberhasilan dari pembangunan ekonomi selama ini, walaupun sempat terganggu oleh dua kali krisi ekonomi. Akan tetapi, keberhasilan suatu pembangunan ekonomi tidak dapat hanya diukur dari laju pertumbuhan output atau penimgkatan pendapatan secara agregat atau perkapita. Tetapi, bahkan lebih penting, harus dilihat juga dari pola distribusi dari peningkatan pendapatan tersebut.

Studi-studi mengenai distribusi pendapatan di Indonesia pada umumnya menggunakan data BPS mengenai peluaran konsumsi rumah tangga dari survei Sosial Ekonmi Nasional (SUSENAS), dan alat ukur/ indikator yang uum digunakan adalah koefisien Gini yang nilainya antara 0 (tidak ada kesenjangan) dan 1 (kesenjangan penuh). Data pengeluaran konsumsi dipakai sebagai suatu pendekatan (proksi) untuk mengukur distribusi pendapatan masyarakat. Dapat diakui bahwa cara ini sebenarnya mempunyai kelemahan yang serius: data pengeluaran konsumsi bisa memberikan informasi yang tidak tepat mengenai pendapatan, atau tidak mencerminkan tingkat pendapatan yang sebenarnya. Jumlah pengeluaran konsumsi seseorang tidak harus selalu sama dengan jumlah pendapatan yang diterimanya, bisa lebih besar atau lebih kecil, misalnya karena adanya tabungan atau pemakaian kredit bank untuk membiayai pengeluaran konsumsi tetentu. Demikian pula, pengertian pendapatan, yang artinya pembayaran yang didapat karena bekerja atau menjual jasa tidak sama dengan pengertian kekayaan. Kekayaan seseorang bisa jauh lebih besar dari pada pendapatannya. Seseorang bisa saja tidak punya pekerjaan (pendapatan), tetapi ia sangat kaya karena ada warisan keluarga. Banyak perusahaan-perusahaan muda di Indonesia kalau diukur dari tingkat pendapatan mereka tidak terlalu berlebihan, tetapi mereka sangat kaya karena perusahaan dimana mereka bekerja adalah milik mereka(atau orang tua mereka). Akan tetapi, karena pengumpulan data pendapatan di Indonesia seperti di negara berkembang lainnya masi relatif sulit, salah satunya karena banyak rumah tangga atau individu yang mempunyai

pekerjaan di sektor informal atau tidak menentu, maka penggunaan data pengeluaran konsumsi rumah tangga di anggap sebagai salah satu alternatif.

Secara teoritis, perubahan pola distribusi pendapatan di perdesaan di Indonesia selama ini dapat disebabkan oleh factor-faktor berikut ini.

a. Akibat arus penduduk/ tenaga kerja dari perdesaan ke perkotaan yang selama Orde baru berlangsung sangat pesat. Sesuai teori A. Lewis (1954), perpindahan orang dari perdesaan ke perkotaan memberi suatu dampak positif terhadap perekonomian di perdesaan: kesempatan kerja produktif, tingkat produktifitas dan pendapatan rata-rata masyarakat di perdesaan meningkat. Sedangkan, ekonomi perkotaan pada suatu saat akhirnya tidak mampu menampung suplai tenaga kerja yang meningkat terus setiap tahunnya, yang sebagian besar adalah pendatang dari perdesaan, yang akhirnya berakibat pada peningkatan pengangguran, di satu pihak, dan menurunnya laju pertumbuhan tingkat upah/gaji di pihak lain.

b. Struktur pasar dan besarnya distorsi yang berbeda di perdesaan dengan perkotaan. Di perdesaan, jumlah sektor relatif lebih kecil di bandingkan di perkotaan, dan sektor-sektor yang ada di perdesaan lebih kecil (dilihat dari jumlah unut usaha di dalam output yang di hasilkan oleh sektor) dibandingkan sektor-sektor yang sama di perkotaan. Perbedaan ini di tambah dengan tingkat pendapatan perkapita di perdesaan yang lebih rendah dari pada di perkotaan membuat struktur pasar di perdesaan jauh lebih sederhana daripada di perkotaan. Struktur pasar yang sederhana inimembuat distorsi pasar juga relatif lebih kecil (kesempatan berusaha bagi individu lebih besar) de perdesaan di bandingkan di perkotaan.

c. Dampak positif dari proses pembangunan ekonomi nasional. Dampaktersebut bisa dalam beragm bentuk, diantaranya:

1) Semakin banyak kegiatan-kegiatan ekonomi di perdesaan di luar sektor pertanian, seperti industri manufaktur (kebanyakan dalam skala kecil, atau industri rumah tangga, perdagangan, pembengkelan, pembangunan dan jasa lainnya). Diservisikasi ekonomi perdesaan ini tentu menambah jumlah kesempatan kerja di perdesaan dan juga menambah pendapatan petani;

2) Tingkat produktifitas dan pendapatan riil tenaga kerja di sektor pertanian meningkat, bukan saja akibat arus manusia dari sektor tersebut

ke sektor-sektor lainnya di perkotaan (seperti di dalam teori A.Lewis), tetapi juga akibat penerapan/ pemakaian teknologi baru dan penggunaan *input-input* yang lebih baik, misalnya pupuk hasil pabrik dan permintaan pasar domestik dan ekspor terhadap komoditas-komoditas pertanian meningkat;

3) Potensi SDA yang ada di perdesaan semakin baik dimanfaatkan oleh penduduk desa (pemakaian semakin optimal).

Selain kesenjangan pendapatan, ketimpangan ekonomi antar wilayah, misalnya provinsi, di Indonesia juga terjadi. Proses transisi ekonomi menuju ekonomi modern atau perkotaan yang membuat sektor-sektor produktif semakin mendominasi ekonomi nasional di satu sisi, dan semakin terpusatnya kegiatan-kegiatan dari sektor-sektor tersebut di wilayah-wilayah tertentu karena kondisi dari wilayah-wilayah itu paling menguntungkan (karena ketersediaan infrastuktur, SDM, sumber modal, dan prasana pendukung utama lainnya), di sisi lain, membuat terjadinya ketimpangan ekonomi antar wilayah/provinsi di Indonesia.

Dua indikator kunci yang biasa di gunakan untuk melihat kewilayah di Indonesia dengan kegiatan-kegiatan ekonomi cenderung terpusatkan adalah pembentukan atau pertumbuhan PDB daerah (PDRB), dan distribusi PDB menurut wilayah (misalnya provinsi). Besaran PDRB dari suatu wilayah terbentuk oleh kombinasi antara total *output* yang dihasilkan (sisi penawaran agregat) oleh semua sektor ekonomi dan besarnya permintaan(sisi permintaan agregat) di wilayah itu. Tinggi rendahnya *output*yang bisa di hasilkan oleh semua sektor ekonomi yang ada di wilayah tersebut (yang bisa di impor dari luar wilayah) seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, teknologi, modal, energi, dan kewirausahaan. Dari sini saja bisa di pahami bahwa pertumbuhan *output* yang rendah di suatu wilayah mencerminkan adanya keterbatasan atas satu atau lebih dari factor-faktor produksi itu di wilayah tersebut.

Sedangkan dari sisi permintaan agregat, tinggi rendahnya PDRB dari suatu wilayah ditentukan oleh kombinasi dari jumlah dan struktur penduduk serta pendapatan riil per orang di wilayah tersebut. Dengan kata lain, dari sisi permintaan agregat (penggunaan), wilayah dengan PDRB yang rendah mencerminkan sedikitnya jumlah penduduk atau lebih banyaknya orang miskin dibandingkan orang kaya atau kombinasi dari keduanya di wilayah itu. Karena sebagian besar dari jumlah penduduk di

Indonesia bermukin dijawa, maka dapat diperkirakan bahwa jumlah nilai konsumsi rumah tangga (yang merupakan salah satu komponen penting dari sisi permintaan agregat dari pembentukan PDB) di jawa adalah yang terbesar di ndonesia. Menurut suatu penelitian yang di kutip oleh Parikesit (2010), tingkat konsumsi penduduk DKI Jakarta adalah empat kali wilayah lain di Indonesia.

E. Kebijakan Anti Kemiskinan

Untuk mengetahui kenapa diperlukan kebijakan anti-kemiskinan dan pemerataan distribusi pendapat, perlu diketahui dulu faktor-faktor yang saling berkaitan berkenaan dengan pengurangan kemiskinan diantaranya pola hubungan anatara pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah, kelembagaan, dan penurunan kemiskinan.Kebijakan mempengaruhi kemiskinan, baik langsung maupun tidak langsung, lewat sejumlah faktor-faktor yang menengahinya.Kebijakan-kebijakan langsung adalah kebijakankebijakan dalam berbagai macam program yang khusus dibuat untuk mengurangi kemiskinan, jadi sasarannya adalah penduduk miskin.Sedangkan kebijakan-kebijakan tidak langsung, yakni kebijakan-kebijakan ekonomi yang sasarannya bukan penduduj miskin, tetapi mempunyai pengaruh positif terhadap pengurangan kemiskinan. Misalnya, kebijakan perdagangan yang membatasi impor suatu produk dengan harapan industri dalam negeri yang membuat produk tersebut bisa berkembang pesat, dan yang pada akhirnya menciptakan banyak kesempatan kerja dan menurunkan kemiskinan, atau kebijakan kebijakan moneter yang menurunkan suku bunga dengan harapan investasi di dalam negeri meningkat, yang selanjutnya menambah kesempatan kerja dan berarti juga mengurangi jumlah orang miskin.

Untuk mendukung strategi yang tepat dalam memerangi kemiskinan, diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan perantaranya dapat dibagi menurut waktu, yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.Intervensi jangka pendek adalah terutama pembangunan sektor pertanian, usaha kecil dan ekonomi perdesaan.Hal ini sangat penting melihat kenyataan bahwa di satu pihak, hingga saat ini, sebagian besar wilayah Indonesia masih perdesaan dan sebagian besar penduduk Indonesia tinggal dan bekerja di pedesaan.Seperti

yang dijelaskan dalam teori A.Lewis, pada awalnya penduduk di perdesaan lebih padat dari pada di perkotaan, yang membuat tingkat kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dari pada perkotaan.Akibat ketimpangan ini, terjadilah migrasi dan urbanisasi, yang sebenarnya adalah perpindahan sebagian dari kemiskinan di perdesaan ke perkotaan.Intervensi lainnya yang bisa dimasukkan dalam kategori intervensi jangka pendek adalah manajemen lingkungan dan SDA. Hal ini sangat penting karena hancurnya lingkungan dan habisnya SDA akan sendirinya menjadi faktor pengerem proses pembanguana dan pertumbuhan ekonomi, yang berarti juga sumber peningkatan kemiskinan. Selain itu pembangunan transportasi, komunikasi, energi dan keuangan, peningkatan keikutsertaan masyarakat sepenuhnya dalam pembangunan, dan proteksi sosial (termasuk pembangunan sistem jaminan sosial) juga merupakan intervensi jangka pendek yang sangat penting.

Sedangkan intevensi jangka menengah dan jangka panjang yang penting adalah sebagai berikut :

- Pembangunan/ penguatan sektor swasta
- Kerja sama regional
- Manajemen pengeluaran pemerintah (APBN) dan administrasi
- Desentralisasi
- Pendidikan dan kesehatan
- Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan
- Pembagian tanah pertanian yang merata

Sejak pemerintahan Orde baru hingga sekarang ini, sudah banyak upaya/intevensi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Selama pemerintahan SBY, ada 12 program utama pengurangan kemiskinan, yaitu :

- Bantuan langsung tunai (BLT)
- Beras untuk rakyat miskin (Raskin)
- Bantuan untuk sekolah pendidikan
- Bantuan kesehatan gratis
- Pembangunan perumahan rakyat

- Pemberian kredit mikro
- Bantuan untuk petani dan peningkatan produk pangan
- Bantuan untuk nelayan dan program sektor perikanan
- Peningkatan kesejahteraan PNS termasuk TNI dn POLRI
- Peningkatan kesejahteraan buruh
- Bantuan untuk penyandang cacat (jaminan sosial)
- Pelayanan public cepat dan murah

Untuk menjalankan program tersebut pemerintah sudah banyak mengeluarkan dana setiap tahunnya, yang pada tahun 2009, berdasarkan data dari menteri keuangan (MenKeu), mencapai 71 triliun rupiah dan menurut rencana anggaran pendapatan dan belanja negara tahun (RAPBN) 2010 mencapai hamper 65 triliun rupiah. Sedangkan berdasarkan informasi dari Menteri Koordinasi Kesejahteraan Sosial (Menkokesra) dan Bps, pada tahun tersebut jumlah anggaran untuk menanggulangi kemiskinan tercacat sebanyak 94 triliun rupiah.

Kemudian terdapat empat strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu:

- Menyempurnakan program perlindungan sosial
- Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar
- Pemberdayaan masyarakat, dan
- Pembangunan yang inklusif

Terkait dengan strategi tersebut diatas, Pemerintah telah menetapkan instrumen penanggulangan kemiskinan yang dibagi berdasarkan tiga kelompok kerja, masing-masing:

- Kelompok Kerja (Pokja) Kebijakan Bantuan Sosial
- Kelompok Kerja (Pokja) Kebijakan Jaminan Kesehatan
- Kelompok Kerja (Pokja) Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi & Pendapatan

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) selaku anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Data Terpadu Program

Penanganan Fakir Miskin (PPFM) menyeleggarakan Lokakarya Pelaksanaan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Untuk Program Bantuan Pangan Non Tunai yang diadakan pada 16-18 Mei 2017 bertempat di Hotel Swiss Bell, Jakarta serta dihadiri oleh Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Sosial dari 34 Propinsi se-Indonesia dan 106 Kabupaten/Kota.

Dalam artikel TNP2K pada 19 mei 2017 Andi Zainal Abidin Dulung, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosia dalam pembukaan menjelaskan bahwa mulai tahun anggaran 2018, seluruh kegiatan bantuan sosial (bansos) dan Rastra akan menggunakan Basis Data Terpadu (BDT), sebagai sasaran program. Oleh karena itu pemutakhiran data BDT oleh pemerintah daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota mutlak dilakukan. MPM mengandalkan pada partisipasi masyarakat, khususnya Rumah Tangga Miskin (RTM) yang melakukan pembaruan data dengan melaporkan diri mereka kepada unit atau kelompok kerja (pokja) yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, terutama jika RTM ini tidak atau belum terdaftar dalam BDT.

Banyak hal lain yang patut dipertimbangkan demi melihat nyaris gagalnya intervensi program penanggulangan kemiskinan selama ini dalam mengentaskan kemiskinan secara real. Strategi dan kebijakan alternatif yang berpihak kepada rakyat miskin, option for the poor, menjadi kebutuhan mutlak menanggulangi kemiskinan. Untuk membuat strategi dan kebijakan alternatif, diperlukan pengetahuan yang memadai tentang penyebab utama (akar) kemiskinan masyarakat desa.

Strategi dan kebijakan alternatif menanggulangi kemiskinan di desa dapat dilakukan dengan cara;

· Memberikan kesempatan luas kepada masyarakat desa memperoleh layanan pendidikan memadai dan gratis.

· Redistribusi lahan dan modal pertanian yang seimbang

· Mendorong perkembangan investasi pertanian dan pertambangan ke daerah pedesaan. Pembukaan investasi pertanian dan pertambangan dapat memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat desa. Dengan begitu, pendapatan mereka akan meningkat dan berpengaruh pada perubahan kesejahteraan hidup.

· Membuka kesempatan luas kepada masyarakat desa memperoleh kredit usaha yang mudah.

· Memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan masyarakat desa.Dapat dilakukan melalui mekanisme lumbung desa yang memberikan kesempatan sama kepada masyarakat, memperoleh sumber kebutuhan secara terorganisir.

· Memperkenalkan sistem pertanian modern dengan teknologi baru yang memberikan kemudahan bagi masyarakat menggali sumber pendapatan yang memadai.

· Memberikan jaminan kesehatan kepada mayarakat dengan sistem layanan kesehatan gratis, memperbanyak PUSKESMAS dan unit layanan kesehatan kepada masyarakat desa.

· Memberikan jaminan asuransi dan jaminan sosial terhadap masyarakat desa.

· Memperkuat komitmen eksekutif dan legislatif untuk memperbaiki tatanan pemerintahan.

Guna menunjang keberhasilan strategi tersebut, perlu dipikirkan baberapa hal yaitu (1) upaya penanggulangan kemiskinan tersebut dilakukan menyeluruh, terpadu, lintas sektor, sesuai kondisi dan budaya lokal. Karena faktanya tidak ada satu kebijakan kemiskinan yang sesuai untuk semua; (2) memberikan perhatian terhadap aspek proses, tanpa mengabaikan hasil akhir proses tersebut. Biarkan orang miskin merasakan bagaimana proses mereka bisa keluar dari lingkaran setan kemiskinan; (3) program melibatkan dan merupakan hasil proses dialog berbagai pihak dan konsultan bersama segenap pihak yang berkepentingan terutama masyarakat miskin; (4) meningkatkan kesadaran dan kepedulian semua pihak terkait, serta membangkitkan gairah mereka yang terlibat untuk mengambil peran yang sesuai agar tercipta rasa memiliki program; (5) menyediakan ruang gerak seluas-luasnya bagi munculnya aneka inisiatif dan kreativitas masyarakat di berbagai tingkat. Dalam hal ini, pemerintah lebih berperan hanya sebagai inisiator dan fasilitator dalam proses tersebut, sehingga, kerangka dan pendekatan penanggulangan kemiskinan disepakati bersama; (6) pemerintah dan pihak lainnya dapat bergabung menjadi kekuatan yang saling mendukung dan (7) mereka yang bertanggungjawab dalam

menyusun anggaran belanja harus menyadari pentingnya penanggulangan kemiskinan sehingga upaya ini ditempatkan dan mendapat prioritas utama dalam setiap program di setiap instansi. Dengan demikian, penanggulangan kemiskinan menjadi gerakan dari, oleh dan untuk rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

ADB (1997), Emerging Asia, Asian Development Bank, Oxford

Adelman, M., & Morris, U. (1973). Economic Growth And Social Equity in Developing Countries. Stanford: Stanford University Press.

Adelman, M; dan U. Morris, 1973, Economic Growth And Social Equity in Developing Countries, Stanford: Stanford University Press

Aguilar, C. (2006). Trade Analysis of Spesific Agri-food Commodities Using a Gravity Model. Department of Agricultural Economics.

Aguilar, C., 2006, Trade Analysis Of Spesific Agri-food CommoditiesUsing a Gravity Model, Department of Agricultural Economics

Agustus, Manila: Asian Development Bank.

Ahuja, V.,B. Bidani, F.H.G. Ferreira dan M. Walton (1997), "Everyone Miracle?", Washington,D.C.: Word Bank.

Ajit Ghose and Keith Griffin, Rural Poverty and Development Alternatives in South And Southeast Asia : Some policy Issues, dimuat dalam : Development and change, vol. 11. 1980, hal 545

Ajit Ghose & Griffin, K. (1980). Rural Poverty and Development Alternati Ves in South and Southeast Asia: some Policy Issues. Development.

Alfian. (1991). Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Politik. In O. Oesman, Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. Jakarta: BP7 Pusat.

Analisis ekonomi pembangunan inklusif ,Rabu, 02 Januari 2013; http://economiy.okezone.com/read/2013/01/02/279/740087/large.

Anderson, J. (1979). a Theoritical Foundation for the Gravity Equation. American Economic Review 69.

Andre, B. A. (1981). Strategi Anti Kemiskinan Lima Tahap (Vol. Tahun X). Jakarta: Analisa.

ASEAN, S. (2007).

Atkinson, A. (1999). Is Rising Income Inequality Evitable A Critique of The Translatic Consensus. UNU/WIDER.

Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2007,

Badan Pusat Statistik, 2008, Laporan Bulanan Data Sosial Ekoonomi, beberapa edisi Oktober 2009-2014

Badan Pusat Statistik. (1998-2014). Statistik Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik

Baldwin, R; dan C. Wyplosz, 2004, the Economics of European Integration, McGraw Hill

Bank Indonesia, 2006, Outlook Ekonomi Indonesia 2006-2010, edisi Juli 2006, Bank Indonesia

Bank Indonesia, 2006. Outlook Ekonomi Indonesia 2006-2010, edisi Juli 2006, Bank Indonesia

Bank of England, 2007, Inflation Report November 2007

Barro R.J., 1996, Inflation and Growth, Federal Reserve Bank of St. Louis Review 78 (May/Juni 1996)

Basal', U , 1m; 1 1:919: Konglomemt, Aset atau Beban Nasional?", Prohl Indonesia, Jurnal Tahunan CIDES, no.

Basalim, U, 1994, Konglomerat: Aset atau Beban Nasional?", Profil Indonesia, Jurnal Tahunan CIDES, no. 1, h. 119-144.

Becker, G.S., dan B.R. Chiswick, 1966, Education and The Distribution of Earnings, American Economic Review, 86, 218-223

Becker, Koen De dan Yamano, Norikiho, 2007, The Measurement of Globalisation Using Internasional Input Output Tables. STI Working Paper No. DST/DOC (2007)8.OECD Directorate of Science, Technology, and Industri

Ben-David, D., Ayal K., 2000, Trade and the Rate of Income Convergence, Center for Economic Policy Research Discussion Paper 2390

Bernanke, Ben S.: The Global Saving Glut and the US Current Account Deficit, Remarks by Governor (2005).

Bowen, H.P., E.E. Learner dan L. Sveikauskas, 1987, Multicountry, Multifactor Tests of the Factor Abundance Theory. American Economic Review, (December) 77,791-809

Bowen, H.P., H. Munandar, dan J.-M. Viaene, 2005, The Limiting Distribution of Production in Integrated

Budiman, A., 1989, Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia, PT Gramedia, Jakarta,

Caballero, Ricardo J. Farhi, Emmanuel, Gourinchas, Pierre-Olivier : Financial Crash, Commodity Prices, and Global Imbalances NBER Working Paper December 2008.

Cashin P. and McDermott land S o W r r W , , . c tt, A. Booms and Slum ‘ ld C ‘ ‘ ‘ (1). ps in o ommodity P ices, IMF orkmg

Cashin, P. and McDermott, J.and Scott, A. Booms and Slumps in World Commodity Prices, IMF Working Papers (1999).

Cashin, P. and McDermott, J: The Long-Run Behavior of Commodity Prices :Small Trends and Big Variability

Chaniago, Andrinof A. (2001), Gagalnya Pembangunan, Kajian

Chenery, H.B., dan M. Syrquin, 1975, Patterns of Development, 1950-1970, London: Oxford University Press

Chiswick, B.R., 1971, Earnings Inequality and Economic Development, Quarterly Journal of Economics, 85, 21-39.

Chlsgvsid: 3-K, 1971, Earnings Inequality and Economic Development, Quarterly Journal of Economics, , 1-39.

Choesni, Tb. A., 2007, bahan tayangan Focus Group DIscussion Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012, Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Clarence N. Stone, Robert K. Whelen, William J. Murin, Policy and Politics in a Bureaucratic Age, Prentice-Hall, Inc” Englewood, Cliffs, N.J., 1979, Hal. 214

Corneo, G., dan 0. Jeanne, 2001, Status, the Distribution of Wealth, and Growth, Scandinavian Journal of Economics, 103, 283-293. ‘

Corneo, G., dan O. Jeanne, 2001, Status, the Distribution of Wealth, and Growth, Scandinavian Journal of Economics, 103, 283-293.

de Dios, L.C., 2006, An Investigation into the Measures Affecting the Integration of ASEAN's Priority Sektors (Phase 2): Overview: Non-Tariff Barries to Trade in the ASEAN Priority Goods Sektors, REPSF Project No.06/001a

Deardorff, V. A., 1995, Determinants of Bilateral Trade: Does Gravity Work in a Neoclassic World?, NBER Working Paper No. 5377.

Dell Ariccia, Igan, and Laeven, Credit Booms and Lending Standards : Evidence from the Subprime Mortgage Market, IMF Working Paper 2008

Departemen Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan No. 1/2008

DeRosa, DA, 1995, International T rode. Regional Integration, and Food Security in the Middle East, Trade and Macroeconomtc Division, International Food Policy Research Institute Discussion Paper 40. '

Devereux, M.B., dan B.J. Lapham, 1994, The Stability of Economic Integration and Endogenous Growth, Quarterly Journal of Economics 109, 299-308.

Devereux, M.B., dan BJ. Lapham, 1994, The Stability of Economic Integration and Endogenous Growth, Quarterly Journal of Economics 109, 299-308.

Dollar, David dan Aart Kraay (2000), "Growth is Good for the Poor", Development Research Group Working Paper, Washington, D.C.: The World Bank.

Dumairy (1996), Perekonomian Indonesia, Jakarta : Penerbit Erlangga.

Economies: Evidence from US. States and E. U. Countries, Tinbergen Institute Discussion Paper 05-045/2.

Economist Intelligence Unit, 2007, World Investment Prospects to 2011, Dominican Republic Export and '\ Investment Center (CHI-RD).

Egger, P., 2000, A Note on the Proper Econometric Specification of the Gravity Equation, Economic Letter 66, 25-31.

Emil Salim, 1980, Perencanaan Pembangunon dan Pemerataan Pendapatan, Yayasan Idayu. Jakarta,

Endoh, M., 1999, Trade Creation and Trade Diversion in the EEC. the LAFTA and the CMEA: 1960-1994, Applied Economics 31, 207-216.

Endoh, M; 2000, the Transition of Post-war Asia-Pacino Trade Relations, Journal of Asian Economics, 10, 4, 571-89. Rivera-Batiz, L, dan P. Romer, 1991, Economic Integration and Endogenous Growth, Quarterly Iournal of Economics 106, 531-555.

Endoh, M; 2000, the Transition of Post-war-Asia-Pacific Trade Relations, Journal of Asian Economics, 10, 4, 571-89.

Energy International Agency, 2007, International Energy Outlook. November 2007. 2007, Short-Term Energy Outlook.

Evans, CL, 2000, the Economic Significance ofNati'onaI Border E_§ects, Mimeo, Federal Research Bank of New York

Fajnzylber, P.R., dan A.M. Fernandes, 2004, International Economic Activities and the Demand for Skilled Labor: Evidence from Brazil and China, Social Science Research Network.

Frankel, I.A., 1993, Is Iapan Creating a yen block in East Asia and the Pacific?, In Jeffrey A. Frankel and Miles Kahler (eds), Regionalism and Rivalry: Japan and the United States in Pacific Asia, University of Chicago Press, 53-85.

Gregory, RR. dan R.C. Smart, 1992, Comparative Economic Systems, edisi ke-4, Houghton Mitflin Company, Boston,. 1997, Regional Trading BIocs in the World Economic System, Institute for International Economics. Washington, DC. Grossman, G.M., dan E. Helpman, 1991, Innovation and Growth in the Global Economy, Cambridge, MA: MIT Press.

Hamilton, C., dan A. Winters, 1992, Opening Up International Trade with Eastern Europe, Economic Policy, 77-104.

Hartono, D., Priyarsono, D.S., Nguyen, T. D., Ezaki, M., 2007, Regional Economic Integration and its Impacts on Growth, Poverty and Income Distribution: The Case of Indonesia, Working paper in Economics and Development Studies No. 200702, Department of Economics Padjajaran University.

Hasan, Rana dan M.G. Quibria (2002), " Poverty and Patterns Of Growth", ERD Working Paper Series No. 18, Economics and Research Department, Agustus, Manila: Asian Development Bank.

Hasan, Rana dan M.G.Quibria (2002), " Property andPatterns of Growth", ERD

Helpman, E., dan P. Krugman. 1985, Market Structure and Foreign Trade. Increasing Returns, Imperfect Competition. and the International Economy, Cambridge, MA: MIT Press.

Higgins, B. (1957a), Indonesia's Economic Stabilization and Development ,New York: Intitute of Public Relation.

Hill, Hal dan C, Williams (1989), The Economics and Social Dimensions of Regional Development in Indonesia", Ekonomi dan Keuangan Indonesia, 37(2).

Howard Wriggins And Gunnar AdlertKarlsson, Reducing Global Inequities, Fggbs Proiect/Council On Foreign Relations. Mc-Graw-Hill Book Company, New York, Tokyo, Toronto, 1978, hal.127

http://agustinadais.blogspot.co.id/2013/04/makalah-perekonomian-indonesia-pada.html

http://alexanderadin.blogspot.co.id/2016/03/perkembangan-perekonomian-indonesia-di.html

http://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/moneter/kebijakan-fiskal

http://nasional.sindonews.com/read/2013/12/18/15/818331/pembngunan-inklusif-peluang-memajukan-kaum-perempuan.

http://nuria-supma.blogspot.co.id/2016/02/perkembangan-perekonomian-indonesia.html

http://wardimaneyato.blogspot.co.id/2016/02/perekonomian-indonesia-pada-masa.html

http://www.academia.edu/17271372/Peranan_Sektor_Industri_di_Indonesia_-_Materi_Kuliah_Perekonomian_Indonesia

http://www.artikelsiana.com/2014/12/pengertian-tujuan-macam-macam-fiskal-kebijakan.html

http://www.aseansec.org

http://www.bi.go.id

http://www.bkpm.go.id

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id. Diakses: 8 Agustus 2017

http://www.comtrade.un.org/db/

http://www.doingbusiness.org

http://www.ilmu-ekonomi-id.com/2016/09/kebijakan-fiskal-pengertian-tujuan-teori-dan-macam-macam-kebijakan-fiskal.html
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/home.aspx.
http://www.imfstatistics.org.
http://www.itu.int.
http://www.kemenperin.go.id/artikel/5422/Peran-Sektor-Industri-dalam-Mendorong-Pertumbuhan-Ekonomi-Nasional
http://www.kemenperin.go.id/artikel/5422/Peran-Sektor-Industri-dalam-Mendorong-Pertumbuhan-Ekonomi-Nasional
http://www.kisaranku.blogspot.com/2010/10/pengertiansistemlengkap.html http://eduarticles.com/ekonomipancasila/
http://www.markiteconomics.com.
http://www.mirzaadany.blogspot.com/2010/06/sistemekonomipancasila.html?zx=55d9a3359deb01a8
http://www.sumeks.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id= 7141:sisteekonomipancasila&catid=75&Itemid=123
http://wwwbankofenland.co.uk/publications/inflation report
http://wwwidafazz.com/pengertiansistem.php
https://fadlyknight.Wordpress.com/2011/10/08/manajemen-likuiditas-bank/
https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_fiskal
https://raudhahputri.wordpress.com/2015/03/26/sejarah-ekonomi-indonesia-sejak-orde-lama-hingga-era-reformasi/
https://readtillend.wordpress.com/2015/04/24/kebijaksanaan-perekonomian-indonesia-selama-era-reformasi-sampai-sekarang/
https://www.google.co.id/amp/s/arumiarumi.wordpress.com/2015/02/16/makalah-likuiditas- perbankan/amp/
https://www.scribd.com/doc/316319179/Perekonomian-Indonesia-Sektor-Industri
Ialilian, H. dan I. Weiss, 2001, Foreign Direct Investment and Poverty in the ASEAN Region, Final Report of the First Sub-Project, University of Bradford.
Imada, P., M.F. Monies, dan S. Naya, 1991, A Free Trade Area: Implications for ASEAN, ASEAN Economic Research Unit, Institute Southeast Asian Studies (ISEAS), Singapore.

Imawan, Riswandha (2005),"Kebijakan yang Keterlaluan, kompas, 29 September.

IMF (1998), Word Economic Outlock 1998, Washington, D.C:

International Country Risk Guide, berbagai tahun, Published Monthly by The PR8 Group Inc., NY, USA. International for Management Development, berbagai edisi, The World Competitiveness Scoreboard.

International Labour Organization, 2007, Labour and Social Trends in ASEAN 2007: Integration, Challenger, and Opportunities.

International Monetary Fund 2012, The Rising Resilience of Emerging Market and Developing Economies, IMF Working Paper, Desember 2012.

International Monetary Fund, Direction of Trade Statistics, WIMP Survey Magazine, IMF Research, 2007, World Economic Outlook, Globalization and Inequality, October 2007. 2013, World Economic Outlook edisi Oktober 2013, IMF International Telecommunication Union, 2007,

Jantii, M. (1997), "Inequalityin Five Countries in the 1980s: The Role of Demographic shift, Markets, and Government Policies (Canada, Great Britain, Netherland, Sweden, and the United States)", Economica, 64.

John Friedmann, Urban Poverty In Latin America, some 'Iheoritical Considerations, dimuat dalam ; Development Dialogue, vol. 1, April 19?9, Dag Hammarskjold Foundation, upsala, 1979, hal. 101.

Juhro, Solikin M. (2009), Review Penerapan Inflation Targetting Framework di Indonesia Working Paper Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter

Karl Deutsch, Politics and Gouernment, How People Decide Their Fate, Houghton Mitfin Company. Boston, New York, Iondon, Sydney, Toronto, 1970, Hal. S9.=

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2008, Keputusan Menteri Keuangan Not/2008.

Keputusan Bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/1/KEP.GBI/2013 dan No. PRJ11/D.01/2013 pada 18 Oktober 2013 Tentang Kerjasama dan Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Kiryanto, Ryan (2013), "Optimisme masyarakat Indonesia", Infobank News, Mei, (http://www. infobanknews.com/2013/05/ pertumbuhan-inklusif-lebih-dinikmati-banyak-orang).

Klein, M., C. Aaron, dan B. Hadjmichael, 2001, Foreign Direct Investment and Poverty Reduction, New Horizons and Policy Challenges for Foreign Direct Investment in the let Century, Mexico City, 26-27,

Kuncoro, M,, 2000, Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1993, Indonesia Menjelang Tahun 2000: Sebuah Renungan, Analisis CSIS, tahun XXII, no.2, Maret April. 1997, Ekonomi Industri, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia, PT Widya Sarana Informatika, Yogyakarta.

Kuncoro, M. dan Anggito A., 1995, Struktur dan Kinerja Industri Indonesia dalam Era Deregulasi don Debirokratisasi, Kelola (Gadjah Mada University Business Review), no.10/IV/1995.

Kuncoro, Mudrajad (2008), "Strategi PengembanganUMKM di Tengah Krisis Keuangan Global", makalah, rapat kerja Nasional UMKMK Kadin, 21 Oktober, Jakarta.

Kurniati Y., Cadarajat Y., dart Yanfitri: Sensitivitas Ekspor Komoditas Unggulan terhadap Perlambatan Pertumbuhan Partner Dagang dan Perubahan Harga Internasional, Catatan Riset BI, Oktober 2008

Kurniati Y., Sahminan, dan Cadarajat Y. : Sensitivitas Komoditas Ekspor dan Impor Komoditas Utama terhadap Harga Internasional dan Nilai Tukar Rupiah, Catatan Riset, Bank Indonesia (2008).

Kwik, K.G. dan B.N. Marbun (penyunting), 1996, Sepak Terjang Konglomerat, cetakan ke-6, Pustaka Sinar harapan, Jakarta. 1994, Analisis Ekonomi Politik Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama & STIE IBII, Jakarta.

Laitner, I; 1997, Intergenerational and Interhousehold Economic Links, in: M.R. Rosenzweig dan O. Stark (eds.), Handbook of Population and Family Economics, Amsterdam: North Holland

Latumaerissa, Julius R, 2015, Perekonomian Indonesia dan Dinamika Global (Indonesian Economy and Global Dynamic), Jakarta: Mitra Wacana Media

Learner, E. E., 1984, Sources of International Comparative Advantage: Theory and Evidence, Cambridge, MA: MIT Press.

Leiderman, L., dan A. Razin, 1994, Capital Mobility: The Impact on Consumption, Investment and Growth, Cambridge University Press, Cambridge.

Lukas Hendratta, Health And Development : Review Of Polic,V Options At The Grass Roots Level, Dimuat Dalam : The Future OfAm'Dernic Community Medicine In Deueloping Countries, Edited By Willoughby Lathem M.D., Praeger Publishersn Praeger Special Studies, New York, London, Sydney. Toronto, 1979, Hal. S9.eMe1itz, 1., 2007, North, South and Distance in the Gravity Model, European Economic Review 51, 971-991.

Mas'oed, Muchtar (2001), "Pengantar. Resep itu Bernama

Mirza, H., 2002, Regionalisation, FDI, and Poverty Reduction: Lessons from other ASEAN Countrie5v University of Bradford School of Management.

Mizen, Paul The Credit Crunch of 2007-2008 : A Discussion of the Background, Market Reactions, and Policy Responses, Federal Reserve Bank of St. Louis Review.

Mubyarto (2002), Membangun Sistem Ekonomi, Yogyakarta: BPFE.

Mubyarto dan Boediono (penyunting), 1981, Ekonomi Pancasila, BPFE, Yogyakarta. 2000. Mcmbangun Sistem Ekonomi, BPFE, Yogyakarta. Rice, RC, 1983, The Origins of Basic Economic Ideas and Their Impact on 'New Order' Policies", Bulletin of Indonesian Economic Studies, vol. XIX, no.2, Agustus, h. 60-82. Salim, E. 1979, Ekonomi Pancasila, Prisma, Mei.

Mudrajad Kuncoro, makalah yang disajikan dalam acara Bedah Buku, yang diselenggarakan oleh Kopma UGM, di University Centre UGM, Yogyakarta, 13 Nopember 2000.

Munandar, 1-1., 2006, Essays on Economic Integration, Ph.D. Dissertation, Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands.

Negara, S. D., 2007, Integrasi Ekonomi ASEAN dan Mobilitas Tenaga Terampil, bahan tayangan Focus Group Discussion Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012, Pusat Pencliti Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Neher, Philip A : Economic Growth and Development : A Mathematical Introduction, John Wiley & Sons, Inc, New York, Hal 207-255

Nota Kesepahaman antara Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, No. MOU8/ML.011/2012, No. 14/2/GBI/DKM/NK, No.01/NK1/DK/XII/2012, dan No. MOU. 001/DK/XII/2012 tentang Koordinasi Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan, tanggal 3 Desember 201

Okubo, T., 2000, the Border Eject in the Japanese Market: A Gravity Model Analysis. 0 Connor, 1., dan D. Orsmond, The Recent Rise in Commodity Prices: A Long Run Perspective, Economic Analysis Department.

Pangestu, Mari E., AEC Blueprint: Tantangan bagi Indonesia, CSIS Jakarta, 2 November 2007

Peraturan Bank Indonesia No. 15/11/PBI/2013 tanggal 22 November 2013 tentang Prinsip Kehatihatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal

Peraturan Bank Indonesia No. 15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013 Tentang Kecukupan Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia No. 15/3/PBI/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional

Peraturan Bank Indonesia No. 15/3/PBI/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/2IPBl/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia No. 7/37/PBI/2005 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 5/31/PB1/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau pada 12 November 2012, dengan ketentuan tarif cukainya mulai berlaku pada 25 Desember 2012.

Permendag No.16/2013 (Revisi Permendag.No. 60/2012) dan Permentan No. 47/2013 (Revisi Permentan No. 60/2012).

Poyhonen, P, 1963, A Tentative Model for the Volume of Trade Between Countries, Weltwirt schaftliches Archiv 90, 93-100.

Prastowo, Nugroho et.a1: Dampak Financial Deepening terhadap Pelaksanaan Kebijakan Moneter di Indonesia, Laporan Hasil Penelitian BI, Desember 2008.

Prof. Dr. Dawam Rahardjo, Presiden dari The International Institute of Islamic Thought Indonesia (HIT-Indonesia), Anggota Komisi Khusus Kajian Ekonomi Pancasila, Ekonomi Pancasila dalam Tinjauan Filsafat 6 Januari 2004.

Ravallion, Martin dan Datt, Gaurav (1996a), " How to importan to india poor is the sectoral composition of economic growt?" World Bank Economic Review, 10(1).

Ravallion, Martin dan Datt, Gaurav (1996b)," Why Have Some Indian States Done Better Than Other At Reducing Rural Poverty?" Policy Research Working Paper 1594, April, Policy Research Department, Poverty And Humanresource Division, Washington, D.C. : Word Bank.

Ridhwan, M. M., Werdaningtyas, H., dan Grace, M.V. (2013), Analisis Dekomposisi, Determinan, dan Konvergensi Inflasi Regional di Indonesia",

Rivera-Batiz, L, dan P. Romer, 1991, Economic Integration and Endogenous Growth, Quarterly Journal of Economics 106, 531-555.

Sanusi, Bachrawi (2000), Sistem Ekonomi, Surat Pengantar, Jakarta

SE No.13/9/DPU tanggal 5 April 2011 tentang Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank Umum di Bank Indonesia.

Sharma, S.C., dan S.Y. Chua, 2000, ASEAN: Economic Integration and Inna-Regional Trade, Applied Economics Letters 7, 165-169.

Sjahrir, I987, Kebijaksanaan Negara: Konsistensi dan Implementasi, LP3ES, Jakarta.

Smaghi, Lorenzo B. : The Financial Crisis and Global Imbalances Two Sides of The Same Coin, Speech at The Asia Europe Economic Forum Conference, Beijing 9 Desember 2008.

Soesastro, Hadi, Kebijakan Persaingan, Daya Saing, Liberalisasi, Globalisasi, Regionalisasi, dan Semua Itu, CSIS Working Paper Series, Maret 2004

Soetrisno, Noer (2001), Rekonstruksi Pemahaman Koperasi, Merajut Kekuatan Ekonomi Rakyat, Instrans, Jakarta.

Sohn, C.-H., dan I. Yoon, 2001, Does the Gravity Model Fit Koreais Trade Patterns? Implications for Koreais PTA Policy and North-South Korean Trade. 'Swasono, S. E. 1992, Demokrasi Ekonomi Sekali Lagi Restrukturisasi dan Reformasi Ekonomi", dalam M. WM Karim "We Ridjalfeiimmiku Bkonomi dan lptek dalam Pembangunan, PT Tiara wacana, Yogyakarta. 2004, Skills, Training Policies and Economic Performance: International Perspectives, Paper presented at MENA Training Impact Evaluation Workshop Casablanca, Morocco, January 20-22, The World Bank Institute.

Strategi pembngunan yang inklusif dan berkelanjutan; http://trirustiana.wordpress.com/2011/03/14/strategi - pembangunan - yang - inklusif - dan - berkelanjutan/.

Sugiharto (2007), Peran Strategis BUMN dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Hari ini dan Masa Depan, PT Elex Media Komputindo dan BUMN Executive Club, Jakarta.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/10/ DPNP tanggal 15 Maret 2012 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/40/DKMP tanggal 24 September 2013 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti Kredit atau Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti dan Kredit atau Pembiaya

Surat Edaran Bank Indonesia No.15/8/DASP tanggal 30 April 2013 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.11/15/DASP tanggal 4 Mei 2009 perihal Batas Nominal Nota Debet dan Transfer Kredit dalam Penyelenggaraan SKNBI

Surat Edaran Ekstem Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum

Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia No. 15/10/DPNP tanggal 28 Maret 2013 perihal Laporan Kegiatan Penitipan dengan Pengelolaan (trust) Bank Umum yang disampaikan kepada Bank Indonesia

Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia No. 15/14/DPNP tanggal 24 April 2013 tentang Perubahan ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum.

Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia No. 15/21/DPNP tanggal 19 Juli 2013 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia No. 15/27/DPNP tanggal 19 Juli 2013 Perihal Persyaratan Bank Umum untuk Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing.

Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia No. 15/43/DPNP tanggal 21 Oktober 2013 Perihal; Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/29/DKBU tanggal 31 Juli 2013 Perihal Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat.

Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia No. 15/45/DPNPI2013 tanggal 18 November 2013 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/36/DKBU tanggal 21 Desember 2012 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) Bank Perkreditan Rakyat.

Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia No. l5/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 tentang Penentuan Kualitas Aset Bank.

Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia No.15/39/DPNP tanggal 17 September 2013 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/20/DKBU tanggal 22 Mei 2013 Perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat.

Surat Keputuasan (SK) dan Nota Kesepahaman Bersama (MoU)

Tambulan, Tulus (2013a), "Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Peluang, Tantangan dan Ancaman Bagi UMKM Indonesia', Seminar Nasional dan Sidang Pleno ISEI XVI, 18-20 September, Jambi.

Tambunan, T.H. 2011.Perekonomian Indonesia Kajian Teoritis Dan Analisis Empiris.Bogor : Ghalia Indonesia.

Tambunan, Tulus T.H. (2006b), Perekonomian Indonesia Sejak Orde

Tan, H.W., 2000, Technological Change and Skills Demand: Panel Evidence from Malaysian Manufacturing. Working Paper the World Bank Institute.

Taylor, John B., The Financial Crisis and The Policy Responses: An Empirical Analysis of What Went Wrong NBER Working Paper 2009.

Tlnbergen, I, 1962, Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy, the Twentieth Century Fund, New York.

Tulus T.H. Tambunan (2016), "Perekonomian Indonesia Era rde Lama Hingga Jokowi", jakarta

Tulus T.H.Tambunan (2016), Perekonomian Indonesia Era Orde Lama Hingga Jokowi, Jakarta.

Undang-Undang (UU)

Undangundang No. 21 tahun 2011 Tentang Jasa Keuangan tanggal 22 November 2011

United Nations, Statistics Division, Commodity Trade Statistics Database, 2007, Transnational Corporations, Extractive Industries and Development, World Investment Report, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 2007, World Investment Prospect Survey 2007 2009, United Nations Conference on Trade and Development (UNCI'AD), 2007, Fighting Climate Change: Human Solidarity in a Divided World, Human Development Report, United Nation Development Programme (UNDP). 2008, Doing Business Survey, UNCTAD, Assessing The Impact of the Current Financial and Economic Crisis on Global FDI Inflows, Januari 2009. Viaene, I. M; dan I. Zilcha, 2003, Human Capital Formation and Cross Country Comparison of Inequality, Mimeo, Erasmus University Rotterdam. Viner, I. 1950, The Custom Union Issue, New York, Carnegie Endowment for International Peace Wibisono, C; 1989, "Anatomi don Prohl Konglomerat Bisnis Indonesia", Management dan Usahawan Indonesia, Desember. Wolf Scott, Poverty Monitoring In Developing Countries, Dimuat Dalam :

Development and Change, Vol. 10, No. 3, Juli 1979' SAGE Publications, Iondon and Beverly Hills, 1979, Hal. 446.

Working Paper Series No. 18, Economics and Research Department,

World Bank, World Deuelopment Report 75W, 14 Ashington D. C., Agustus 1980, Hal. 33.

World Economic Forum, 2006, Global Competitiveness Report, Geneva, Switzerland. 2007, Global Competitiveness Report, Geneva, Switzerland.

www.bps.go.id

www.tnp2k.go.id

Yanuarti, T. et al: Identijikasi Struktur Ekspor Indonesia (Berdasarkan Tabel Input-Output 2005 don Statistik Industri 2001 2005, Catatan Riset BI (2008).

Zhuang (2010), ADB (2011).

_____(2003a), "Pasang Surut Perkembangan Koperasi di Dunia dan Indonesia", makalah, Jakarta.

_____(2003b), "Koperasi Indonesia: Potret dan Tantangan", Jurnal Ekonomi Rakyat, II(5), Agustus.

_____(2003c), "Wajah Koperasi Tani dan Nelayan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis", Jurnal Ekonomi Rakyat, II(5).

_____(2006b)"Making the New Indonesia Work for the Root", November, Kantor Bank Dunia Jakarta.

_____(2011a), Hamzirwan (2008), Mengendalikan Inflasi, Ciptakan Stabilitas Upah", Kompas, Bisnis&Keuangan, Selasa, 2 Desember 2008,

_____(2011a), Perekonomian Indonesia. Kajian Teoritis dan Analisis Empiris, Jakarta: Ghalia Indonesia

_____(1957b), "A Study of the Indonesian Economic Development ", Ekonomi danKeuangan Indonesia, 10, September.

_____2006, Kajian Stabilitas Keuangan, beberapa edisi 2006-2013

_____2007, Outlook Ekonomi Indonesia 2007-2011, edisi Januari 2007, Bank Indonesia

_____2007, Outlook Ekonomi Indonesia 2007-2011, edisi Januari 2007, Bank Indonesia

_____2007, Outlook Ekonomi Indonesio 2007-2011 Inflasi, Kemiskinan dan Penawaran Agregat di Perekonomian Indonesia, edisi Juli 2007, Bank Indonesia
_____2008, Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia , beberapa edisi 2008-2014
_____2008, Statistik Perbankan Indonesia, beberapa edisi 2008-2014
_____2009, Booklet Perbankan Indonesia beberapa edisi 2009-2014
_____2009, Laporan Neraca Pembayaran Indonesia, beberapa edisi triwulan 2009-2014
_____2009, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia di Bidang Moneter, Perbankan, dan Sistem Pembayaran, beberapa edisi 2009-2014
_____2010, Laporan Kebijakan Moneter, Ekonomi, Moneter, dan Keuangan, beberapa edisi triwulan 2010-2014
_____2017,Menuju Ketangguhan Ekonomi :Sumbang Saran 100 Ekonom Indonesia, Kompas, Jakarta

الإدارة العالمية الجمعية
N U
نهضة العلم
١٣٤٤
1926

UNIVERSITAS SAINS AL QUR'AN JAWA TENGAH
الجامعة لعلوم القرآن
UNSIQ
JAWA TENGAH
WONOSOBO

UNSIQ
LPNU
LEMBAGA PEREKONOMIAN NAHDLOTUL 'ULAMA